

# Genjot Ekonomi, China Siapkan Paket Stimulus Fiskal Baru

Jumat, 21 Agustus 2026 17:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119144/genjot-ekonomi-china-siapkan-paket-stimulus-fiskal-baru>

Bloomberg, China memperkuat program yang memanfaatkan sumber daya fiskal untuk mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha dan konsumen. Sejumlah langkah baru akan diluncurkan pada paruh kedua tahun ini seiring pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berada di bawah target tahunan pemerintah.

“Kami telah mempelajari dan menyusun kebijakan fiskal dan keuangan baru yang terkoordinasi, yang akan diperkenalkan pada paruh kedua tahun ini,” kata Wakil Menteri Keuangan China Liao Min dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (21/8).

Pengumuman tersebut menjadi upaya terbaru pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap perekonomian. Langkah ini juga menegaskan fokus pemerintah pada kebijakan fiskal yang lebih terarah untuk menghidupkan kembali permintaan kredit dan meningkatkan belanja swasta di tengah meningkatnya tekanan fiskal di tingkat pemerintah daerah.

Dalam pernyataannya, Liao merujuk pada program yang diperkenalkan awal tahun ini. Program tersebut memberikan sejumlah insentif, termasuk pinjaman berbunga rendah yang didukung subsidi fiskal bagi perusahaan dan konsumen, serta jaminan kredit untuk mendorong investasi swasta.

Program tersebut telah diperluas sejak 1 Agustus dengan menambah jenis pinjaman yang dapat memperoleh subsidi bunga bagi usaha kecil dan mikro serta konsumen. Paket fiskal untuk mendorong permintaan domestik telah mendukung penyaluran pinjaman baru lebih dari 20 triliun yuan dalam tujuh bulan pertama tahun ini, meningkat lebih dari 4% dibandingkan 2025.

Data pemerintah yang dirilis awal pekan ini menunjukkan produksi industri, konsumsi, dan investasi China melemah lebih dari perkiraan pada Juli. Tekanan terhadap pembuat kebijakan untuk meningkatkan stimulus juga semakin besar, mengingat banyak ekonom memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) telah semakin berada di bawah target tahunan Beijing sebesar 4,5%-5% setelah hanya mencapai 4,3% pada kuartal II.

Namun, Liao mengindikasikan kuota obligasi pemerintah yang telah direncanakan untuk tahun ini masih cukup untuk memastikan pemerintah mempertahankan “intensitas belanja fiskal”. Ia menyebut masih tersedia lebih dari 2 triliun yuan dari kuota tersebut untuk digunakan dalam beberapa bulan mendatang.

Kementerian Keuangan akan mengarahkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi, mempercepat belanja fiskal, serta memperkuat pengawasan terhadap daerah yang masih lambat, dalam upaya mempercepat pelaksanaan berbagai proyek, kata Liao.

Pernyataan Liao, yang juga merupakan salah satu negosiator utama China dalam perundingan dagang dengan AS, menunjukkan meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan sembari menjaga risiko utang tetap terkendali.

China akan berupaya membangun sistem fiskal yang “lebih kuat, lebih terkonsolidasi, lebih seimbang, dan berkelanjutan” dalam rencana ekonomi berikutnya hingga 2030, kata Liao.

Para pembuat kebijakan bertujuan mengonsolidasikan seluruh pendapatan yang berasal dari penggunaan kewenangan administratif, kredit pemerintah, serta sumber daya dan aset milik negara

sepenuhnya ke dalam pengelolaan anggaran China. Langkah tersebut dilakukan untuk “terus menciptakan sumber pendapatan fiskal yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan secara “tegas” mencegah penumpukan “utang tersembunyi” baru dan melakukan peninjauan “sistematis” terhadap keringanan pajak yang diberlakukan sebelumnya. Tujuannya adalah menghentikan atau menyesuaikan kebijakan tersebut guna mengurangi “kebijakan yang terfragmentasi” dan distorsi pasar, kata Liao.

Pemerintah juga akan memperketat pemberantasan subsidi ilegal di tingkat daerah dan membangun mekanisme persetujuan untuk pemberian bantuan baru. Liao menambahkan, pemerintah telah menyusun daftar kebijakan yang tidak lagi boleh ditawarkan.

## **AS Beberkan Rencana Isolasi Ekonomi Iran Pekan Depan**

Jumat, 21 Agustus 2026 11:10 WIB

Jeff Mason dan Patrick Sykes

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119081/as-beberkan-rencana-isolasi-ekonomi-iran-pekan-depan/2>

Bloomberg, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyatakan bahwa AS akan segera membeberkan rencananya untuk mengisolasi Iran dan para mitra dagangnya secara ekonomi. Hal ini disampaikan setelah Donald Trump mengancam Teheran dan pihak lainnya dengan "ECONOMIC D-DAY" guna mengakhiri kebuntuan konflik di Timur Tengah.

Bessent, dalam sebuah wawancara dengan CNBC, menyampaikan bahwa dirinya bakal menggelar konferensi pers pada Senin (24/8) untuk "membicarakan secara pasti mengenai apa yang akan kita lakukan" sembari menggenjot tekanan terhadap para sekutu AS agar bersedia bergabung dalam upaya tersebut.

"Tekanan ekonomi berarti bahwa kami mendatangi seluruh sekutu kami—dan ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia—dan kami mendatangi mereka seraya menegaskan, 'Anda berada di pihak kami, atau melawan kami,'" ujar Bessent.

Ancaman tersebut—yang menggemakan bahasa yang digunakan mantan Presiden George W. Bush setelah serangan 11 September 2001—mengemuka setelah serangan militer selama berbulan-bulan dan blokade laut penuh di pelabuhan-pelabuhan Iran gagal memaksa Teheran untuk menyerah.

Baik Trump maupun Bessent tidak merinci secara pasti tindakan apa yang akan mereka ambil atau negara mana saja yang bakal ditargetkan. Meski demikian, peringatan keras tersebut langsung mengarahkan sorotan utama ke China, yang membeli porsi terbesar dari minyak Iran. Harga minyak mentah jenis Brent pun menguat untuk hari kelima ke level sekitar US\$94 per barel, mencatatkan angka tertinggi sepanjang bulan ini.

Saat ditanyai pada Kamis (20/8) mengenai apakah China akan menjadi target, Bessent menjawab bahwa "banyak pembicaraan sebaiknya dilakukan secara tertutup," sembari menambahkan bahwa semua pihak menginginkan Selat Hormuz yang krusial itu kembali dibuka untuk lalu lintas komersial. Bessent mencatat bahwa China memperoleh sebagian besar pasokan energinya dari kawasan tersebut, seraya menambahkan "hal itu akan sangat membantu mereka jika mau menyelaraskan diri dengan program ini."

Dalam reaksi pertamanya terhadap pernyataan Trump, Beijing menegaskan bahwa sanksi dan tekanan tidak akan membuahkan hasil, serta menyerukan penyelesaian secara diplomatik. Sementara itu, pihak

Iran menyatakan bahwa ancaman Trump merupakan "pengalihan isu" dari krisis dalam negeri Amerika sendiri yang tengah dibelit lonjakan utang tak tertandingi dan membumbungnya biaya suku bunga.

"Menggandakan kebijakan yang gagal hanya akan mendatangkan kekalahan yang lebih besar—dan permusuhan dari rakyat Iran," tegas Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di platform X. "Terorisme ekonomi AS mengancam perekonomian global serta kedaulatan di seluruh dunia."

Iran telah bertahan dan mampu beradaptasi dengan sanksi ekonomi yang berat selama puluhan tahun, sehingga tidak jelas hukuman ekonomi baru apa lagi yang dapat dijatuhkan AS yang belum pernah dialami oleh Teheran. Menargetkan penjualan minyak Iran juga berisiko memicu konfrontasi baru dengan China, sekaligus menyulitkan upaya Trump untuk memperpanjang gencatan senjata tarif dengan Presiden Xi Jinping, yang dijadwalkan mengunjungi AS bulan depan.

"Saya tidak berpikir ada solusi ajaib di sini," ujar Daniel Fried, mantan Duta Besar AS untuk Polandia, kepada Bloomberg Television. "Apakah ada tekanan lebih besar yang dapat kita terapkan terhadap perekonomian Iran? Mungkin saja. Namun, saya kira mereka telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dengan sangat baik saat ini. Daya tawar kita tidak terlalu besar dalam jangka pendek."

Pernyataan Trump mengindikasikan bagaimana AS, yang kini didera keterbatasan amunisi dan membengkaknya biaya, ingin bergeser dari kampanye militer yang telah melumpuhkan sebagian besar pemimpin puncak Iran serta memukul perekonomiannya, tetapi sejauh ini belum berhasil memaksa negara tersebut bertekuk lutut.

China tidak mengakui sanksi sepihak, namun entitas-entitas negaranya umumnya menjauhi minyak yang masuk dalam daftar hitam. Bank-bank BUMN terbesarnya juga memiliki rekam jejak mematuhi sanksi AS terhadap Iran, Korea Utara, bahkan para pejabat tinggi di Hong Kong, demi menghindari risiko kehilangan akses ke sistem penyelesaian dolar AS.

Washington sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa kilang independen dan perusahaan-perusahaan China sejak AS melancarkan perang melawan Iran pada akhir Februari lalu. Namun sejauh ini, AS masih menahan diri untuk tidak menargetkan bank-bank besar China yang membiayai perdagangan tersebut.

Pada Mei lalu, China memerintahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk tidak mematuhi sanksi AS terhadap lima kilang minyak, sementara bank-bank terbesarnya berada dalam posisi serba salah di antara arahan Beijing dan risiko kehilangan akses ke sistem keuangan AS.

"Sanksi dan tekanan tidak akan membantu menyelesaikan masalah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kepada para wartawan di Beijing pada Kamis (20/8). "China mengimbau pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab dan berupaya menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomatik dan politik."

Trump menuntut seluruh negara untuk berhenti memberikan akses bagi Iran ke tempat penukaran uang, transfer tunai, jalur swap, pendaftaran kapal, perusahaan cangkang, dan jalur-jalur untuk menyelundupkan minyaknya. Ia juga berupaya menggagal dukungan dari negara-negara lain yang sejauh ini menolak mendukung perangnya melawan Republik Islam tersebut, dengan menyatakan bahwa AS membutuhkan seluruh sekutunya untuk membantu "mengisolasi dan mengalahkan ancaman Iran."

AS mendapat dukungan pada Selasa ketika Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan hubungan ekonomi dengan Iran setelah menuduh negara itu menembakkan dua rudal balistik ke wilayah perairan teritorialnya. Iran sendiri membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut.

UEA tercatat sebagai mitra dagang utama Iran pada tahun lalu, di mana Teheran sangat mengandalkan hubungan tersebut untuk mengakses barang-barang luar negeri dan valuta asing, diikuti oleh China, Turki, dan India.

Tujuan Trump adalah memaksa Iran masuk ke meja perundingan baru yang ditujukan untuk mengakhiri perang secara permanen, memaksa Teheran menghentikan program nuklirnya, serta menghentikan cengkramannya di Selat Hormuz. Poin-poin tujuan tersebut sempat dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak pada Juni lalu, namun kemudian runtuh di tengah aksi saling serang balasan.

Iran telah bertahan dari sanksi ekonomi selama berdekade-dekade, dan responsnya adalah mengajukan tuntutan sendiri, termasuk pencairan aset-asetnya yang dibekukan, penghentian sanksi, serta ganti rugi atas kerusakan akibat perang.

Penyelesaian konflik ini menjadi kian mendesak bagi Trump seiring aksinya menghadapi tingginya harga bensin, kian tidak populernya perang di mata publik, serta kekhawatiran Partai Republik akan kehilangan kontrol atas salah satu atau kedua kamar di Kongres pada pemilu sela (midterm elections) November mendatang. Awal pekan ini, ia bahkan sempat mengancam akan membom Oman—sekutu Amerika yang kerap berperan sebagai mediator—jika negara itu dinilai menghalangi langkah AS.

Ancaman Iran terhadap pelayaran komersial telah melumpuhkan lalu lintas di Selat Hormuz, sementara blokade balasan yang diperintahkan Trump telah membatasi secara ketat kemampuan Iran untuk mengeksport minyaknya sendiri.

Perang yang kini mendekati genap enam bulan tersebut beserta blokade yang menyertainya telah memicu inflasi hingga hampir 80% di Iran, dan mata uangnya telah kehilangan hampir 30% nilainya terhadap dolar sepanjang tahun ini. Para ekonom pun memperingatkan bahwa konflik ini berisiko menyeret negara berpenduduk 90 juta jiwa tersebut ke dalam salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya.

## **AS Tekan Ekonomi Iran, Hubungan dengan China Terancam Memanas**

Jumat, 21 Agustus 2026 09:30 WIB

Eric Martin dan Magdalena Del Valle

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119072/as-tekan-ekonomi-iran-hubungan-dengan-china-terancam-memanas/2>

Bloomberg, Ketika Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent berjanji untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan membidik para mitra ekonominya, ia mengulang kembali peringatan mantan Presiden George W. Bush kepada para sekutu AS usai serangan 11 September.

"Anda berada di pihak kami, atau melawan kami," ujar Bessent dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada Kamis (20/8). "Ini bakal menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia."

Pernyataan keras tersebut dimaksudkan untuk menggarisbawahi keinginan Washington dalam menghukum negara-negara yang masih berbisnis dengan Republik Islam tersebut, dengan Bessent menyatakan bahwa dirinya akan membeberkan rencana itu dalam konferensi pers pada Senin.

Namun, hal itu juga mencerminkan minimnya pilihan yang dimiliki AS untuk mengakhiri perang yang tidak populer ini, sembari merujuk pada ungkapan terkenal yang menandai dua dekade perang tak berkesudahan AS di Timur Tengah—hal yang berulang kali dijanji akan dihindari oleh Donald Trump dan Kepala Pertahanan Pete Hegseth.

Beijing merupakan pembeli utama minyak Iran, dan pemerintahan Trump sejauh ini menunjukkan sedikit minat untuk menantang hubungan ekonominya dengan Iran, terlebih mengingat Presiden Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi AS bulan depan di tengah upaya dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut mengarungi gencatan senjata dagang yang ringkih.

Iran telah menjadi sasaran sanksi ketat selama berdekade-dekade, dan AS kini sedang menerapkan blokade laut di pelabuhan-pelabuhannya setelah serangan udara selama berbulan-bulan gagal memaksa Teheran menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang, membuka kembali Selat Hormuz, dan menyerahkan material nuklirnya.

Tidak jelas tindakan ekonomi berarti apa lagi yang tersisa bagi Washington, selain membidik China atau meningkatkan aksi sanksi terhadap entitas-entitas lebih kecil yang berbisnis dengan Iran di negara lain. Sementara itu, kerugian bagi perekonomian di seluruh dunia kian menumpuk seiring perang yang terus berlarut-larut.

"AS tidak memiliki kapasitas (bandwidth) untuk menerapkan rezim sanksi yang benar-benar kedap terhadap negara seperti Iran, yang memiliki keahlian dalam memutarbalikkan sanksi," ujar Ali Vaez, Wakil Direktur Program di International Crisis Group. "Presiden tidak memiliki kesabaran yang dibutuhkan agar kebijakan semacam itu membuahkan hasil, yang pengukurannya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bukan hitungan minggu."

Trump pada Rabu memperingatkan bahwa "NEGARA MANA PUN yang membiarkan lembaga keuangannya, bisnisnya, bandaranya, atau entitas pemerintahannya memberikan jenis bantuan apa pun kepada Iran, bakal menghadapi Konsekuensi Ekonomi yang SANGAT BESAR." Trump menekankan bahwa "Penyelundupan minyak, jalur pertukaran mata uang, transfer tunai, tempat penukaran uang, pendaftaran kapal, perusahaan cangkang—Semuanya harus dihentikan SEKARANG."

Fokus pada minyak tersebut menempatkan Beijing dalam bidikan utama, mengingat negara itu membeli 90% ekspor minyak mentah Iran. Washington telah menjatuhkan sanksi pada beberapa kilang independen China sejak perang dimulai pada Februari, tetapi masih menahan diri untuk tidak menargetkan bank-bank besar China yang membiayai perdagangan tersebut.

"Apakah Gedung Putih bersedia memprioritaskan kampanye perang ekonomi baru ini di atas hubungannya dengan China? Dan jika mereka memilih demikian, ada konsekuensi serius yang menanti," kata Chris Kennedy, analis strategi ekonomi di Bloomberg Economics. Kennedy menyebut bahwa ancaman-ancaman baru ini juga merupakan "pengakuan bahwa AS mulai kehabisan pilihan."

Keputusan apa pun untuk menghantam China berisiko memperburuk ketegangan hanya beberapa minggu sebelum Trump menyambut Xi dalam kunjungan pertama pemimpin China tersebut ke Washington dalam satu dekade. Hal ini juga meningkatkan ancaman aksi balasan China yang dapat memicu dampak buruk bagi perekonomian AS menjelang pemilu sela pada November mendatang yang sangat bergantung pada isu-isu keuangan masyarakat.

Beijing telah menunjukkan kesediaannya untuk melawan balik Trump, terutama dengan mengumumkan pembatasan ekspor tanah jarang yang memaksa Gedung Putih mundur dari perang tarif mereka.

Kementerian Luar Negeri China menepis ancaman Trump untuk melancarkan "perang ekonomi" terhadap mitra dagang Iran, dengan menyatakan bahwa langkah itu tidak akan berhasil menyelesaikan ketegangan di kawasan.

"Tidak ada tawaran dari pemerintahan Trump yang cukup untuk meminta Xi tunduk begitu saja kepada Trump secara terbuka dan berdampak besar seperti itu," ujar Brett Erickson, Managing Principal di Obsidian Risk Advisors sekaligus pakar sanksi. "Ini sama saja meminta Beijing secara sukarela membiarkan Amerika Serikat mendikte dengan siapa mereka boleh dan tidak boleh berbisnis, dan itu adalah preseden yang sama sekali tidak berniat mereka ciptakan."

Fokus Trump untuk menghentikan penjualan minyak—sumber pendapatan utama Teheran—memang membawa dampak. "Dalam kondisi ini, ekspor minyak kami praktis telah terhenti," kata Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati kepada televisi pemerintah pekan ini.

Meski China merupakan target yang paling jelas, negara-negara lain juga berada di garis depan jika AS melangkah lebih jauh untuk mengisolasi ekonomi Iran.

Uni Emirat Arab (UEA) sejauh ini menjadi mitra dagang terbesar Iran secara keseluruhan dan pemasok utama barang luar negeri serta valuta asing bagi negara tersebut. Meski demikian, UEA pekan ini menyatakan memutus semua hubungan ekonomi dengan Republik Islam tersebut, dengan mengklaim Teheran telah menembakkan rudal balistik ke wilayahnya.

Turki, yang merupakan sekutu NATO bagi AS, adalah pembeli ekspor Iran terbesar setelah China, menurut data yang dihimpun Bloomberg. India, mitra strategis AS yang sedang coba diajak bernegosiasi kesepakatan dagang oleh Trump, juga menjadi sumber impor utama bagi Iran, khususnya bahan pangan dan obat-obatan.

Tempat penukaran uang di UEA dan Irak turut membantu Iran merepatriasi dana setelah melakukan penjualan minyak, dengan mengonversi pembayaran—yang sering kali diterima dalam yuan China—ke dalam mata uang yang dapat digunakan Teheran. Namun, menargetkan firma-firma tersebut mungkin tidak akan cukup untuk memaksa Iran mengalah.

Bahkan tanpa adanya perlawanan dari negara lain, muncul keraguan apakah kampanye tekanan ekonomi AS yang ditingkatkan ini bakal berhasil. Para analis juga mengingatkan bahwa tidak jelas apakah AS dapat sepenuhnya memutus hubungan perdagangan Iran—termasuk jalur darat—dengan negara-negara tetangganya, yang telah bertahan selama bergenerasi-generasi karena kedekatan geografis dan ikatan sejarah yang mendalam.

Banyak hal akan bergantung pada rincian kebijakan AS dan tingkat penegakannya, kata Claire O'Neill McCleskey, mantan pejabat Departemen Keuangan dan pendiri pendamping firma penasihat sanksi Clarity Compliance Consulting.

"Pada titik ini, gertakan publik secara luas saja kemungkinan besar tidak akan mengubah perilaku," tegasnya. "Perlu tindakan nyata terhadap bank atau perusahaan asing agar negara-negara ketiga memahami secara pasti apa yang bersedia ditargetkan oleh pemerintahan Trump."

## **Klaim Pengangguran AS Turun Tipis, Pasar Kerja Tetap Stabil**

Jumat, 21 Agustus 2026 07:45 WIB

Jeffrey Sparshott

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119058/klaim-pengangguran-as-turun-tipis-pasar-kerja-tetap-stabil/2>

Bloomberg, Pengajuan klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat (AS) bergerak turun tipis pada pekan lalu, tetap berada di dekat level terendah dalam sejarah dan mengindikasikan minimnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh pasar tenaga kerja.

Klaim awal berkurang 6.000 menjadi 206.000 untuk pekan yang berakhir pada 15 Agustus, menurut data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada Kamis (20/8). Angka ini lebih rendah dari proyeksi rata-rata dalam survei ekonom Bloomberg yang memperkirakan 210.000 klaim.

Sementara itu, klaim berkelanjutan, yang menjadi indikator jumlah orang yang menerima tunjangan secara berulang, naik menjadi 1,80 juta pada pekan sebelumnya.

Data terbaru ini mengemuka setelah klaim awal mingguan sempat merosot ke angka 189.000 pada pekan yang berakhir 18 Juli lalu, yang merupakan level terendah sejak tahun 1969. Meski sempat mengalami kenaikan sejak saat itu, jumlah pengajuan klaim secara keseluruhan masih berada pada level yang tergolong rendah secara historis.

Para pemberi kerja di AS tercatat enggan melakukan PHK namun juga lambat dalam merekrut pekerja baru sepanjang tahun ini. Kondisi ini membuat pasar tenaga kerja relatif stabil bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi para pencari kerja.

Rata-rata pergerakan empat pekan untuk pengajuan klaim baru—indikator yang membantu meratakan volatilitas data mingguan—naik menjadi 204.000 pada pekan lalu.

Tanpa penyesuaian fluktuasi musiman, klaim awal mencatatkan penurunan. Hal tersebut mencerminkan berkurangnya pengajuan klaim di sejumlah negara bagian, termasuk Michigan, South Carolina, dan California.

## **Neraca Pembayaran Indonesia Bertumpu kepada 'Uang Panas'**

Jumat, 21 Agustus 2026 15:51 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119128/neraca-pembayaran-indonesia-bertumpu-kepada-uang-panas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Defisit Neraca Pembayaran Indonesia pada kuartal II-2026 tercatat menyusut drastis menjadi hanya US\$0,88 miliar, dari defisit kuartal sebelumnya yang mencapai US\$9,1 miliar. Sementara, cadangan devisa masih berada di US\$145,6 miliar, setara dengan pembayaran 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, angka ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Akan tetapi, perbaikan ini belum menggambarkan bahwa transaksi eksternal Indonesia membaik. Sebab jika ditelisik lebih dalam, maka kondisi neraca pembayaran membaik karena lonjakan arus modal masuk berhasil menutup pelebaran defisit transaksi berjalan (current account).

Padahal, jika ditelaah, transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II-2026 malahan cukup lebar. Defisitnya mencapai US\$12,5 miliar atau sebesar 3,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, pada kuartal pertama defisit pos ini adalah US\$3,6 miliar, atau 1% dari PDB.

Defisit ini menandai posisi neraca pembayaran di zona negatif selama tiga kuartal beruntun.

Pelebaran ini dipicu oleh menyusutnya surplus perdagangan barang serta membesarnya defisit jasa dan pendapatan primer. Dengan begitu, terlihat bahwa kebutuhan devisa dari aktivitas ekonomi domestik meningkat jauh lebih cepat.

Pada kuartal kedua, surplus perdagangan barang Indonesia turun tajam dari sekitar US\$8,2 miliar menjadi US\$1,3 miliar. Surplus non-migas memang masih sekitar US\$11,5 miliar, tetapi posisi ini tak lagi cukup besar untuk mengimbangi defisit migas yang membengkak.

Defisit perdagangan migas tercatat melebar menjadi US\$10,18 miliar dari sebelumnya hanya US\$5,09 miliar. Pelebaran ini terjadi di tengah lonjakan harga minyak dunia dengan adanya konflik di Timur Tengah.

Di sisi lain, tekanan juga datang dari neraca jasa. Defisit jasa melebar dari US\$4,4 miliar menjadi US\$5,9 miliar. Di sektor perjalanan, penerimaan dari wisatawan mancanegara sebenarnya meningkat seiring kenaikan jumlah kunjungan.

Akan tetapi, pengeluaran warga Indonesia di luar negeri juga tercatat meningkat lebih cepat, salah satunya disebabkan adanya periode musim haji.

Sementara itu, defisit pendapatan primer naik dari US\$9,1 miliar menjadi US\$9,7 miliar, terutama akibat meningkatnya pembayaran imbal hasil investasi kepada investor asing.

Pembayaran ini meningkat dari US\$6,3 miliar jadi US\$6,5 miliar. Sedangkan pembayaran imbal hasil investasi portofolio naik dari US\$3,4 miliar menjadi US\$4,1 miliar.

Ini sebenarnya konsekuensi yang tak terhindarkan jika investasi asing di dalam negeri semakin besar. Modal yang masuk hari ini tentu kewajiban pembayaran di masa yang akan datang.

### **Tertopang 'Uang Panas'**

Hal ini terlihat dari data transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus US\$11,95 miliar berbalik drastis dari defisit US\$4,77 miliar pada kuartal sebelumnya. Investasi langsung juga memberi kontribusi positif.

Pembalikan ini didukung oleh surplus investasi langsung yang terjaga, serta peningkatan tajam surplus investasi portofolio, serta penyempitan defisit investasi lainnya.

Surplus investasi juga naik dari US\$2,3 miliar menjadi US\$2,8 miliar. Sementara arus masuk penanaman modal asing naik jadi US\$4,9 miliar dari US\$3,8 miliar.

Peningkatan surplus investasi portofolio atau hot money terutama didorong oleh derasnya arus masuk asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan kembalinya arus masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), juga adanya dukungan dari penerbitan obligasi global.

"Dalam jangka menengah hingga panjang, keberlanjutan arus modal akan bergantung pada efektivitas implementasi reformasi struktural untuk memperkuat fundamental makroekonomi Indonesia, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperbaiki iklim investasi," sebut Faisal Rachman, Ekonom PT Bank Permata (BNLI), dalam catatannya.

Ia menambahkan, faktor eksternal, termasuk perkembangan ketegangan perdagangan global dan risiko geopolitik, juga akan tetap menjadi faktor utama yang menentukan dinamika arus modal.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, Faisal memperkirakan arus masuk portofolio diperkirakan tetap moderat, sementara rupiah berpotensi melanjutkan volatilitasnya.

"Bank Indonesia kemungkinan masih perlu menggunakan cadangan devisa untuk mendukung stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek hingga menengah," katanya.

Ia memperkirakan, cadangan devisa turun menjadi US\$143 miliar hingga US\$147 miliar pada akhir 2026, dari posisi US\$156,47 miliar pada akhir 2025.

## **Yuan China Dekati Level Tertinggi 3,5 Tahun, Naik 8 Pekan Beruntun**

Jumat, 21 Agustus 2026 11:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-china-dekati-level-tertinggi-35-tahun-naik-8-pekan-beruntun>

KONTAN.CO.ID - Yuan China bergerak di dekat level tertinggi dalam 3,5 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (21/82026).

Mata uang China tersebut berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan kedelapan berturut-turut, didukung pelemahan dolar AS.

Investor kini mengalihkan perhatian ke simposium Jackson Hole pekan depan untuk mencari sinyal kebijakan terbaru dari Federal Reserve (The Fed) yang berpotensi memengaruhi pasar valuta asing.

Mengutip Reuters, yuan onshore bergerak dalam rentang terbatas pada perdagangan pagi dan terakhir menguat 0,06% menjadi 6,7221 yuan per dolar AS pada pukul 03.29 GMT.

Posisi tersebut tidak jauh dari level 6,7203 yuan per dolar AS yang dicapai sehari sebelumnya. Level tersebut merupakan posisi terkuat yuan sejak Februari 2023.

Jika yuan mengakhiri sesi perdagangan malam di sekitar level pertengahan hari, mata uang tersebut akan mencatat penguatan sekitar 0,3% sepanjang pekan, sekaligus membukukan kenaikan mingguan kedelapan secara beruntun.

Sementara itu, yuan offshore terakhir diperdagangkan di level 6,7224 per dolar AS, menguat sekitar 0,05% dalam perdagangan Asia.

### **Kebijakan PBOC Jadi Perhatian**

Sebelum pasar dibuka, People's Bank of China (PBOC) menetapkan nilai tengah yuan di 6,7817 per dolar AS. Level tersebut 555 pip lebih lemah dibandingkan estimasi Reuters sebesar 6,7262.

Yuan onshore diperbolehkan bergerak dalam kisaran 2% di atas atau di bawah nilai tengah yang ditetapkan PBOC setiap hari.

Sejak November 2025, bank sentral China secara konsisten menetapkan nilai tengah yuan lebih lemah dari perkiraan pasar.

Pelaku pasar secara luas menilai kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menahan penguatan yuan yang berlebihan sekaligus menjaga stabilitas pasar.

"Hal ini konsisten dengan preferensi terhadap apresiasi yang bertahap, bukan penguatan satu arah," kata Christopher Wong, FX strategist OCBC Bank.

Menurut Wong, dinamika dolar AS yang lebih lemah serta konversi pendapatan eksportir masih akan mendukung yuan.

Namun, pola penetapan nilai tengah oleh PBOC menunjukkan pembuat kebijakan kemungkinan tidak akan membiarkan yuan menguat terlalu cepat.

"Dalam jangka pendek, kami masih melihat ruang bagi yuan untuk menguat, meskipun dengan laju yang terukur," ujarnya.

### **Pasar Tunggu Sinyal The Fed**

Pelemahan dolar AS turut menjadi katalis bagi penguatan yuan. Dolar AS berada di jalur untuk mencatat penurunan mingguan setelah investor menilai rencana pembelian kembali obligasi Treasury oleh Departemen Keuangan AS hanya menjadi solusi sementara.

Langkah tersebut juga memicu kekhawatiran baru mengenai pendekatan pemerintah AS yang semakin aktif dalam mengintervensi pasar.

Pelaku pasar kini menunggu pidato Ketua The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole pekan depan.

Pidato tersebut akan menjadi perhatian investor untuk mendapatkan petunjuk mengenai bagaimana The Fed akan menangani inflasi AS yang masih berada pada level tinggi.

Sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga AS berpotensi memengaruhi pergerakan dolar dan menentukan apakah penguatan yuan dapat berlanjut dalam beberapa pekan mendatang.

## **China Siapkan Dukungan Fiskal Tambahan untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi**

Jumat, 21 Agustus 2026 10:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-siapkan-dukungan-fiskal-tambahan-untuk-menopang-pertumbuhan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - China akan menyiapkan kebijakan fiskal tambahan secara tepat waktu untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah momentum perekonomian yang mulai melemah.

Mengutip Reuters, Jumat (21/8/2026), Wakil Menteri Keuangan China Liao Min mengatakan pemerintah akan merespons perkembangan ekonomi dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan fiskal tambahan sesuai kebutuhan.

China juga akan mempertahankan kesinambungan dan stabilitas kebijakan makroekonomi. Pemerintah akan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya fiskal dalam jangka waktu yang lebih panjang.

"Pengeluaran fiskal harus lebih dioptimalkan, dengan fokus lebih besar pada investasi pada masyarakat dan peningkatan konsumsi domestik," kata Liao dalam konferensi pers.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika perekonomian China mulai kehilangan momentum pertumbuhan.

## **Fokus Konsumsi Domestik**

Para pemimpin China dalam pertemuan Politbiro pada Juli lalu telah berjanji mendukung perekonomian yang melambat dengan mempercepat pengeluaran fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk dalam anggaran.

Pemerintah memilih mempercepat proyek yang sudah dianggarkan hingga akhir tahun, ketimbang menyiapkan stimulus besar yang baru.

Langkah tersebut menunjukkan fokus pemerintah China untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan tanpa melakukan stimulus agresif yang berpotensi meningkatkan risiko fiskal.

Di sisi moneter, bank sentral China pada awal bulan ini mengatakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang "cukup longgar" dan menerapkan langkah-langkah yang praktis serta efektif sesuai kebutuhan.

Namun, bank sentral belum memberikan sinyal mengenai kemungkinan penurunan suku bunga kebijakan maupun rasio giro wajib minimum perbankan.

## **Reformasi Fiskal**

Liao juga mengatakan pemerintah China akan memperdalam reformasi fiskal dan perpajakan serta meningkatkan sistem pengelolaan anggaran.

Pemerintah juga akan membangun kerangka hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih jelas, dengan pembagian tanggung jawab yang lebih tegas serta pembangunan regional yang lebih seimbang.

China juga menegaskan pencegahan akumulasi utang tersembunyi baru oleh pemerintah daerah secara ilegal harus tetap menjadi "disiplin yang tidak boleh dilanggar".

Menurut Liao, risiko fiskal di sejumlah wilayah penting juga harus dikurangi secara bertahap.

Kebijakan tersebut mencerminkan upaya Beijing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan risiko utang dan fiskal yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama perekonomian China.

## **Inflasi Inti Jepang Naik pada Juli, Perkuat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga**

Jumat, 21 Agustus 2026 08:42 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-inti-jepang-naik-pada-juli-perkuat-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen inti Jepang meningkat pada Juli 2026 dibandingkan setahun sebelumnya.

Kondisi ini memperkuat alasan bagi Bank of Japan (BOJ) untuk kembali menaikkan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter mendatang.

Mengutip Reuters, Jumat (21/8/2026), indeks harga konsumen (CPI) inti Jepang, yang mencakup komponen energi tetapi tidak memasukkan harga makanan segar yang bergejolak, naik 1,8% secara tahunan pada Juli.

Kenaikan tersebut sesuai dengan perkiraan median ekonom dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,6% pada Juni.

Meski demikian, inflasi inti Jepang masih berada di bawah target BOJ sebesar 2% selama tujuh bulan berturut-turut.

Salah satu faktor yang menahan inflasi adalah subsidi pemerintah yang ditujukan untuk menekan biaya bahan bakar.

Data inflasi ini akan menjadi salah satu pertimbangan utama BOJ dalam pertemuan kebijakan pada 17-18 September 2026.

Pasar secara luas memperkirakan bank sentral Jepang akan menaikkan suku bunga menjadi 1,25% dari saat ini 1%.

### **Tekanan Inflasi Diperkirakan Meningkat**

Para ekonom memperkirakan inflasi inti Jepang akan kembali meningkat di atas target BOJ dalam beberapa bulan mendatang.

Salah satu pendorongnya adalah semakin luasnya pengalihan kenaikan biaya bahan baku kepada konsumen.

Kenaikan biaya bahan baku sebelumnya telah mendorong lonjakan inflasi di tingkat grosir.

"Inflasi konsumen inti kemungkinan akan kembali meningkat seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, yang akan mendorong harga minyak mentah lebih tinggi dan menambah tekanan harga akibat pelemahan yen," kata Masato Koike, ekonom senior Sampo Institute Plus.

Koike juga memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga pada September.

Indeks inflasi yang tidak memasukkan harga makanan segar dan bahan bakar, yang menjadi salah satu indikator yang lebih diperhatikan BOJ untuk mengukur tekanan inflasi mendasar, naik 1,9% secara tahunan pada Juli, setelah tumbuh 1,7% pada Juni.

### **Inflasi Jasa Mulai Menguat**

Inflasi sektor jasa Jepang juga menunjukkan peningkatan. Harga jasa naik 1,2% pada Juli secara tahunan, dibandingkan kenaikan 1,1% pada Juni.

Kenaikan tersebut menjadi indikasi bahwa perusahaan mulai meneruskan peningkatan biaya tenaga kerja kepada konsumen di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang ketat.

Meski demikian, inflasi barang masih jauh lebih tinggi, yakni mencapai 2,7% secara tahunan pada Juli.

BOJ sebelumnya telah menaikkan suku bunga ke 1% pada Juni, level tertinggi dalam 31 tahun.

Namun, bank sentral mempertahankan kebijakan moneternya pada Juli sekaligus memberikan peringatan terkuat sejauh ini mengenai meningkatnya risiko inflasi.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa BOJ berpotensi menaikkan suku bunga paling cepat pada September. Bank sentral juga disebut mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang lebih agresif setelahnya, dari frekuensi saat ini sekitar dua kali dalam setahun.

## **BI Lapor Uang Beredar Juli Naik Jadi Rp10.371,1 Triliun**

Jumat, 21 Agustus 2026 15:37 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119145/bi-lapor-uang-beredar-juli-naik-jadi-rp10-371-1-triliun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan data uang beredar dalam arti luas atau M2 periode Juli. Terjadi pertumbuhan, tetapi sedikit melambat.

Pada Jumat (21/8/2026), BI melaporkan M2 per Juli ada di posisi Rp 10.371,1 triliun. Naik 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Meski masih tumbuh cukup tinggi, tetapi sejatinya terjadi perlambatan karena pada Juni kenaikannya adalah 8,7% yoy.

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 10,0% yoy dan uang kuasi sebesar 5,6% yoy," tulis laporan BI.

Adapun kredit perbankan tercatat tumbuh 13% yoy pada Juli. Lebih tinggi ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 12,1% yoy.

"Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 4,6% yoy, melanjutkan pertumbuhan sebesar 10,1% yoy pada Juni," sebut laporan BI.

## **Rupiah Ditutup Menguat Bersama Mata Uang Asia**

Jumat, 21 Agustus 2026 15:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119141/rupiah-ditutup-menguat-bersama-mata-uang-asia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pekan ini dengan penguatan yang cukup solid 0,3% ke posisi Rp17.693/US\$, seiring terpankasnya harga minyak mentah jenis Brent 0,17% ke US\$93,62/barel.

Terpankasnya Brent membuat mayoritas mata uang Asia menguat sore ini. Won Korea Selatan menguat paling tajam 0,72%, disusul baht Thailand 0,4%, rupiah 0,3%, dan dolar Taiwan 0,25%, serta dolar Singapura 0,2%.

Sementara yuan offshore relatif stabil dengan penguatan terbatas 0,09% bersama yuan China dan dolar Hong Kong.

Apresiasi terhadap rupiah terjadi bersamaan dengan penguatan yang terjadi pasar surat utang. Yield surat utang turun secara luas, hampir di semua tenor.

Melansir data Bloomberg pada 15.05 WIB, yield tenor 1 tahun 6,7 basis poin (bps) ke 6,69%, menandai posisi yield terendahnya sejak Juni 2026. Bahkan, tenor 2 tahun turun tajam 12,2 bps ke 6,64%. Begitu juga tenor acuan 10 tahun turun 6,9 bps ke 6,95%, mencapai posisi terendahnya dalam dua bulan terakhir.

Pergerakan yield di pasar surat utang hari ini mengindikasikan bahwa premi risiko Indonesia sedang terpankaskan, didukung oleh keputusan BI untuk mempertahankan BI Rate di 5,75%, serta berlanjutnya stabilitas rupiah.

Hal ini sejalan dengan Credit Default Swap (CDS) INDON 5 tahun Indonesia yang kembali turun ke 84,99, posisi terendahnya sejak Mei. CDS selama ini menjadi salah satu barometer persepsi investor global terhadap risiko gagal bayar (default risk) suatu negara.

Dengan terpankaskannya CDS pada Agustus dari level tertingginya tahun ini yang mencapai 105,9 pada Maret lalu menandakan investor mulai memangkas premi risiko untuk memegang aset-aset Indonesia.

Dari kawasan, penguatan mata uang Asia tertopang oleh lesunya indeks dolar Amerika Serikat (AS) yang terpankaskan 0,15% ke 98,75.

Sepanjang pekan ini, won Korea Selatan menguat 2,41%, disusul baht Thailand 1,38%, ringgit Malaysia 1,05%, rupiah 0,75%, dolar Singapura 0,7%, dolar Taiwan 0,55%, yuan offshore 0,38%, yuan China 0,33%, dan yen Jepang 0,33%.

Sementara dolar Hong Kong lebih terbatas dengan menguat 0,09%. Sebaliknya, peso Filipina melemah 0,35%, disusul rupee India 0,33%.

## **Bidik Pertumbuhan 6% Purbaya Akan Evaluasi Perdagangan Bebas**

Jumat, 21 Agustus 2026 12:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119093/bidik-pertumbuhan-6-purbaya-akan-evaluasi-perdagangan-bebas/2>

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) turut memengaruhi kinerja perekonomian dan perkembangan industrialisasi Indonesia sehingga perlu dilakukan evaluasi.

Iapun juga berencana melakukan analisis mendalam terhadap sektor industri yang terdampak perdagangan bebas dan melakukan pemetaan strategi yang jelas, terutama terhadap industri yang masih memiliki potensi pertumbuhan.

“Analisis yang masih bisa diselamatkan, untuk dua pilihan terakhir langkah kita apa, Kemenkeu bisa apa, itu yang saya butuhkan,” kata Purbaya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (21/8/2026).

Bendahara negara bilang, mulai September mendatang pendekatan Kementerian Keuangan akan diarahkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi, termasuk peluang yang muncul dari perjanjian perdagangan bebas.

“Jadi bulan September ke depan kita rubah approach Kemenkeu dari potensi ekonomi termasuk free trade agar pertumbuhan ekonomi bisa laju kencang minimal di 6% di akhir 2026,” katanya.

Menurut Purbaya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam mempelajari dampak liberalisasi perdagangan. Saat berbagai skema perdagangan bebas mulai berkembang, pemerintah seharusnya dapat memetakan sektor industri yang berpotensi melemah ketika pasar dibuka.

Purbaya membeberkan tiga pilihan terhadap industri yang terdampak perdagangan bebas. Pertama, membiarkan industri tersebut mati. Kedua, membiarkannya bertahan secara perlahan tanpa intervensi besar. Ketiga, memberikan perlindungan dan dukungan agar industri tersebut kembali tumbuh.

Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan pemetaan berdasarkan dampak nyata terhadap masing-masing industri. Industri yang benar-benar tidak memiliki prospek perlu diidentifikasi, sementara sektor yang masih bisa diselamatkan harus mendapatkan strategi yang tepat.

Ia juga menekankan adanya kategori keempat, yakni industri baru yang saat ini belum menjadi kekuatan utama Indonesia tetapi memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Salah satu contoh yang ia soroti adalah data center.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi pusat data, tetapi pemerintah harus memastikan ketersediaan energi untuk mendukung perkembangan industri tersebut.

Selain itu, ia juga melihat peluang dari kerja sama perdagangan Indonesia dengan Eropa, khususnya terkait produk yang menggunakan energi baru terbarukan. Menurutnya, fasilitas perdagangan tersebut dapat menjadi peluang bagi industri Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan alas kaki yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari penggunaan energi terbarukan dalam proses produksinya. Menkeu bahkan membuka kemungkinan memperkuat investasi energi panas bumi melalui PT Geo Dipa Energi untuk mendukung kawasan industri.

“Saya kan punya Geo Dipa, saya bisa drill lebih banyak geotermal, saya invest di situ untuk memberi energi ke suatu pusat industri tekstil atau industri tekstil yang sudah ada, sehingga dia bisa ekspor ke Eropa dengan lebih kompetitif,” katanya.

## **Kuartal II, Neraca Pembayaran & Current Account RI Masih Defisit**

Jumat, 21 Agustus 2026 10:56 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119089/kuartal-ii-neraca-pembayaran-current-account-ri-masih-defisit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) periode kuartal II-2026. NPI masih mengalami defisit, demikian pula transaksi berjalan (current account).

Pada Jumat (21/8/2026), BI mengumumkan NPI tercatat defisit US\$ 0,9 miliar pada kuartal II-2026. Jauh lebih sedikit ketimbang kuartal sebelumnya yang minus US\$ 9.1 miliar.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa NPI sudah berada di zona negatif selama tiga kuartal berturut-turut.

Berdasarkan komponen pembentuknya, transaksi berjalan tercatat defisit US\$ 12,5 miliar atau 3,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh melebar ketimbang defisit kuartal sebelumnya yakni US\$ 3,6 miliar (1% PDB).

"Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan non-migas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia.

"Surplus neraca perdagangan non-migas juga tercatat lebih rendah dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas untuk kebutuhan kegiatan ekonomi dalam negeri yang masih tinggi. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat sejalan dengan pembayaran pendapatan primer sedangkan surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan capaian pada triwulan I 2026," papar laporan BI.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus ditopang oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio. Transaksi modal dan finansial surplus US\$ 12 miliar setelah kuartal I-2026 defisit US\$ 4,8 miliar.

"Investasi langsung mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. Investasi portofolio juga mencatat surplus yang meningkat seiring kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah," jelas laporan BI.

Ke depan, BI menilai defisit transaksi berjalan bisa lebih rendah didukung perbaikan prospek ekspor sejalan kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, dan dampak positif penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap surplus ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif.

## **ULN BI Melonjak 72%, Ketergantungan pada Dana Asing Makin Perlu Diwaspadai**

Jumat, 21 Agustus 2026 11:09 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/uln-bi-melonjak-72-ketergantungan-pada-dana-asing-makin-perlu-diwaspadai>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Bank Indonesia (BI) melonjak tajam hingga pertengahan 2026.

Kenaikan ini menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan penurunan cadangan devisa, meski sebagian besar ULN tersebut berfungsi sebagai penyangga untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Berdasarkan laporan BI, posisi ULN bank sentral pada akhir Juni 2026 mencapai US\$ 42,46 miliar. Angka ini melonjak 72,11% dibandingkan posisi akhir 2025 yang sebesar US\$ 24,67 miliar.

Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juni 2025, ULN BI hanya meningkat sekitar 2,5%, dari US\$ 27,60 miliar pada akhir 2024 menjadi US\$ 28,29 miliar.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai kenaikan ULN BI berperan sebagai shock absorber untuk menahan tekanan terhadap rupiah sekaligus membatasi penurunan cadangan devisa.

"Tanpa kenaikan tersebut, tekanan terhadap rupiah ataupun cadangan devisa kemungkinan lebih besar," ujar Faiz, Kamis (20/8/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, dari total ULN BI sebesar US\$ 42,46 miliar, sekitar US\$ 16,38 miliar berbentuk surat utang, US\$ 17,35 miliar berupa kas dan simpanan milik bukan penduduk, serta US\$ 8,73 miliar merupakan alokasi Hak Penarikan Khusus atau Special Drawing Rights (SDR) dari International Monetary Fund (IMF).

Menurut Josua, komposisi tersebut menunjukkan lonjakan ULN BI terutama berkaitan dengan operasi moneter dan arus dana asing ke instrumen BI.

Masuknya dana asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), misalnya, memberikan tambahan likuiditas sekaligus membantu meredam tekanan terhadap rupiah. Namun, arus dana tersebut tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa dengan nilai yang sama.

Pasalnya, BI juga harus menyediakan valuta asing untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran ULN pemerintah, transaksi eksternal, hingga intervensi di pasar valas untuk menjaga stabilitas rupiah.

Dengan demikian, kenaikan ULN BI tidak otomatis berarti cadangan devisa ikut meningkat. Bahkan, kondisi ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan stabilitas eksternal pada arus dana asing.

Risiko tersebut semakin perlu dicermati karena 79,4% ULN BI pada Juni 2026 merupakan kewajiban jangka pendek. Dalam kondisi pasar normal, dana tersebut dapat membantu menjaga stabilitas rupiah. Namun, situasinya bisa berubah ketika sentimen global memburuk.

"Jika sentimen global berubah dan investor asing menarik dananya secara bersamaan, tekanan dapat muncul dari dua sisi, yakni pelemahan rupiah dan naiknya kebutuhan cadangan devisa," kata Josua.

Karena itu, penguatan penyangga eksternal tidak cukup hanya mengandalkan arus modal jangka pendek. Indonesia perlu memperbesar sumber devisa yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan ekspor, investasi langsung, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, serta perbaikan neraca transaksi berjalan.

Dengan strategi tersebut, kebutuhan stabilisasi rupiah dan cadangan devisa diharapkan tidak terlalu bergantung pada dana asing yang sewaktu-waktu dapat keluar dari pasar.

## **Belanja Pemerintah 2027 Cetak Rekor, Tapi Ruang untuk Dorong Ekonomi Menyusut**

Jumat, 21 Agustus 2026 10:50 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pemerintah-2027-cetak-rekor-tapi-ruang-untuk-dorong-ekonomi-menyusut>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2027 memang mencetak rekor secara nominal. Namun, di balik kenaikan tersebut, ruang anggaran untuk belanja yang dapat langsung mendorong kapasitas ekonomi justru semakin terbatas.

Dalam RAPBN 2027, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 3.362,2 triliun, sekitar 82% dari total belanja negara yang mencapai Rp 4.097,2 triliun. Angka itu tumbuh 3,63% dibandingkan outlook 2026.

Kenaikan belanja tersebut terutama ditopang sejumlah pos rutin dan kewajiban pemerintah. Belanja pegawai, misalnya, dialokasikan Rp 625,24 triliun atau tumbuh 7,85% dibandingkan outlook 2026.

Sementara itu, pembayaran bunga utang mencapai Rp 650,31 triliun, naik 12%.

Belanja subsidi juga meningkat 1,69% menjadi Rp 387,88 triliun.

Sebaliknya, sejumlah pos yang berperan dalam menambah kapasitas ekonomi justru mengalami penurunan. Belanja barang hanya dialokasikan Rp 681,13 triliun, turun 6,8% dari outlook 2026.

Penurunan lebih dalam terjadi pada belanja modal. Anggarannya ditetapkan Rp 295,22 triliun, anjlok 19,65% dibandingkan outlook tahun ini. Belanja sosial juga turun 6% menjadi Rp 156,48 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah tetap merancang APBN 2027 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur dan terarah untuk mendorong ekonomi lebih tinggi dan akselerasi lebih cepat," kata Ferry, Rabu (19/8).

Namun, komposisi belanja tersebut menjadi perhatian ekonom. Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menyoroti pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp 650 triliun pada 2027. Nilai tersebut setara hampir 16% dari total belanja negara.

Menurut dia, meningkatnya porsi belanja rutin dan kewajiban pemerintah, bersamaan dengan menyempitnya ruang belanja modal, membuat kemampuan APBN dalam meningkatkan kapasitas produktif ekonomi menjadi lebih terbatas.

Kondisi itu terutama terlihat dari semakin kecilnya ruang untuk pembangunan infrastruktur, konektivitas maupun investasi publik yang dapat memberikan dampak terhadap kapasitas ekonomi dalam jangka panjang.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede juga menilai penurunan belanja modal perlu menjadi perhatian. Sebab, belanja modal memiliki peran langsung dalam menambah kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, sarana pendidikan dan kesehatan, hingga fasilitas produksi.

Menurut Josua, komposisi anggaran tersebut masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka menengah, Indonesia tetap membutuhkan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kualitas belanja menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Josua memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya tumbuh sekitar 5,22%, dengan konsumsi rumah tangga sebesar 5,09% dan investasi 6,03%.

"Mencapai pertumbuhan mendekati 6% dengan defisit yang justru dipersempit membutuhkan kualitas belanja untuk setiap rupiah yang jauh lebih tinggi," jelas Josua.

# Dolar AS Loyo, Mata Uang Emerging Market Cetak Rekor Tertinggi

Jumat, 21 Agustus 2026 18:46 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-loyo-mata-uang-emerging-market-cetak-rekor-tertinggi>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Mata uang pasar berkembang (emerging markets) naik ke rekor tertinggi baru pada Jumat (21/8/2026) dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan kedelapan berturut-turut.

Investor mengabaikan tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) dan kenaikan harga minyak. Sementara dolar tetap berada di dekat level terendah dalam beberapa bulan.

Indeks mata uang pasar berkembang MSCI naik 0,3% pada Jumat (21/8/2026), melanjutkan tren rekor tertinggi sepanjang masa di bulan ini karena pelemahan dolar AS secara luas terus mendukung aset-aset yang sensitif terhadap risiko.

Imbal hasil US Treasury kembali naik setelah intervensi tak terduga oleh Departemen Keuangan pada Rabu lalu, hanya memberikan jeda singkat dari tekanan jual.

Kenaikan ini terjadi meskipun Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pemerintah AS dapat meningkatkan pembelian kembali (buyback) US Treasury dan memunculkan kemungkinan konsolidasi fiskal.

Dolar diperkirakan akan mencatat penurunan mingguan di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan utang AS dan ketidakpastian kebijakan dapat menggerus daya beli mata uang tersebut.

"Anda bisa melakukan pembelian kembali sementara ini untuk menstabilkan situasi di pasar obligasi. Namun, menurut saya, cepat atau lambat faktor fundamental akan kembali berperan," kata Juan Orts, ekonom wilayah CEEMEA di Societe Generale seperti dikutip Reuters.

"Saya tidak melihat pasar akan mulai menjual dolar hanya karena hal ini. Dolar seharusnya tetap kuat dalam beberapa bulan mendatang," imbuhnya.

Harga minyak naik ke level tertinggi dalam satu bulan karena kebuntuan diplomatik di kawasan Teluk membuat risiko inflasi tetap menjadi sorotan. Meski demikian, aset-aset pasar berkembang sebagian besar tidak terpengaruh oleh kekhawatiran tersebut, dengan indeks saham pasar berkembang MSCI naik 1,2%.

Di Asia, indeks KOSPI Korea Selatan dan saham-saham Taiwan bergerak naik tipis, meskipun keduanya tetap mencatatkan penurunan mingguan hampir 1%.

Won Korea Selatan menguat 0,9% ke level tertinggi dalam 11 bulan dan diperkirakan mencatat kenaikan mingguan lebih dari 2%. Sementara dolar Taiwan naik 0,7%.

Yuan Tiongkok bergerak di dekat level tertinggi dalam 3,5 tahun. Indeks Shanghai Composite tidak banyak berubah, sedangkan indeks saham unggulan (blue-chip) CSI 300 naik 0,6%.

Di kawasan Eropa negara berkembang, mata uang koruna Ceko turun 0,4% terhadap euro, sementara saham-saham Ceko naik 0,4%. Kementerian Keuangan negara tersebut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya pada hari Kamis. Lalu, Zloty Polandia melemah 0,1%, sedangkan pasar saham naik 0,9%.

Di tempat lain, saham-saham Turki naik 0,9% dan mata uang lira menguat 2% setelah tingkat kepercayaan bisnis di kalangan manufaktur meningkat menjadi 102,8 poin pada bulan Agustus. Angka di atas 100 menunjukkan optimisme.

Rand Afrika Selatan menguat 0,7% seiring kenaikan tipis harga emas, dan mata uang ini tetap berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan ketiga berturut-turut.

Para investor akan menantikan simposium Jackson Hole pekan depan, di mana pernyataan dari Ketua Federal Reserve dapat memberikan petunjuk baru mengenai prospek suku bunga AS.

## **Defisit Neraca Transaksi Berjalan Diprediksi Melebar Tembus 3% PDB di Akhir 2026**

Jumat, 21 Agustus 2026 13:26 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-neraca-transaksi-berjalan-diprediksi-melebar-tembus-3-pdb-di-akhir-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) diperkirakan melebar pada akhir tahun 2026.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman memperkirakan, defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 2,5%–3,0% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2026, dari 0,11% dari PDB pada tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US\$ 12,5 miliar atau 3,3% dari PDB, melebar dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US\$ 3,6 miliar 1,0% dari PDB.

“Kami memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar pada tahun 2026, didorong oleh impor yang lebih kuat di bawah agenda pro-pertumbuhan pemerintah dan ekspor yang lebih lemah di tengah permintaan global yang lebih lemah dan ketegangan geopolitik dan perdagangan yang terus berlanjut,” tutur Faisal dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Ia menilai, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dapat membebani neraca pembayaran, terutama karena arus aset tetap berada di bawah tekanan di tengah ketidakpastian global yang tinggi yang memicu sentimen penghindaran risiko.

Sementara itu, Faisal menyebut Ppada neraca transaksi berjalan, ia melihat risiko penurunan pada neraca barang Indonesia, terutama didorong oleh agenda kebijakan berorientasi pertumbuhan pemerintah, yang diharapkan dapat mempertahankan permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan impor yang lebih kuat.

Pada saat yang sama, permintaan global yang lebih lemah, terutama dari Tiongkok, bersamaan dengan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah dan perang dagang global yang sedang berlangsung, dapat membebani kinerja ekspor.

Perkembangan ini juga dapat mengganggu rantai pasokan global, yang selanjutnya membatasi pertumbuhan ekspor.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan menilai implikasinya terhadap posisi eksternal Indonesia,” jelasnya.

Dari sisi keuangan, Faisal menilai arus portofolio diperkirakan akan tetap rentan terhadap ketidakpastian global dan domestik, meskipun ada beberapa peningkatan sentimen investor setelah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mempertahankan klasifikasi pasar negara berkembang Indonesia dan pemeliharaan prospek stabil oleh S&P.

Secara global, ketidakpastian seputar perkembangan geopolitik di Timur Tengah terus mengaburkan prospek jalur kebijakan Fed, karena harga energi yang tinggi dapat membuat inflasi AS tetap di atas target 2% untuk jangka waktu yang lama.

“Hal ini dapat memperkuat sentimen penghindaran risiko dan membatasi arus masuk modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” ungkapnya.

Di dalam negeri, Faisal melihat kekhawatiran atas defisit ganda Indonesia juga meningkat, mencerminkan risiko defisit neraca transaksi berjalan yang lebih lebar dan defisit fiskal yang lebih besar di bawah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan.

## **IMF: Utang Pemerintah Meningkat, Beban Pajak Pekerja Ikut Naik**

Jumat, 21 Agustus 2026 12:05 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/imf-utang-pemerintah-meningkat-beban-pajak-pekerja-ikut-naik>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Beban utang pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara membayar bunga dan pokok utang.

Dalam working paper yang diunggah International Monetary Fund (IMF), menunjukkan bahwa peningkatan utang publik juga dapat berdampak terhadap distribusi beban pajak, terutama bagi pekerja.

Studi berjudul Public Debt, Wealth Inequality, and the Burden of Taxation menemukan bahwa beban pajak yang timbul dari utang publik cenderung jatuh secara tidak proporsional kepada penerima upah.

Beban tersebut semakin besar ketika rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat.

Dalam kajian terhadap negara-negara maju selama periode 1950–2019, pendapatan tenaga kerja menyumbang sekitar 60% dari penerimaan pajak dan proporsinya relatif stabil pada berbagai tingkat utang. Namun, distribusi beban pembayaran utang menunjukkan pola berbeda.

Pekerja menanggung porsi beban yang semakin besar seiring meningkatnya rasio utang pemerintah. Hal itu tercermin dari kenaikan tarif pajak efektif atas tenaga kerja.

"Tingkat utang yang tinggi juga berkaitan dengan beban pajak yang lebih tinggi," dikutip dari laporan tersebut, Jumat (21/8/2026).

Ketika rasio utang pemerintah berada di bawah 40% PDB, tarif pajak efektif tenaga kerja rata-rata tercatat sebesar 26,8%. Angka tersebut meningkat menjadi 32,5% ketika rasio utang berada pada kisaran 40%–70% PDB.

Selanjutnya, tarif pajak efektif tenaga kerja mencapai 33,4% pada kelompok negara dengan rasio utang 70%–100% PDB. Sementara itu, ketika rasio utang pemerintah telah melebihi 100% PDB, tarif pajak efektif tenaga kerja meningkat menjadi 37,7%.

"Kondisi ini menjadi mekanisme yang mendasari semakin besarnya porsi beban pembayaran utang yang ditanggung tenaga kerja," katanya.

Studi tersebut menjelaskan, pemerintah dengan tingkat utang yang tinggi perlu mengalokasikan porsi penerimaan yang semakin besar untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Salah satu konsekuensinya adalah kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan melalui perpajakan.

"Pemerintah dalam kondisi utang tinggi harus mengalokasikan porsi penerimaan yang semakin besar untuk membayar kewajiban yang ada atau meningkatkan pajak," tulis laporan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, pekerja berpotensi menjadi salah satu kelompok yang menanggung beban pajak lebih besar. Kenaikan beban pajak tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima tenaga kerja.

## **BI Catat Transaksi Modal dan Finansial Surplus US\$ 12 Miliar pada Kuartal II 2026**

Jumat, 21 Agustus 2026 11:53 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-catat-transaksi-modal-dan-finansial-surplus-us-12-miliar-pada-kuartal-ii-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar US\$ 12,0 miliar pada kuartal II 2026, setelah pada kuartal I 2026 mengalami defisit sebesar US\$ 4,8 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, transaksi modal dan finansial mencatat surplus didukung oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga dapat menopang Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga.

Selain itu surplus pada transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio di tengah ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang meningkat.

“Investasi langsung mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada kuartal sebelumnya,” tutur Denny dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Adapun surplus investasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik.

Investasi portofolio juga mencatat surplus yang meningkat seiring kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah.

# Neraca Pembayaran Indonesia Mencatatkan Defisit US\$ 900 Juta pada Kuartal II 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 11:03 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/neraca-pembayaran-indonesia-mencatatkan-defisit-us-900-juta-pada-kuartal-ii-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II 2026 mencatat defisit US\$ 0,9 miliar atau US\$ 900 juta, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal I 2026 sebesar US\$ 9,1 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas.

“Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus ditopang oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga mendukung kinerja NPI yang tetap terjaga,” tutur Denny dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar US\$ 145,6 miliar, yang setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Denny menjelaskan, transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diperkirakan temporer. Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas juga tercatat lebih rendah dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas untuk kebutuhan kegiatan ekonomi dalam negeri yang masih tinggi.

Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat sejalan dengan pembayaran pendapatan primer sedangkan surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan capaian pada triwulan I 2026.

“Dengan kondisi tersebut, defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US\$ 12,5 miliar (3,3% dari PDB), melebar dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US\$ 3,6 miliar (1,0% dari PDB),” jelasnya.

Selanjutnya, transaksi modal dan finansial mencatat surplus didukung oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga dapat menopang NPI.

Denny membeberkan, investasi langsung mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada kuartal sebelumnya dipengaruhi oleh terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. Investasi portofolio juga mencatat surplus yang meningkat seiring kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik.

Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar US\$ 12,0 miliar pada kuartal II 2026, setelah pada kuartal I 2026 mengalami defisit sebesar US\$ 4,8 miliar.

Ke depan, Denny memperkirakan prospek NPI tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih rendah didukung perbaikan prospek ekspor sejalan

kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, dan dampak positif penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap surplus ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif.

“Selain itu, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat untuk menopang kinerja NPI 2026 di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” tandasnya.

## **Produk Berbahan Limbah Raup Omzet Puluhan Juta, Nawal Yasin Bangga UMKM Jateng Kian Mendunia**

Jumat, 21 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/produk-berbahan-limbah-raup-omzet-puluhan-juta-nawal-yasin-bangga-umkm-jateng-kian-mendunia/>

SEMARANG – Beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kerajinan unggulan Jawa Tengah dipamerkan dalam Pameran UMKM, dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (20/8/2026).

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jateng, Nawal Arafah Yasin, dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengunjungi pameran dan meninjau sejumlah stan. Salah satu yang menarik perhatian ialah stan Dekranasda Kabupaten Semarang, yang memanfaatkan limbah sebagai bahan baku.

Beragam produk ditawarkan oleh UMKM Tanganku, mulai dari batik ecoprint, tas dan souvenir, aksesoris, hingga alas kaki. Menariknya, sebagian produk tersebut menggunakan plastik dan berbagai limbah yang sudah tidak digunakan sebagai bahan baku.

Produk berbahan limbah itu tidak hanya memiliki nilai kreativitas, tetapi juga telah dipasarkan ke sejumlah negara. Bahkan, penjualan souvenir Tanganku pada periode ramai wisatawan di Bali dapat menghasilkan omzet lebih dari 1.500 dolar AS atau sekitar Rp26,7 juta.

“Tadi Pak Wagub dan Ibu membeli tas, souvenir, itu semua sudah ekspor. Kalau souvenir ini Australia, Jepang, Taiwan, China, Samoa, Amerika, sama Singapura,” kata pemilik sekaligus desainer Tanganku, Kokos Trisada.

Dia menjelaskan, bahan baku produk Tanganku berasal dari limbah yang dikumpulkan di sekitar Kabupaten Semarang. Bahan itu kemudian dikembangkan oleh tim menjadi souvenir yang menyasar wisatawan, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Bali dan Danau Toba.

Untuk memperluas pasar, Tanganku memiliki dua lokasi di Bali yang menjadi basis penjualan produk kepada wisatawan mancanegara. Pada periode ramai kunjungan wisatawan, omzet produk souvenir disebut dapat mencapai lebih dari 1.500 dolar AS.

“Kalau dari nilai dolarnya itu fluktuatif. Ini kebetulan Juli sampai Oktober di Bali agak ramai. Jadi kalau untuk souvenirnya aja di luar sandal ya ini bisa tembus di atas 1.500 dolar (AS),” ungkap Kokos.

Kokos mengatakan, konsep penjualan yang dikembangkan adalah ekspor tenteng, yakni produk yang mudah dibawa wisatawan saat kembali ke negara asal. Konsep ini dinilai relevan dengan kondisi bagasi pesawat yang semakin terbatas.

Potensi tersebut mendapat apresiasi dari Nawal Arafah Yasin. Menurutnya, produk UMKM Jawa Tengah memiliki kekuatan yang dapat menjadi daya tarik di pasar global, terutama karena ditopang kekayaan budaya dan keragaman wastra dari berbagai daerah.

“Yang paling menarik ini adalah potensi di Jawa Tengah, bagaimana produk-produk ini basisnya adalah kekuatan kebudayaannya. Sehingga itu yang bisa kita jual. Jadi, wastra-wastranya sangat beragam,” kata dia, seusai berkeliling pameran.

Nawal mencontohkan, keberagaman produk wastra Jawa Tengah, mulai dari ecoprint, jumputan, hingga batik dengan karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Misalnya, batik asal Pekalongan memiliki ciri khas dan filosofi berbeda dengan asal Batang.

“Kemudian di Jepara kita juga lihat tadi ada tenunnya. Jadi, dari 35 stan kabupaten/kota ini, kita melihat banyak sekali wastra yang memiliki ciri khas yang luar biasa,” ujar Nawal.

Pada kegiatan tersebut, Nawal Arafah juga meluncurkan Klinik Ekspor yang akan beroperasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng. Klinik tersebut sebagai wadah konsultasi bagi pelaku usaha, yang ingin mendapatkan informasi serta pendampingan untuk mengakses pasar luar negeri.

Sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, hal itu merupakan upaya penguatan agar produk UMKM Jateng tidak hanya mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang menembus pasar internasional.

“Jadi, klinik ini yang pertama nantinya bisa memberikan informasi dan edukasi tentang bagaimana caranya UMKM-UMKM ini bisa ekspor. Kemudian pendampingan mengenai legalitas, administrasi, juga untuk peningkatan kapasitas, standarisasi produk, bisa kemudian konsultasi di klinik ekspor ini,” ungkap Nawal. (At/UI, Diskomdigi Jateng)

## **Akses Pembiayaan Diperkuat, UMKM Pekalongan Didorong Tingkatkan Kapasitas**

Jumat, 21 Agustus 2026

Penulis: Dian, Tim Liputan Kominfo Kota Pekalongan, Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/akses-pembiayaan-diperkuat-umkm-pekalongan-didorong-tingkatkan-kapasitas/>

KOTA PEKALONGAN – Pelaku UMKM di wilayah eks Karesidenan Pekalongan didorong untuk memanfaatkan akses pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha, dengan tetap memperkuat kapasitas, kualitas produk, manajemen, dan literasi keuangan.

Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, Kurnia Tri Puspita, pada acara Diskusi Strategis Bersama Insan Media di Sorak Sorai Coffee, Kota Tegal, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, penguatan pembiayaan bagi UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Penguatan akses pembiayaan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kebijakan yang tepat, penguatan kapasitas usaha, peningkatan literasi keuangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Media juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat,” kata Kurnia

Ia menyebutkan nilai penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah eks Karesidenan Pekalongan hingga Juni 2026, yakni mencapai Rp30,66 triliun. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui bank umum sebesar

Rp26,51 triliun, BPR/BPRS Rp1,56 triliun, perusahaan pembiayaan Rp1,82 triliun, perusahaan modal ventura Rp410 miliar, serta LKM dan pergadaian Rp360 miliar.

Untuk memperluas akses tersebut, OJK mendorong implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. OJK juga mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), antara lain melalui percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan setelah pelunasan serta penguatan kualitas informasi debitur.

“Selain akses pembiayaan, OJK menaruh perhatian pada peningkatan literasi keuangan, business matching, serta pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga diperkuat melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang melibatkan 16 lembaga jasa keuangan,” terangnya.

OJK Tegal juga mendorong perlindungan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui pemanfaatan asuransi sebagai salah satu instrumen perlindungan terhadap risiko usaha.

Kurnia menegaskan perluasan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Oleh karena itu, perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta keterhubungan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan pasar,” tegasnya.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memperkuat kapasitas UMKM. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop-UKM) Kota Pekalongan, Wismo Aditoyo, mengatakan pelaku usaha perlu didorong agar pembiayaan yang diperoleh dapat mendukung pengembangan usaha.

“Di Kota Pekalongan, kami terus mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya mampu mendapatkan akses permodalan, tetapi juga meningkatkan kapasitas, kualitas produk, manajemen usaha, dan literasi keuangannya,” ujar Wismo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (21/8/2026).

Menurut Wismo, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, komunitas, dan berbagai pihak lainnya. Pendampingan juga diperlukan agar pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

“Pembiayaan harus menjadi bagian dari upaya pengembangan usaha, bukan sekadar menambah modal. Oleh karena itu, pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM juga penting agar pembiayaan yang diperoleh benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM,” pungkasnya.

# Salatiga Dorong Revitalisasi Pasar Raya I dan Perluasan Ekspor UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026

Penulis: Kontributor Kota Salatiga, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/salatiga-dorong-revitalisasi-pasar-raya-i-dan-perluasan-ekspor-umkm/>

JAKARTA – Pemerintah Kota Salatiga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat revitalisasi Pasar Raya I sekaligus memperluas akses ekspor bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dua agenda tersebut dibawa Wali Kota Salatiga Robby Hernawan saat menemui Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Robby menyampaikan, Pasar Raya I memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat Salatiga. Karena itu, revitalisasi pasar dinilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pedagang maupun pengunjung sekaligus memperkuat fungsi pasar sebagai pusat ekonomi rakyat.

“Pasar Raya I bukan sekadar tempat jual beli, tetapi menjadi ruang ekonomi bagi ribuan pedagang dan masyarakat. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar revitalisasi pasar ini bisa segera terwujud dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga Salatiga,” ujar Robby.

Selain revitalisasi pasar, Pemkot Salatiga juga mendorong perluasan akses pasar bagi produk UMKM agar mampu menembus pasar internasional. Robby mengatakan, Salatiga memiliki beragam produk unggulan, mulai dari olahan singkong, enting-enting gepuk, kerajinan, hingga berbagai produk pangan lokal.

Salah satu produk olahan singkong asal Salatiga, lanjutnya, bahkan telah berhasil menembus pasar Australia.

“UMKM Salatiga tidak hanya kami dorong berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Potensi produk kita sangat besar dan perlu terus difasilitasi agar memiliki daya saing di pasar global,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengenalkan InaExport, platform Business to Business (B2B) resmi Kementerian Perdagangan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia untuk memasarkan produk kepada pembeli dari berbagai negara.

Melalui InaExport, pelaku UMKM dapat menampilkan profil usaha, memperoleh informasi peluang pasar ekspor, serta terhubung dengan buyer internasional melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

“InaExport menjadi jembatan bagi UMKM Indonesia untuk bertemu dengan pasar global. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform ini agar semakin banyak produk unggulan daerah yang dikenal dan dipasarkan ke mancanegara,” jelas Budi Santoso.

Pemkot Salatiga menilai pemanfaatan InaExport dapat menjadi salah satu akses bagi UMKM lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk.

Sementara itu, revitalisasi Pasar Raya I diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan pasar sekaligus memperkuat aktivitas perdagangan masyarakat.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Salatiga membangun sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong penguatan ekonomi daerah, baik melalui pengembangan pusat perdagangan maupun perluasan akses pasar bagi produk UMKM.

## **Perundingan Gagal, AS Kenakan Tarif 50% Terhadap Produk Kanada**

Sabtu, 22 Agustus 2026 20:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/perundingan-gagal-as-kenakan-tarif-50-terhadap-produk-kanada>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan Kanada kembali memanas.

AS mulai memberlakukan tarif hingga 50% terhadap sejumlah barang asal Kanada setelah kedua negara gagal mencapai kesepakatan perdagangan.

Tarif tersebut berlaku mulai Sabtu (22/8/2026) dini hari waktu setempat terhadap produk Kanada senilai sekitar US\$ 20 miliar.

Nilai itu memang hanya mencakup sedikit lebih dari 5% ekspor Kanada ke AS, tetapi langkah tersebut berpotensi memperlebar ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Kegagalan negosiasi juga mengancam pembicaraan yang lebih luas untuk memperbarui perjanjian perdagangan bebas AS, Kanada, dan Meksiko atau USMCA.

Carney bahkan memutuskan menghentikan sementara negosiasi dan memerintahkan tim perunding Kanada kembali ke Ottawa. “Kanada akan membalas tarif baru AS dolar demi dolar,” kata Carney.

Keputusan itu diambil setelah tiga hari perundingan di Washington antara Menteri Perdagangan Kanada untuk urusan AS Dominic LeBlanc dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Padahal, beberapa jam sebelum tarif diberlakukan, kedua pihak sempat disebut hampir mencapai kesepakatan.

Rancangan kesepakatan tersebut antara lain berpotensi menurunkan tarif terhadap baja, aluminium, dan produk otomotif. Kesepakatan juga membuka peluang kembalinya produk minuman beralkohol AS ke toko-toko minuman keras di Kanada.

Namun, AS dan Kanada akhirnya saling menyalahkan atas gagalnya kesepakatan. Greer mengatakan Kanada menolak menyelesaikan kesepakatan berdasarkan persyaratan yang sebelumnya telah disepakati.

Menurut pejabat senior pemerintahan Trump, AS sebelumnya menawarkan posisi tarif yang dinilai paling menguntungkan Kanada dibandingkan eksportir besar lain ke pasar AS.

Namun, Kanada disebut masih meminta konsesi tambahan, terutama untuk sektor baja, aluminium, otomotif, dan kayu lunak.

Belum ada jadwal perundingan lanjutan setelah tarif baru diberlakukan.

Kebijakan terbaru Trump juga menambah tekanan terhadap sejumlah sektor Kanada yang sebelumnya sudah terkena tarif AS, termasuk baja, kayu, dan otomotif. Sektor-sektor tersebut telah mengalami tekanan berat dalam 18 bulan terakhir.

Tarif baru terutama menyasar barang yang tidak mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan USMCA.

Sejumlah ekonom dan pakar perdagangan memperingatkan kebijakan tersebut dapat memperburuk tekanan pada sektor-sektor Kanada yang rentan, termasuk meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha.

Bagi Kanada, kebuntuan ini menjadi ujian baru dalam menghadapi kebijakan dagang Trump yang semakin agresif. Sementara bagi AS, eskalasi tarif dengan salah satu mitra dagang terbesarnya berpotensi membuat proses renegotiasi USMCA menjadi lebih rumit.

## **AS Berencana Lunasi Sebagian Utang ke PBB, Akan Bayar US\$ 725 Juta**

Sabtu, 22 Agustus 2026 08:00 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-berencana-lunasi-sebagian-utang-ke-pbb-akan-bayar-us-725-juta-1>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Trump telah memberi tahu Kongres mengenai niatnya untuk membayar US\$ 725 juta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah langkah yang menurut para ahli bantuan merupakan langkah positif menuju pelunasan tunggakan iuran yang mencapai miliaran dolar.

Berdasarkan pemberitahuan kepada Kongres yang dilihat oleh Reuters Sabtu (22/8/2026), AS sebelumnya mengkritik badan dunia itu karena dianggap tidak memenuhi potensinya dan telah memangkas pendanaan bagi banyak badan PBB.

Saat ditanya mengenai rencana pembayaran tersebut, seorang pejabat AS mengatakan bahwa pembayaran akan bergantung pada kelanjutan reformasi organisasi tersebut, seraya menambahkan bahwa AS belum mentransfer dana apa pun hingga hari Jumat.

Alokasi dana tersebut—yang tercantum dalam surat pemberitahuan Departemen Luar Negeri kepada Kongres tertanggal 4 Agustus dan belum pernah dilaporkan sebelumnya—muncul menjelang pidato yang dijadwalkan akan disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump di hadapan Majelis Umum PBB di New York bulan depan.

### **Ini Membuat kapal Bertahan Lebih Lama**

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tahun ini menyatakan bahwa PBB menghadapi "keruntuhan finansial dalam waktu dekat" akibat iuran yang belum dibayarkan oleh negara-negara anggota, dan badan dunia tersebut telah melakukan pemangkasan anggaran secara besar-besaran.

"Selama enam bulan terakhir, Amerika Serikat telah mencapai reformasi bersejarah di PBB—reformasi yang sebelumnya dianggap mustahil—termasuk pemotongan anggaran nyata pertama dalam sejarah PBB, yang menghasilkan penghematan hampir satu miliar dolar," ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri dalam surel saat menanggapi pertanyaan Reuters mengenai pembayaran tersebut.

Pada bulan April, Devex, sebuah kantor berita yang berfokus pada isu pembangunan, melaporkan bahwa AS telah menetapkan syarat-syarat khusus untuk pencairan dana tersebut, seperti langkah penghematan biaya lebih lanjut dan upaya untuk membendung pengaruh Tiongkok.

Pemerintahan Trump telah melakukan perampangan pemerintah federal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya—dengan alasan bahwa birokrasi pemerintah sudah terlalu gemuk—serta memangkas secara signifikan dana hibah domestik maupun luar negeri, sebagai upaya untuk mengalokasikan dana bagi tujuan-tujuan yang sejalan dengan kepentingan pembayar pajak AS.

Jumlah sebesar US\$ 725 juta tersebut mencakup kurang dari 20% dari total tunggakan lebih dari US\$ 4 miliar yang menurut PBB pada bulan Mei lalu harus dibayarkan oleh Amerika Serikat—meskipun pihak Washington menyatakan bahwa angka totalnya jauh lebih rendah dan mereka telah melakukan sejumlah pembayaran.

Eugene Chen, mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa transfer dana semacam itu akan membantu pembayaran gaji staf PBB untuk sementara waktu, namun mungkin tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan gaji.

"Hal ini menjaga operasional organisasi tetap berjalan sedikit lebih lama," ujarnya.

"Jika AS tidak melakukan pembayaran lanjutan, mereka kemungkinan besar akan kehilangan hak suara di Majelis Umum pada bulan Januari," tambahnya.

Berdasarkan Pasal 19 Piagam PBB, sebuah negara anggota akan kehilangan hak suaranya di Majelis Umum jika tunggakan iuran tahunannya telah melampaui jangka waktu dua tahun, meskipun masa tenggang masih dimungkinkan.

Transfer dana dalam jumlah signifikan saat ini dapat mencegah perlunya pemotongan belanja secara mendadak, kata Ronny Patz, seorang pakar keuangan PBB dari lembaga pemikir Jerman, IDOS.

"Jika mereka membayar dalam jumlah besar, PBB memang masih beroperasi tanpa cadangan dana, namun organisasi tersebut dapat bertahan hingga akhir tahun," tambah Patz.

"Jika mereka tidak membayar, PBB bisa benar-benar mengalami kesulitan pada dua atau tiga bulan terakhir tahun ini dalam hal pembayaran gaji dan menjaga operasional tetap berjalan."

AS adalah kontributor terbesar bagi anggaran PBB, namun di bawah pemerintahan Trump, negara itu menolak melakukan pembayaran wajib untuk anggaran reguler dan anggaran misi pemeliharaan perdamaian, serta memangkas pendanaan sukarela bagi badan-badan PBB yang memiliki anggaran sendiri.

Washington juga telah menarik diri dari puluhan badan PBB dan lembaga internasional lainnya.

PBB sebelumnya berharap dapat mengumpulkan sekitar 90% iuran dari 193 anggotanya untuk anggaran tahun ini, menurut keterangan Chandramouli Ramanathan, pejabat pengendali keuangan PBB, bulan lalu.

Hingga 18 Agustus, sekitar 129 anggota telah melunasi pembayaran mereka, menurut dokumen PBB. Tiongkok, kontributor terbesar kedua setelah Washington, juga tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan dalam surat tertanggal 4 Agustus bahwa pihaknya berkomitmen mengalokasikan dana sebesar total \$725 juta untuk anggaran reguler PBB.

Pada bulan Mei, PBB menyebutkan bahwa tunggakan Washington yang bernilai lebih dari \$4 miliar mencakup \$2,04 miliar untuk anggaran reguler, \$2,2 miliar untuk misi pemeliharaan perdamaian (baik yang sedang berjalan maupun yang telah lampau), serta \$44 juta untuk berbagai pengadilan PBB.

Washington belum mentransfer sekitar \$153,4 juta yang mereka sebut sebagai "penahanan dana berbasis kebijakan" (policy-based withholdings). Jumlah tersebut mencakup US\$ 10,6 juta yang sedianya ditujukan bagi Dewan Hak Asasi Manusia—lembaga yang ditinggalkan Washington tahun lalu karena tuduhan adanya bias anti-Israel—serta dana untuk badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina.

Institusi yang telah berusia 80 tahun ini sedang menjalani upaya reformasi dan pemangkasan biaya yang dikenal sebagai "UN80" di tengah krisis keuangan yang melandanya.

Perusahaan tersebut telah memangkas anggaran tahun 2026 sebesar 9,2% dan memindahkan lebih dari 2.000 pekerjaan dari kota-kota berbiaya tinggi seperti Jenewa dan New York ke pusat-pusat dengan biaya lebih rendah.

## **Defisit Neraca Transaksi Berjalan Diprediksi Melebar Jadi 3% dari PDB pada Akhir 2026**

Sabtu, 22 Agustus 2026 08:30 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-neraca-transaksi-berjalan-diprediksi-melebar-jadi-3-dari-pdb-pada-akhir-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) diperkirakan melebar pada akhir tahun 2026.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman memperkirakan, defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 2,5%–3,0% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2026, dari 0,11% dari PDB pada tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US\$ 12,5 miliar atau 3,3% dari PDB, melebar dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US\$ 3,6 miliar 1,0% dari PDB.

“Kami memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar pada tahun 2026, didorong oleh impor yang lebih kuat di bawah agenda pro-pertumbuhan pemerintah dan ekspor yang lebih lemah di tengah permintaan global yang lebih lemah dan ketegangan geopolitik dan perdagangan yang terus berlanjut,” tutur Faisal dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dapat membebani neraca pembayaran, terutama karena arus aset tetap berada di bawah tekanan di tengah ketidakpastian global yang tinggi yang memicu sentimen penghindaran risiko.

Pada neraca transaksi berjalan, Faisal melihat risiko penurunan pada neraca barang Indonesia, terutama didorong oleh agenda kebijakan berorientasi pertumbuhan pemerintah, yang diharapkan dapat mempertahankan permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan impor yang lebih kuat.

Pada saat yang sama, permintaan global yang lebih lemah, terutama dari Tiongkok, bersamaan dengan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah dan perang dagang global yang sedang berlangsung, dapat membebani kinerja ekspor.

Perkembangan ini juga dapat mengganggu rantai pasokan global, yang selanjutnya membatasi pertumbuhan ekspor.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan menilai implikasinya terhadap posisi eksternal Indonesia,” jelasnya.

Dari sisi keuangan, Faisal menilai arus portofolio diperkirakan akan tetap rentan terhadap ketidakpastian global dan domestik, meskipun ada beberapa peningkatan sentimen investor setelah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mempertahankan klasifikasi pasar negara berkembang Indonesia dan pemeliharaan prospek stabil oleh S&P.

Secara global, ketidakpastian seputar perkembangan geopolitik di Timur Tengah terus mengaburkan prospek jalur kebijakan Fed, karena harga energi yang tinggi dapat membuat inflasi AS tetap di atas target 2% untuk jangka waktu yang lama.

“Hal ini dapat memperkuat sentimen penghindaran risiko dan membatasi arus masuk modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” ungkapnya.

Di dalam negeri, Faisal melihat kekhawatiran atas defisit ganda Indonesia juga meningkat, mencerminkan risiko defisit neraca transaksi berjalan yang lebih lebar dan defisit fiskal yang lebih besar di bawah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan.

## **Kredit Perbankan Tumbuh 13%, Rata-Rata Suku Bunga Kredit Juga Ikut Naik**

Sabtu, 22 Agustus 2026 14:05 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-perbankan-tumbuh-13-rata-rata-suku-bunga-kredit-juga-ikut-naik>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran kredit perbankan terus menunjukkan akselerasi pada Juli 2026. Bank Indonesia mencatat total kredit mencapai Rp 8.970,2 triliun, tumbuh 13% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Juni sebesar 12,1%.

Menilik data uang beredar periode Juli 2026 yang dipublikasikan Jumat (21/8/2026), pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh ekspansi kredit korporasi yang mencapai 20,9% secara tahunan. Kredit kepada perorangan juga meningkat, meski lebih terbatas, yakni 3,6%.

Berdasarkan penggunaannya, kredit investasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi. Kredit investasi mencapai Rp 2.733,3 triliun atau tumbuh 23,1% secara tahunan, meningkat dari 22,5% pada Juni.

Kredit modal kerja mencapai Rp 3.833,8 triliun dan tumbuh 11,6% secara tahunan, meningkat dari 9,6%. Sementara kredit konsumsi mencapai Rp2.403 triliun atau tumbuh 5,3%, melambat dari 5,7% pada Juni.

Di tengah akselerasi penyaluran kredit tersebut, suku bunga kredit justru meningkat. BI mencatat rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Juli 2026 sebesar 8,86%, naik dari 8,79% pada Juni.

Kenaikan juga terjadi pada suku bunga simpanan berjangka di seluruh tenor yang dicatat BI. Suku bunga deposito tenor satu bulan berada di 5,03%, tenor tiga bulan 5,53%, tenor enam bulan 5,44%, tenor 12 bulan 5,75%, dan tenor 24 bulan 4,01%.

Kenaikan suku bunga kredit tersebut terjadi ketika pertumbuhan kredit sedang menguat. Dengan kredit yang tumbuh 13% secara tahunan pada Juli, penyaluran pembiayaan perbankan menjadi salah satu faktor utama yang menopang perkembangan uang beredar.

BI mencatat kredit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan M2 pada Juli. Posisi M2 tercatat Rp10.371,1 triliun atau tumbuh 8,3% secara tahunan, sementara penyaluran kredit mencapai Rp 8.970,2 triliun.

“Perkembangan M2 pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat,” sebut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, dalam keterangan resmi, Jumat (21/8/2026).

Secara sektoral, penguatan kredit investasi antara lain berasal dari konstruksi dan jasa-jasa. Sementara pertumbuhan kredit modal kerja didorong oleh antara lain sektor listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan serta konstruksi.

Sekadar informasi, Bank Indonesia memberi catatan angka realisasi di Juli 2026 masih merupakan angka sementara.

## **Data Bank Indonesia: DPK Juli 2026 Tumbuh 7,7%, Simpanan Valas Masih Melaju**

Sabtu, 22 Agustus 2026 11:19 WIB

Reporter: Harris Hadinata. Editor: Harris Hadinata

<https://keuangan.kontan.co.id/news/data-bank-indonesia-dpk-juli-2026-tumbuh-77-simpanan-valas-masih-melaju>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan melambat pada Juli 2026. Bank Indonesia mencatat penghimpunan DPK pada Juli mencapai Rp 9.666,9 triliun, tumbuh 7,7% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 8,1%.

Perlambatan terutama terjadi pada simpanan berjangka. Pertumbuhan simpanan berjangka turun dari 6,2% secara tahunan pada Juni menjadi 4,8% secara tahunan pada Juli. Sementara itu, pertumbuhan giro justru meningkat dari 10,2% menjadi 10,5%, sedangkan pertumbuhan tabungan bertahan pada level 8,2%.

Berdasarkan valuta, DPK dalam rupiah pada Juli tercatat mencapai Rp 8.084,1 triliun, turun dari Rp 8.110,6 triliun pada Juni 2026. Pertumbuhannya mencapai 5,9% secara tahunan, melambat dari 6,3% pada bulan sebelumnya.

DPK rupiah tersebut terdiri atas giro sebesar Rp 2.229,3 triliun, tabungan Rp 2.919,9 triliun, dan simpanan berjangka senilai Rp 2.935 triliun. Pertumbuhan giro rupiah mencapai 12,5% secara tahunan, tabungan naik 6,7%, sedangkan simpanan berjangka hanya naik 0,7% secara tahunan.

Sementara itu, DPK dalam valuta asing (valas) pada Juli tercatat mencapai Rp 1.582,7 triliun, turun dari Rp 1.606,2 triliun pada Juni. Meski secara nominal turun, pertumbuhannya masih tinggi, mencapai 17,9% secara tahunan, meski melambat dari 18,5% pada Juni.

DPK valas terdiri atas giro sebesar Rp 826,4 triliun, turun dari Rp 850,2 triliun di Juni. Lalu tabungan sebesar Rp 262,2 triliun, lebih tinggi dari Rp 261,7 triliun di Juni. Simpanan berjangka mencapai Rp 494,1 triliun, turun tipis dari Rp 494,3 triliun.

Bila dilihat berdasarkan golongan nasabah, korporasi masih menjadi penopang utama DPK. Simpanan korporasi mencapai Rp 4.909,5 triliun pada Juli, tumbuh 12,5% secara tahunan, melambat tipis dari 12,7% pada Juni.

DPK perorangan tercatat sebesar Rp 4.242 triliun atau tumbuh 2,8% secara tahunan, sama dengan pertumbuhan pada Juni. Sementara itu, DPK dari sektor lainnya mencapai Rp 515,3 triliun, tumbuh 6,2% secara tahunan, melambat dari 12,2% pada bulan sebelumnya.

Jika dirinci berdasarkan jenis simpanan, giro korporasi mencapai Rp 2.687,3 triliun dan tumbuh 13,1% secara tahunan. Giro perorangan Rp105,1 triliun, tetapi masih berkontraksi 8,3% secara tahunan.

Pada tabungan, dana korporasi mencapai Rp 359,4 triliun dengan pertumbuhan 21,5% secara tahunan. Tabungan perorangan mencapai Rp 2.754 triliun atau tumbuh 6,5%.

Adapun simpanan berjangka korporasi tercatat Rp1.862,8 triliun atau tumbuh 10,2%. Simpanan berjangka perorangan mencapai Rp1.383 triliun dan masih berkontraksi 3,1% secara tahunan.

Secara keseluruhan, struktur DPK menunjukkan pertumbuhan dana korporasi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dana perorangan. BI mencatat perlambatan DPK secara keseluruhan pada Juli terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK korporasi.

Sekadar informasi, Bank Indonesia memberi catatan angka realisasi di Juli 2026 masih merupakan angka sementara.

## **Rupiah Menguat 0,75% Dalam Sepekan, Begini Proyeksinya untuk Pekan Depan**

Sabtu, 22 Agustus 2026 11:30 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur. Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-menguat-075-dalam-sepekan-begini-proyeksinya-untuk-pekan-depan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah berpeluang lanjut menguat pada pekan depan, meski masih dibayangi sejumlah sentimen global dan domestik.

Turunnya imbal hasil US Treasury menjadi salah satu katalis yang menopang pergerakan rupiah.

Melansir Bloomberg pada Jumat (21/8/2026), kurs rupiah di pasar spot menguat 0,3% secara harian menjadi Rp 17.694 per dolar Amerika Serikat (AS). Dalam sepekan, kurs rupiah spot menguat 0,75% dari posisi Rp 17.827 per dolar AS.

Sejalan, kurs rupiah Jisdor menguat atau 0,42% dalam sehari menjadi Rp 17.705 per dolar AS. Dalam sepekan, kurs rupiah Jisdor menguat 0,73% dari Rp 17.836 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah dalam sepekan terakhir berasal dari kebijakan Departemen Keuangan AS yang meningkatkan program pembelian kembali (buyback) surat utang pemerintah AS atau US Treasury.

Departemen Keuangan AS berencana melipatgandakan pembelian kembali Treasury berjangka panjang menjadi sedikitnya US\$ 4 miliar per operasi selama kuartal mendatang. Kebijakan tersebut dinilai membantu menekan imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor panjang.

“Dan pemerintah dapat meningkatkan pembelian tersebut lebih lanjut dan berpendapat bahwa tingkat imbal hasil saat ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang sebenarnya,” ujar Ibrahim, Jumat (21/8/2026).

Di sisi lain, perkembangan pasar tenaga kerja AS juga menjadi perhatian. Klaim tunjangan pengangguran mingguan tercatat menurun, menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja masih relatif stabil meskipun sebelumnya terjadi penurunan jumlah lapangan kerja yang tidak terduga pada Juli.

Kondisi tersebut membuat The Fed masih perlu menjaga fokus terhadap pengendalian inflasi. Sementara itu, pasar masih memperdebatkan waktu pelaksanaan perubahan kebijakan suku bunga berikutnya.

Dari sisi geopolitik, Ibrahim mengatakan ketegangan terkait Iran masih menjadi perhatian pasar. Kesepakatan damai sebelumnya berakhir pada pekan ini tanpa adanya upaya dari kedua pihak untuk kembali memulai perundingan.

Dari dalam negeri, salah satu perhatian pasar berasal dari pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sebesar US\$ 12,5 miliar pada kuartal II-2026 atau 3,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diperkirakan temporer. Pada kuartal sebelumnya defisit transaksi berjalan hanya sebesar US\$ 3,6 miliar atau 1,0% dari PDB.

Menurut Ibrahim, pelebaran CAD tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas seiring kenaikan impor minyak di tengah tingginya harga minyak dunia.

“Surplus neraca perdagangan nonmigas juga tercatat lebih rendah dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas untuk kebutuhan kegiatan ekonomi dalam negeri yang masih tinggi,” jelasnya.

Selain itu, pasar juga perlu mewaspadai risiko inflasi pangan akibat fenomena El Nino. Kekeringan berkepanjangan berpotensi menekan produksi pertanian dan mengurangi pasokan beras maupun komoditas pangan lainnya. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga pangan, menekan daya beli masyarakat.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah pada pekan depan akan bergerak dalam kisaran Rp 17.600-Rp 17.900 per dolar AS.

## **BI Imbau Bank Tak Pasarkan SRBI ke Nasabah Ritel & Non Bank**

Sabtu, 22 Agustus 2026 15:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119196/bi-imbau-bank-tak-pasarkan-srbi-ke-nasabah-ritel-non-bank/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengimbau agar perbankan tidak memasarkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) kepada nasabah ritel serta korporasi/lembaga keuangan nonbank.

Direktur Eksekutif Senior, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan SRBI merupakan instrumen operasi moneter dalam pengelolaan likuiditas perbankan, pendalaman pasar uang, serta mendukung aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio.

“Sejalan dengan arah bauran kebijakan moneter BI, bank diimbau untuk tidak memasarkan SRBI dan instrumen moneter lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada nasabah ritel serta korporasi/lembaga keuangan nonbank,” kata Erwin kepada Bloomberg Technoz, Sabtu (22/8/2026).

Erwin menjelaskan penyesuaian ini dilakukan agar SRBI lebih efektif menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen operasi moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan.

Sementara kebutuhan investasi ritel, korporasi, dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dapat lebih banyak disalurkan melalui instrumen pasar keuangan lainnya. Dengan demikian, likuiditas dapat lebih optimal mendukung pendalaman pasar dan pembiayaan perekonomian.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bloomberg Technoz, pada Kamis (20/8/2026) mengeluarkan surat himbauan perihal tindak lanjut implementasi SRBI sebagai instrumen operasi moneter pro market. Surat himbauan tersebut bernomor 28/3/GBI-DPMA-Srt/B.

Dalam surat tersebut, terdapat tiga hal yang disampaikan BI, yakni pertama mengingatkan kembali tujuan utama penerbitan SRBI yaitu sebagai instrumen operasi moneter dalam pengelolaan likuiditas. Kemudian, pendalaman pasar uang, dan menarik masuk aliran modal asing dalam investasi portofolio.

Kedua, penguatan arah bauran kebijakan BI sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (BI) pada 18-19 Agustus 2026 ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta peningkatan kredit/pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mempertimbangkan tujuan penerbitan SRBI yang sejalan dengan arah bauran kebijakan BI terkini, bank sentral mengimbau agar bank tidak melakukan transaksi SRBI dengan mempertimbangkan pengelolaan likuiditas bank, mengacu pada market conduct, tidak memasarkan SRBI serta instrumen moneter lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada nasabah ritel dan korporasi/lembaga keuangan nonbank.

Dalam catatan Bloomberg Technoz, BI bukan kali ini saja mengeluarkan surat edaran yang mengimbau perbankan agar tidak melakukan mobilisasi dana pihak ketiga (DPK) dan tidak memasarkan SRBI secara langsung pada nasabah ritel.

Bank sentral juga mengeluarkan surat serupa yang saat itu ditandatangani oleh Deputy Gubernur Senior Destry Damayanti pada 24 Juli 2024.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Edi Susianto kala itu mengatakan surat edaran ini untuk menegaskan SRBI merupakan instrumen moneter guna mengelola likuiditas pasar atau instrumen penyerapan likuiditas dan sebagai instrumen pendalaman pasar uang antar bank pelaku pasar dalam hal ini diutamakan antar bank dan antar bank dengan investor asing.

“Dengan kata lain, SRBI bukan sebagai instrumen untuk mobilisasi dana pihak ketiga bank khususnya dana pihak ketiga dari ritel dan korporasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Edi menambahkan terjadi peningkatan kinerja pendalaman pasar keuangan pasca hadirnya SRBI, terutama didorong oleh peningkatan pasar sekunder (jual-beli) SRBI antarbank dan antar bank dengan investor institusi keuangan asing.

“Selain itu juga meningkatnya transaksi repo antarbank yang menggunakan kolateral SRBI,” terang Edi.

Sekadar catatan, pada RDG Juli lalu, BI mengungkapkan bahwa porsi kepemilikan investor asing pada SRBI) hanya mencapai 27% dari total outstanding SRBI.

“Kepemilikan nonresiden di SRBI meningkat dari Rp238,09 triliun pada 15 Juni 2026 menjadi Rp288,65 triliun atau 27,11% dari total posisi SRBI pada 20 Juli 2026,” kata Mantan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam RDG BI, Rabu (22/7/2026).

## **Harga Pangan Akhir Pekan Mayoritas Naik: Cabai Tembus Rp70 Ribu**

Sabtu, 22 Agustus 2026 11:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119189/harga-pangan-akhir-pekan-majoritas-naik-cabai-tembus-rp70-ribu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Hampir seluruh harga pangan tercatat mengalami kenaikan pada Sabtu (22/8/2026) pukul 10.00 WIB. Kenaikan harga tertinggi rata-rata terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah naik 12,45% atau Rp70.450/kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit hijau naik 3,25% menjadi Rp57.150/kg. Sementara cabai merah keriting naik 2,38% menjadi Rp51.650/kg, sedangkan cabai merah besar naik 0,41% menjadi Rp49.300/kg.

Harga rerata beras juga terpantau naik, beras kualitas bawah I naik 0,34% menjadi Rp14.850/kg, kemudian beras kualitas bawah II naik 1,03% menjadi Rp14.750/kg.

Selanjutnya, beras kualitas medium II naik sebesar 0,31% menjadi Rp16.350/kg, sedangkan beras kualitas medium I tetap seharga Rp16.500/kg.

Untuk kategori beras kualitas super I dan beras kualitas super II juga naik tipis masing-masing yaitu senilai Rp17.800/kg dan Rp17.300/kg.

Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 1,09% menjadi Rp41.800/kg. Kenaikannya juga disusul oleh harga daging sapi kualitas 1 dan 2 justru mengalami kenaikan masing-masing 0,33% dan 0,1% menjadi Rp151.950/kg dan Rp143.050/kg.

Adapun gula pasir premium tetap di harga Rp20.350/kg. Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,74% menjadi Rp20.500/kg.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I juga naik menjadi Rp24.350/kg. Minyak goreng kemasan bermerek 2 juga naik 0,42% menjadi Rp23.650/kg.

Harga bawang putih ukuran sedang juga naik 0,12% menjadi Rp40.550/kg sedangkan bawang merah ukuran sedang mengalami penurunan 1,52% menjadi Rp38.850/kg.

Harga pangan yang mengalami penurunan lainnya yakni telur ayam ras segar, terpantau turun 0,17% menjadi Rp29.350/kg.

# KEK Batang dan Disdik Jateng Cetak Talenta Siap Kerja

Sabtu, 22 Agustus 2026 12:17 WIB

Reporter: Dina Mirayanti Hutaauruk, Editor: Dina Hutaauruk

<https://industri.kontan.co.id/news/kek-batang-dan-disdik-jateng-cetak-talenta-siap-kerja>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat kesiapan kerja siswa dan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penguatan karakter dan kesiapan kerja peserta didik serta lulusan SMK. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara KEK Industropolis Batang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diteken pada 19 Agustus 2025.

Melalui kerja sama tersebut, KEK Industropolis Batang dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah berupaya memperkuat keterkaitan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KEK Industropolis Batang, Angga Arie Saputra, mengatakan kolaborasi dengan dunia pendidikan penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten bagi kawasan industri.

Menurutnya, KEK Industropolis Batang tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur, listrik, air, dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan ekosistem industri di kawasan tersebut.

"Karena itu, kami melihat SMK memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber talenta bagi kawasan. Melalui Program NGOPENI SMK, kami ingin memperkuat jembatan antara dunia pendidikan dan industri agar peserta didik dapat lebih mengenal kebutuhan dunia kerja sejak di bangku sekolah," ujar Angga dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Ia menambahkan, kerja sama tersebut akan mendorong keterlibatan industri secara lebih konkret melalui pembekalan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain kemampuan teknis, peserta didik juga akan dibekali karakter yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap budaya kerja. Peserta didik juga diharapkan memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan penyiapan lulusan SMK perlu diarahkan agar mereka siap masuk ke dunia kerja. Selain meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri, program ini juga memperkuat karakter kerja, seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kerja sama, kepatuhan terhadap prosedur, kepedulian terhadap keselamatan, serta kemampuan beradaptasi dan terus belajar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai kompetensi siswa SMK harus mengikuti perkembangan industri. Menurutnya, siswa juga perlu dibekali karakter dan kemampuan beradaptasi agar mampu menghadapi perubahan di dunia kerja.

Kerja sama ini mencakup penyalarsan materi pembekalan dan pelatihan, kunjungan ke pabrik dan industri, serta keterlibatan praktisi industri sebagai narasumber, instruktur, mentor, penguji, dan pemberi umpan balik. Selain itu, kerja sama dapat mencakup pelatihan, asesmen, sertifikasi kompetensi, magang, dan praktik kerja lapangan.

Kerja sama tersebut juga membuka akses bagi siswa dan lulusan SMK terhadap informasi lowongan kerja, bimbingan karier, pemadanan kompetensi, proses seleksi, hingga penempatan kerja melalui koordinasi dengan sekolah dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Proses rekrutmen diarahkan berlangsung secara objektif, transparan, inklusif, nondiskriminatif, dan tanpa pungutan.

## **Banyumas dorong Etalase Pertanian pangkas mata rantai pasok**

Sabtu, 22 Agustus 2026 23:47 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/642768/banyumas-dorong-etalase-pertanian-pangkas-mata-rantai-pasok>

Banyumas (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendorong pengembangan Etalase Pertanian di pasar tradisional untuk memangkas mata rantai perdagangan hasil pertanian sekaligus memperluas akses petani dan pedagang terhadap pasar.

Usai menggelar pertemuan dengan pengelola Etalase Pertanian di Pasar Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang, ia mengatakan inovasi tersebut berkembang jauh melampaui gagasan awal dan layak diterapkan di pasar lainnya.

"Ini sebetulnya saya tidak berekspektasi sampai ke sini. Saya awalnya hanya ingin membuat Etalase Pertanian untuk mendata bibit-bibit yang dimiliki petani," katanya.

Ia mengatakan pendataan tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui jenis dan ketersediaan bibit yang dimiliki petani sehingga dapat mempertemukan kebutuhan dengan pemilik bibit secara lebih mudah.

Akan tetapi setelah pengelolaan diserahkan kepada petani milenial, kata dia, konsep tersebut berkembang menjadi Etalase Pertanian yang juga berfungsi mempertemukan hasil pertanian lokal dengan kebutuhan pasar.

"Pasar Ajibarang menjadi proyek percontohan dan menunjukkan hasil positif," katanya.

Ke depan, kata dia, Etalase Pertanian diharapkan terbentuk di berbagai wilayah Banyumas, terutama untuk mendukung kebutuhan bahan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut dia, keberadaan SPPG semestinya mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat tingkat bawah, mulai dari petani hingga pedagang.

Akan tetapi, kata dia, sejumlah pedagang sebelumnya mengeluhkan bahan pangan untuk SPPG justru didatangkan dari luar Banyumas.

"Pedagang-pedagang banyak yang mengeluh. Mereka justru tidak laku karena barang yang datang dari luar Banyumas," katanya.

Melalui Etalase Pertanian, kata dia, kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal.

Menurut dia, petani memperoleh harga dan pembayaran yang lebih baik, sedangkan SPPG mendapatkan pasokan tanpa harus mendatangkan komoditas dari luar daerah.

Ia mengatakan Etalase Pertanian di Pasar Ajibarang yang baru berjalan sekitar satu bulan telah mengelola kebutuhan tiga dapur SPPG dengan omzet sekitar Rp500 juta per bulan.

"Perputarannya betul-betul ada di teman-teman petani, tidak memakai tengkulak. Ini memotong mata rantai pasokan," katanya.

Ia mengatakan pengelolaan Etalase Pertanian tersebut dilakukan secara mandiri tanpa membebani APBD dan telah mempekerjakan tujuh karyawan.

Ia mengharapkan sebagian keuntungan juga dapat dikembalikan untuk mendukung petani.

Selain itu, kata dia, konsep tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan jarak distribusi.

Menurut dia, satu Etalase Pertanian idealnya melayani kebutuhan SPPG di sekitar tiga hingga empat kecamatan agar pengiriman tetap efisien.

"Kalau lebih dari itu sudah tidak efisien karena terlalu jauh," katanya.

Selain memperkuat Etalase Pertanian, ia juga mendorong koperasi simpan pinjam hadir di pasar untuk membantu pedagang yang kesulitan mengakses pembiayaan perbankan.

Sadewo mengatakan inovasi Etalase Pertanian Ajibarang bahkan telah mendapat perhatian kementerian dan diharapkan dapat menjadi contoh penguatan rantai pasok pertanian yang bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia.

## **ADKASI: TKD 2027 capai Rp735 triliun bisa pulihkan ruang fiskal pemda**

Sabtu, 22 Agustus 2026 23:07 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642756/adkasi-tkd-2027-capai-rp735-triliun-bisa-pulihkan-ruang-fiskal-pemda>

Blora (ANTARA) - Wacana pemerintah pusat menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp42 triliun pada 2027 diharapkan mampu membantu memulihkan ruang fiskal pemerintah daerah yang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran, kata Ketua ADKASI Siswanto.

"Tentunya semua daerah menyambut positif rencana tersebut, termasuk Kabupaten Blora setelah mengalami pemangkasan anggaran pada 2026," ujar Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto di Blora, Sabtu.

Ia menjelaskan anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pusat pada 2026 sekitar Rp693 triliun. Dengan adanya rencana tambahan Rp42 triliun pada 2027, total proyeksi TKD tahun depan mencapai Rp735 triliun.

Menurut Siswanto kebijakan efisiensi TKD pada 2026 berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.

Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak pemangkasan TKD dengan nilai sekitar Rp367 miliar. Tekanan terhadap ruang fiskal daerah semakin besar karena Pemkab Blora juga mulai memasuki tahun pertama pembayaran pinjaman daerah sebesar Rp215 miliar.

Oleh karena itu, Siswanto menilai peningkatan TKD pada 2027 perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

"Peningkatan TKD diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Siswanto menambahkan pemerintah pusat sebelumnya juga telah memberikan tambahan TKD sebesar Rp18 triliun pada 2026 untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Dari tambahan tersebut, Kabupaten Blora mendapatkan alokasi sekitar Rp27 miliar yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia berharap peningkatan TKD pada 2027 nantinya mampu memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk kembali memperkuat pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

## **DPRD Blora kaji kontribusi sumur minyak rakyat terhadap PAD**

Sabtu, 22 Agustus 2026 06:11 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642652/dprd-blora-kaji-kontribusi-sumur-minyak-rakyat-terhadap-pad>

Blora (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengkaji kontribusi pengelolaan sumur minyak rakyat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul adanya tuntutan warga terkait pembagian manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Blora Mochamad Muchklisin di Blora, Jumat, keberadaan sumur minyak rakyat semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Yang sedang kita kaji sebenarnya bagaimana keberadaan sumur rakyat itu bisa memberikan efek yang baik, khususnya terkait pendapatan daerah," ujarnya menanggapi adanya audiensi antara warga Dukuh Blimbing, Pemerintah Desa Gandu, paguyuban penambang sumur minyak rakyat, dan Mataram Connection Nusantara (MCN) di DPRD Blora pada Kamis (20/8).

Menurut dia pengelolaan sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, saat ini melibatkan UMKM PT Mataram Connection Nusantara (MCN) dan Koperasi Blora Migas Energi (BME).

Namun, DPRD masih perlu mengetahui secara jelas sejauh mana aktivitas pengelolaan tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Blora.

Muchklisin mengatakan hal itu menjadi pekerjaan rumah DPRD, terutama di tengah tuntutan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Selain kontribusi terhadap daerah, DPRD turut menyoroti transparansi pengelolaan dana sebesar 30 persen dari hasil pengelolaan sumur minyak rakyat yang selama ini dikelola melalui paguyuban penambang.

Anggota DPRD Blora Supardi mengatakan mekanisme kerja sama antara MCN dan paguyuban penambang pada dasarnya telah berjalan. Namun, penerimaan dan penggunaan dana tersebut dinilai belum transparan.

"Karena apa, satu ini transparansi terhadap penggunaan uang yang 30 persen dari MCN tidak jelas atau masih abu-abu," ujarnya.

Supardi meminta paguyuban membuka informasi mengenai besaran dana yang diterima, penggunaan dana, serta dasar perhitungan pembagian kompensasi kepada masyarakat.

Menurut dia warga Dukuh Blimbing sebelumnya menerima kompensasi dengan acuan 20 persen. Dalam perkembangannya, paguyuban menawarkan dua skema, yakni 10 persen dari penghasilan kotor atau 20 persen dari penghasilan bersih.

Namun, hingga audiensi berlangsung, belum terdapat kesepakatan mengenai skema tersebut.

"Kemarin 10 persen Dukuh Gandu dan Dukuh Gendono dikasih. Kemudian Dukuh Blimbing mengacu dari tahun lalu 20 persen diberikan. Tapi setelah ada perubahan, ini belum ada titik temu," katanya.

Supardi menjelaskan kompensasi sebelumnya diberikan secara merata kepada setiap kepala keluarga dengan nominal sekitar Rp600 ribu per bulan. Kompensasi tersebut pada awalnya berkaitan dengan dampak limbah aktivitas sumur minyak yang mengganggu lahan pertanian warga.

Sementara itu, Koordinator Aksi Damai Forum Warga Gandu Rudi Ariyanto meminta seluruh pihak membuka secara transparan mekanisme pengelolaan sumur minyak rakyat.

Menurut dia masyarakat perlu mengetahui hubungan kerja sama antara pemerintah desa, paguyuban penambang, MCN, hingga kerja sama MCN dengan Pertamina.

"Yang ketiga transparansi pengelolaan tambang minyak. Termasuk kerja samanya antara pihak desa atau paguyuban dengan MCN, serta transparansi kerja sama antara MCN dengan Pertamina," ujarnya.

## **18 Pemda di Jateng Bisa "Nafas Panjang" Peroleh Alokasi Rp268 M**

Sabtu, 22 Agustus 2026 22:23 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1264012/18-pemda-di-jateng-bisa-nafas-panjang-peroleh-alokasi-rp268-m>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebanyak 18 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp268 miliar.

Tambahan anggaran tersebut disalurkan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Iya betul, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 yang tertanggal 5 Agustus 2026, sebanyak 18 Pemda dapat alokasi Rp268 miliar," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Dwianto Priyongroho saat dihubungi, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Dwi, tambahan alokasi anggaran sebesar Rp268 miliar terdiri dari DBH sekitar Rp83 sekian miliar dan DAU sekitar Rp184 sekian miliar. Tambahan anggaran itu digunakan untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan para pegawai Pemda yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kesulitan bayar. Tambahan alokasi ini dicairkan pada tahun 2026 ini.

"Ya tambahan alokasi ini untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan yang ada di seluruh Pemda (penerima)," katanya.

Dwi menyebut, tambahan alokasi tersebut merupakan upaya dari Pemprov Jateng yang menyurati ke pemerintah pusat bahwa hampir seluruh 35 kabupaten/kota mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Iya, betul, kami dari awal sudah menyurati kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana posisi belanja pegawai yang ada di 35 provinsi kota dan provinsi, hampir semua kabupaten kota melebihi 30 persen (dari total APBD)," terangnya.

Ketika disinggung daftar penerima tambahan alokasi dana itu, Dwi mengungkapkan belum memiliki data secara detailnya.

Namun, ia sementara hanya bisa merinci penerima dana kurang DBH sebanyak 16 kabupaten/kota meliputi Brebes, Kebumen, Pemalang, Banjarnegara, Sragen, Blora, Purbalingga, Pati, Tegal.

Berikutnya Wonogiri, Pekalongan, Karanganyar, Wonosobo, Tegal, Temanggung, dan Rembang.

"Kalau rincian detail per alokasinya itu ada di masing-masing sistem di Pemda," terangnya.

Selepas Pemda menerima dana tambahan itu, Dwi berharap tidak ada lagi kendala dalam pembayaran gaji PPPK maupun tunjangan ASN di Jateng.

Ia mengakui, sebelumnya hampir seluruh Pemda alami kesulitan membayar gaji dan tunjangan bagi para pegawai tersebut.

Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Alokasi TKD di Jateng dipangkas sebesar Rp11 triliun dengan rincian Pemprov Jateng Rp1,5 triliun sisanya sebesar Rp9,5 triliun dipangkas dari APBD 35 Pemda kabupaten/kota.

"Harapannya seluruh Pemda melakukan kalkulasi kembali kemudian melakukan verifikasi terkait kebutuhan riil para pegawainya," jelasnya. (Iwn)

## **Panen Melimpah, Harga Bawang Merah di Pati Anjlok jadi Rp 18.000 per Kilogram**

Sabtu, 22 Agustus 2026 16:25 WIB

Penulis: Mazka Hauzan Naufal, Editor: Muh Radlis

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1263992/panen-melimpah-harga-bawang-merah-di-pati-anjlok-jadi-rp-18000-per-kilogram>

TRIBUNJATENG.COM, PATI — Memasuki masa panen raya, para petani bawang merah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harus menghadapi kenyataan pahit terkait merosotnya harga jual komoditas tersebut di pasaran.

Saat ini, harga bawang merah di tingkat petani hanya berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per kilogram, anjlok drastis jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per kilogram.

Sementara itu, harga di tingkat tengkulak saat ini berada di rentang Rp 20.000 sampai Rp 22.000 per kilogram.

Situasi tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh Kusno, seorang petani asal Desa Sumberarum, Kecamatan Jaken.

Hari-hari ini ia tengah sibuk memanen brambang di lahan miliknya seluas 4.000 meter persegi.

Dari bibit sebanyak 2,5 kuintal yang dia tanam sejak Juni 2026 lalu, ia berhasil memetik hasil produksi mencapai sekitar 4 ton setelah tanaman memasuki usia 65 hari.

"Panen bawang merah dengan luasan sawahnya 4.000 meter persegi. Bibit bawang merah 2,5 kuintal, hasil produksi kurang lebih 4 ton," tutur Kusno, Sabtu (22/8/2026).

Ia menambahkan bahwa seluruh proses panen di lahannya telah rampung hari itu dan hasilnya siap dilepas ke tangan tengkulak.

Kondisi pertanian di wilayah tersebut juga diamini oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jaken, Endrawati.

Ia menjelaskan bahwa puluhan kelompok tani (poktan) di wilayahnya membudidayakan bawang merah dengan varietas Thailand atau Tajuk serta jenis Bauji, kendati waktu tanam yang dilakukan petani tidak bisa serempak.

"Di Jaken tanam bawang merah tidak bisa serempak, saat ini sebagian panen dan sebagian umur kurang dari satu bulan. Saat ini bawang merah yang ditanam karena musim kemarau adalah jenis Thailand atau Tajuk. Ada juga jenis Bauji yang baru umur sebulan," papar Endrawati.

Dia membeberkan bahwa karakteristik lahan tadah hujan di Kecamatan Jaken justru menjadi keunggulan tersendiri, karena menghasilkan bawang merah dengan warna yang lebih memikat, aroma yang lebih kuat, serta rasa yang lebih gurih.

Selain itu, minimnya serangan hama pada musim tanam kali ini membuat pertumbuhan umbi sangat optimal, berukuran besar, dan memiliki bobot yang ideal.

"Untuk musim tanam sekarang alhamdulillah pertumbuhan baik, sedikit hama penyakit sehingga hasilnya bagus, besar-besar, dan bobotnya masuk. Untuk segi budidaya sangat berbeda, apalagi musim kemarau dengan pengairan sumur dangkal, penyiraman manual dengan selang. Dan saat ini sudah beralih dengan penggunaan mulsa," lanjut Endrawati.

Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan air tanah melalui sumur dangkal terbukti mampu mencukupi kebutuhan irigasi tanaman selama musim kemarau.

Efektivitas budidaya tersebut turut ditopang oleh peralihan pola tanam petani setempat yang kini telah memanfaatkan media mulsa secara optimal.

Namun, melimpahnya kuantitas dan tingginya kualitas hasil panen tersebut kini harus berhadapan dengan tren penurunan harga yang cukup tajam di tingkat petani. (mzk)

# Standar Ketat China Jadi Kendala Ekspor dari Jateng, Pengusaha Pernah Diminta Tes Lab

Sabtu, 22 Agustus 2026 16:19 WIB

Penulis: Budi Susanto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1263991/standar-ketat-china-jadi-kendala-ekspor-dari-jateng-pengusaha-pernah-diminta-tes-lab>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Standar ketat China menjadi salah satu persoalan yang disampaikan pelaku usaha ekspor-impor Jawa Tengah dalam penjangkauan aspirasi masyarakat yang digelar di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 40 perusahaan pelaku ekspor-impor di Jawa Tengah. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding meminta para pelaku usaha menyampaikan kendala yang berkaitan dengan regulasi, pelayanan maupun proses pemeriksaan karantina.

Salah satu persoalan disampaikan Henry dari PT Bait Citra Abadi, pelaku usaha sarang burung walet.

Henry mengatakan persyaratan ekspor ke China semakin ketat, terutama terkait kualitas produk dan hasil pemeriksaan laboratorium.

"Persyaratan dari Cina semakin lama semakin sulit. Kita dituntut semakin meningkatkan kualitas produk, terutama dari hasil tes lab," kata Henry kepada Tribun Jateng.

Menurut Henry, sejumlah parameter memiliki batas yang sangat ketat, termasuk aluminium dan nitrit.

Kondisi tersebut membuat proses pengawasan harus dilakukan sejak bahan baku hingga produk jadi.

"Kami harus menjaga dari hulu sampai hilir, bahkan dari rumah burung dan sumber-sumber bahan," ujarnya.

Bahan baku sarang burung walet yang digunakan perusahaan, kata Henry, berasal dari sejumlah daerah di luar Jawa, termasuk Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.

Henry mengatakan proses perizinan di dalam negeri sejauh ini tidak menjadi kendala utama.

Ia juga menilai koordinasi antara pelaku usaha dengan Badan Karantina berjalan baik.

"Perizinan tidak ada kendala. Selama ini kinerja Badan Karantina, koordinasi antara pengguna jasa dan Badan Karantina juga baik," katanya.

Pengajuan pemeriksaan dilakukan secara daring. Menurut Henry, petugas biasanya datang untuk melakukan pemeriksaan sekitar dua hingga tiga hari setelah pengajuan.

Namun, persoalan muncul ketika produk telah sampai di negara tujuan.

Henry mengatakan perusahaannya pernah mengalami produk yang terkena suspend setelah hasil pemeriksaan di China menunjukkan kandungan yang melewati ambang batas.

Peristiwa tersebut terjadi pada 2025. Produk yang diperiksa saat itu sekitar 50-60 kilogram.

"Setiap batch diperiksa. Kebetulan waktu itu lewat ambang batas," ujarnya.

Menurut Henry, kejadian tersebut hanya berlangsung satu kali.

"Satu kali itu, sudah mereka sangat ketat. Satu kali enggak lolos langsung kena suspend," katanya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding membenarkan adanya perusahaan walet di Jawa Tengah yang terkena suspend terkait standar China.

"Walet Jawa Tengah ada. Ada yang di-suspend, tapi lagi kita dorong supaya diperbaiki," kata Karding.

Ketika ditanya jumlah perusahaan yang terdampak, Karding menyebut sekitar satu hingga dua perusahaan.

"Menurut Cina begitu. Tapi akan kita dorong lakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya.

Karding mengatakan standar yang ditetapkan negara tujuan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh eksportir.

"Cina tentu punya standar yang mau tidak mau harus kita ikuti. Kita ikuti itu. Itu kewenangannya di mereka," katanya.

Ia mengatakan pemerintah juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar produk yang diekspor memenuhi persyaratan negara tujuan.

"Kami lakukan pendampingan kepada para pengusaha agar bagaimana caranya standar-standar itu bisa paralel atau sama dengan kebutuhan pembeli yang ada di luar negeri," ujarnya.

Dalam penjaringan aspirasi tersebut, Karding mengatakan pihaknya juga meminta masukan mengenai pelayanan Badan Karantina.

Menurutnya, terdapat lebih dari 40 perusahaan yang hadir dan menyampaikan berbagai persoalan terkait ekspor-impor.

"Ada 40 lebih perusahaan yang bertemu untuk mendiskusikan yang pertama, adakah aturan-aturan regulasi karantina yang selama ini dianggap belum mendukung kelancaran ekspor-impor dan perdagangan," kata Karding.

Selain regulasi, pelaku usaha juga diminta memberikan masukan mengenai pelayanan yang dinilai masih perlu diperbaiki.

Karding mengatakan Badan Karantina akan meningkatkan penggunaan sistem digital dalam pelayanan.

"Prinsipnya, saya menegaskan ke depan kita lebih banyak menggunakan digital," ujarnya.

Ia juga menyebut persoalan sistem satu data masih perlu dikoordinasikan dengan operator terkait apabila terjadi perlambatan.

Selain sistem, Karding menyoroti proses inspeksi atau pemeriksaan di lapangan.

Menurut dia, akan dibuat sistem yang mencatat setiap perintah inspeksi atau pemeriksaan beserta batas waktu pelaksanaannya.

"Semua perintah inspeksi ataupun pemeriksaan itu ada tanggalnya dan ada maksimum waktunya," katanya.

Karding juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap pungutan liar di lingkungan Badan Karantina.

Ia mengatakan hingga kegiatan penjaringan aspirasi tersebut belum menerima laporan mengenai pungli dari pelaku usaha.

"Pungli alhamdulillah ini enggak ada laporan," ujarnya.

Karding meminta pelaku usaha tetap menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pungutan liar.

Menurutnya, petugas yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari penurunan pangkat, pemecatan hingga proses pidana.

"Zero toleransi itu artinya kalau ada yang melanggar, kena masalah," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Karding juga menyebut nilai ekspor Jawa Tengah pada 2026 sekitar Rp10,9 triliun berdasarkan data yang disampaikan dalam forum.

Sejumlah komoditas disebut menjadi bagian dari ekspor Jawa Tengah, di antaranya sarang burung walet, gula merah, salak dan produk kayu.

Karding menyebut nilai ekspor Jawa Tengah mengalami peningkatan.

"Meningkat, meningkat, bagus ini. Neracanya bagus ini," ucapnya. (bud)

## **AS Kenakan Tarif 50% ke Kanada, Bakal Ada Aksi Balas Dendam**

Minggu, 23 Agustus 2026 07:55 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119218/as-kenakan-tarif-50-ke-kanada-bakal-ada-aksi-balas-dendam/2>

Bloomberg, Dialog perdagangan Amerika Serikat-Kanada menemui jalan buntu tepat sebelum batas waktu tengah malam, dengan tarif 50% diberlakukan terhadap barang-barang Kanada senilai miliaran dolar dan Perdana Menteri Mark Carney berjanji akan membalas dalam sengketa yang tampaknya akan semakin memanas.

Pajak impor AS mulai berlaku pada hari Sabtu terhadap ratusan barang dari Kanada, seperti kayu lapis, minuman beralkohol, peralatan listrik, dan perlengkapan hoki, dengan total sekitar US\$20 miliar. Pemerintahan Trump untuk pertama kalinya menggunakan kewenangan era Depresi untuk membenarkan langkah tersebut.

Produk Made in Canada, di tengah tingginya tensi kebijakan ekonomi Amerika-Kanada. dok: Bloomberg

Carney mengatakan ia menangguk pembicaraan dengan Washington dan bahwa pemerintahnya akan membalas tarif tersebut "dolar demi dolar untuk melindungi pekerja dan bisnis kami." Jika ia melakukannya, pejabat AS berjanji akan mengajukan opsi-opsi kepada Presiden Donald Trump untuk meningkatkan eskalasi.

Kedua negara saling menyalahkan atas gagalnya negosiasi tersebut. Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan bahwa para negosiator Kanada mengajukan tuntutan pada menit-menit terakhir yang menggagalkan draf kesepakatan yang telah dirumuskan selama beberapa hari negosiasi.

"Walau AS menawarkan Kanada perlakuan terbaik di antara semua eksportir utama ke pasar kami, tuntutan baru dan penarikan kembali komitmen lain oleh Kanada telah merusak keseimbangan yang telah dicapai dengan hati-hati dalam beberapa hari terakhir," kata Greer dalam sebuah pernyataan.

Greer mengatakan dalam wawancara dengan Fox News pada hari Sabtu bahwa AS "sedang mengambil langkah-langkah sebagai tanggapan atas tindakan balasan Kanada," namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini belum ada jadwal pembicaraan baru dengan Kanada.

Sementara itu, Carney sebut bahwa justru AS yang telah mengubah posisinya, dengan mengatakan, “Perubahan mendadak pada syarat-syarat yang diusulkan AS itu tidak adil, tidak ekonomis, dan menimbulkan keraguan terhadap keandalan kesepakatan apa pun.”

Belum diketahui jelas sektor mana di AS yang akan menjadi sasaran Carney dalam tindakan balasannya, maupun seberapa cepat AS akan mengambil langkah tambahan sebagai balasan. Namun, manuver di menit-menit terakhir ini menandakan potensi eskalasi konflik perdagangan antara dua ekonomi yang memiliki rantai pasokan yang sangat terintegrasi, terutama di sektor otomotif, energi, dan pertanian.

“Kanada dan AS memproduksi mobil bersama — kami telah melakukannya selama lebih dari satu abad,” kata mantan Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland kepada program Wall Street Week With David Westin di Bloomberg Television. “Menerapkan tarif permanen pada mobil dan suku cadang mobil benar-benar akan merugikan Detroit.”

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim pada Jumat malam, mengatakan tidak ada pembicaraan baru yang dijadwalkan. Pihak pemerintah akan memberikan opsi kepada Trump untuk menyeimbangkan persaingan jika Kanada melakukan pembalasan, kata pejabat tersebut.

### **Situasi Memanas**

Kebuntuan ini meningkatkan ketegangan antara dua sekutu lama yang melakukan perdagangan barang dan jasa senilai hampir US\$900 miliar tahun lalu. Selain memberlakukan tarif, Trump pernah secara terbuka mempertimbangkan untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS, menyebut para perdana menteri Kanada sebagai “gubernur”, dan mengklaim bahwa negara tersebut tidak akan bisa bertahan tanpa AS.

Trump telah terburu-buru pada Selasa malam, ketika ia mengumumkan—kurang dari dua jam sebelum tarif tersebut semula dijadwalkan berlaku—bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang hanya tinggal menunggu “penyelesaian dokumen”. Pejabat Kanada kemudian menyatakan bahwa masih ada poin-poin penting yang perlu diselesaikan.

Kedua belah pihak telah membahas kesepakatan yang mencakup penurunan tarif atas baja dan aluminium Kanada tertentu menjadi 25%, pemotongan bea masuk atas mobil Kanada menjadi 15%, serta penghapusan tarif kayu sebesar 10%. Pejabat AS tersebut mengatakan pembicaraan berakhir ketika Kanada meminta konsesi tambahan di beberapa bidang tersebut, namun menolak menyebutkan bidang mana saja.

Namun, draf kesepakatan tersebut tidak luput dari kritik. Industri baja dan aluminium AS menolak langkah-langkah yang akan melemahkan posisi mereka. Carney lantas menghadapi reaksi negatif di Kanada atas konsesi yang siap ia berikan, yang pada dasarnya akan mengukuhkan tarif yang telah lama dinyatakan ilegal oleh Kanada, meskipun pada tingkat yang lebih rendah.

Perselisihan perdagangan ini menghadirkan tantangan baru bagi Trump, yang tengah menghadapi penurunan popularitas dalam jajak pendapat dan konflik berkepanjangan dengan Iran menjelang pemilihan sela pada November mendatang.

Perselisihan dengan Kanada — sumber impor terbesar kedua AS — berpotensi memperparah kekhawatiran pemilih terkait harga-harga yang tinggi dan semakin memperumit langkah bank sentral AS Federal Reserve, di saat pemerintahan berusaha menstabilkan pasar obligasi dan menurunkan biaya pinjaman.

Dalam pernyataannya pada Jumat malam, Greer menegaskan bahwa kesepakatan tersebut akan menurunkan tarif atas mobil, baja, aluminium, dan kayu, serta mendorong kedua negara untuk bekerja sama dalam hal kontrol ekspor, perdagangan digital, dan tarif bersama tertentu yang tidak ia sebutkan secara rinci.

Keduanya juga akan memulai negosiasi resmi untuk memperbarui Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang dinegosiasikan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya namun ditolak untuk diperbarui awal tahun ini, sehingga perjanjian tersebut memasuki masa tinjauan berkala selama satu dekade.

## **Detail Balasan Kanada Pasca AS ‘Bombardir’ Tarif Perdagangan**

Minggu, 23 Agustus 2026 10:22 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119225/detail-balasan-kanada-pasca-as-bombardir-tarif-perdagangan/2>

Bloomberg, Perdana Menteri Mark Carney mengatakan Kanada akan menerapkan tarif balasan terhadap produk-produk Amerika Serikat senilai US\$20 miliar (sekitar Rp353,8 triliun) pada 8 September, yang semakin memperparah perselisihan yang mengguncang salah satu hubungan perdagangan terbesar di dunia.

“Kami mengambil langkah ini dengan berat hati,” kata Carney pada Sabtu waktu setempat, sambil mengakui bahwa hal ini akan menaikkan biaya dan mengurangi pilihan bagi warga Kanada, merugikan perusahaan-perusahaan AS yang tidak bersalah, serta mempersulit kerja sama antara kedua negara.

Carney mengatakan ia hanya memiliki opsi yang minim usai pembicaraan perdagangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump menemui jalan buntu pada Jumat malam, dan AS memberlakukan pajak impor sebesar 50% atas barang-barang seperti kayu lapis, minuman beralkohol, peralatan listrik, dan perlengkapan hoki dari Kanada.

“Anda berada dalam keadaan perang ketika Anda diserang,” kata Carney kepada wartawan di Ottawa. “Kami telah diserang.”

Keputusan untuk melakukan pembalasan mengukuhkan Kanada sebagai salah satu dari hanya dua negara yang membalas serangan dengan serangan di hadapan tarif AS. Yang lainnya adalah China.

Seiring Trump memberlakukan tarif baru dengan klausul yang belum pernah digunakan sebelumnya dari undang-undang tahun 1930, perlawanan Kanada, serta cara AS menanggapi hal tersebut, akan diawasi dengan cermat.

Langkah berisiko Carney ini mengingatkan kita pada bagaimana ia tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan tahun lalu: berkampanye dengan keras untuk memimpin perlawanan terhadap Trump, yang memulai masa jabatan keduanya dengan menyatakan ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 dengan “kekuatan ekonomi.”

Carney, yang dua kali menjabat sebagai gubernur bank sentral, telah menghabiskan sebagian besar masa jabatannya hingga kini dengan mencoba pendekatan yang mengedepankan rekonsiliasi dengan AS, sekaligus mendiversifikasi ekonomi Kanada.

Carney mencabut tarif balasan yang diberlakukan oleh pendahulunya, Justin Trudeau, menghapus pajak layanan digital yang membuat Trump kesal, dan menegosiasikan ulang kesepakatan yang menguntungkan AS untuk membuka jembatan yang menghubungkan Detroit dengan Windsor, Ontario.

Taktik itu belum membantu tercapainya kesepakatan. Pada hari Sabtu, Trump menggunakan kewenangan era Depresi yang dikenal sebagai Pasal 338 untuk memberlakukan tarif atas barang-barang Kanada dengan total sekitar US\$20 miliar dalam impor tahunan AS.

Kini Carney kembali ke langkah yang diambil Trudeau pada Maret 2025: tarif balasan besar-besaran, yang dimaksudkan untuk menyamai tarif Trump dalam hal nilai dolar. Tarif Kanada tersebut akan berlaku untuk baja, produk susu, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, elektronik, pulp, dan kertas AS, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, kata perdana menteri.

Dengan membalas, Carney mengambil risiko ekonomi dan politik, menyeimbangkan penderitaan jangka pendek dengan strategi jangka panjang. Pejabat AS mengindikasikan pada Jumat bahwa jika Kanada membalas, mereka memiliki opsi untuk meningkatkan eskalasi — meningkatkan kemungkinan perang dagang yang semakin memanas antara dua negara yang bertukar barang dan jasa senilai hampir US\$900 miliar tahun lalu.

Carney mengatakan pembicaraan itu gagal karena sejumlah alasan. Salah satunya terkait tarif mobil yang diberlakukan Trump, yang ditetapkan sebesar 25% atas komponen non-AS dalam kendaraan buatan Kanada. Tim negosiasi membahas penurunan tarif tersebut menjadi 15%, namun AS tidak ingin memperluas keringanan tarif tersebut ke truk kelas menengah hingga berat, seperti jenis yang saat ini sedang diproduksi di pabrik Ford Motor Co. di pinggiran kota Toronto.

AS juga berusaha membatasi perjanjian perdagangan Kanada dengan negara-negara lain serta mengajukan tuntutan terkait isu budaya dan bahasa Prancis yang tidak dapat diterima, kata Carney.

Ia menambahkan bahwa ketegangan ini bukanlah kabar baik bagi perundingan seputar Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (US-Mexico-Canada Agreement/USMCA), yang memasuki tahap tinjauan berkala setelah Trump menolak memperpanjangnya pada bulan Juli.

### **Peta Arah Berubah**

Setelah berbulan-bulan tampak enggan membicarakan negosiasi AS yang rumit dan berisiko tinggi, Carney mengubah arah pada hari Sabtu dan menghidupkan kembali nada yang ia gunakan dalam pidatonya yang banyak disaksikan pada bulan Januari di Forum Ekonomi Dunia di Davos, mendesak negara-negara menengah untuk berkolaborasi dan menentang paksaan dari negara-negara adidaya, yang saat itu memicu teguran dari Trump.

Carney mengecam AS karena melanggar perjanjian perdagangan USMCA dengan memberlakukan tarif selama 18 bulan terakhir. Carney hari Sabtu juga menuding Gedung Putih terus-menerus mengubah alasan di balik langkah-langkah perdagangannya, termasuk perdagangan gelap fentanyl, kebijakan produk susu Kanada, iklan televisi yang tidak disukai Trump, asap kebakaran hutan, dan defisit perdagangan.

“Pemerintah kami telah memahami lebih awal daripada banyak pihak bahwa Amerika akan mengubah seluruh hubungan dagangnya, bahwa mereka akan memberlakukan serangkaian tarif terhadap sekutu terdekatnya, dan menggunakan integrasi ekonomi sebagai senjata,” kata perdana menteri tersebut. “Kami menyadari bahwa terkadang tanda tangannya ditulis dengan pensil.”

AS adalah pasar ekspor terbesar Kanada sejauh ini, dengan minyak, kendaraan, dan suku cadang mobil sebagai kategori terbesar. Defisit perdagangan AS dengan Kanada didorong oleh impor minyak mentah dalam jumlah besar, terutama dari Alberta.

“Kanada mendorong pertumbuhan Amerika: memasok 99% impor gas alam, 85% impor listrik, dan 60% impor minyak mentah mereka. Saya rasa mereka tidak ingin kami berhenti mengirimkannya,” tegas Carney.

Kanada juga merupakan pembeli terbesar barang dan jasa AS selain Uni Eropa, menurut data dari Departemen Perdagangan AS.

Pemimpin tertinggi Ontario, provinsi terpadat di Kanada, Doug Ford, ikut angkat bicara setelah beberapa hari diam dan mendukung Carney dalam hal pembalasan setimpal. Dalam surat kepada perdana menteri awal pekan ini yang baru dipublikasikan pada Sabtu, ia menyoroti aset energi dan mineral kritis Kanada sebagai poin tawar-menawar, dan ia juga mengusulkan tarif tambahan terhadap produk dari negara bagian yang “signifikan secara politik” bagi Trump, seperti Florida, Texas, Iowa, dan Wisconsin.

“Produk-produk dari negara bagian tersebut harus menghadapi respons penuh dari Kanada,” tulis Ford dalam suratnya, yang sebelumnya pernah berselisih dengan Trump terkait upaya mengenakan pajak atas pembelian listrik Ontario oleh AS, serta menayangkan iklan anti-tarif di seberang perbatasan.

Ilustrasi peternakan sapi perah di Gilbertson Family Farm di Elk Mound, Wisconsin, AS. dok: Tim Evans/Bloomberg

Survei menunjukkan Carney mendapat dukungan publik yang luas untuk melawan taktik perdagangan agresif AS. Sebuah jajak pendapat terhadap warga Kanada yang diterbitkan minggu ini oleh Leger Marketing menemukan bahwa 56% responden ingin pemerintah “mengambil sikap tegas dan tidak memberikan konsesi lagi.”

Jajak pendapat yang sama juga menemukan dukungan terhadap langkah-langkah seperti pajak ekspor atas energi yang dibeli AS dari Kanada serta pajak khusus atas layanan AS seperti Netflix.

Jason Kenney, mantan Perdana Menteri Alberta dan saingan politik Partai Liberal pimpinan Carney, memuji perdana menteri tersebut karena memutuskan untuk mundur dari negosiasi.

“Kanada jelas telah melakukan upaya serius dan dengan itikad baik untuk mencapai stabilitas yang lebih besar serta akses pasar yang lebih luas, dan tetap siap untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang,” kata Kenney dalam sebuah postingan di media sosial. “Namun, kami tidak akan menyerah begitu saja di hadapan agresi ekonomi dan politik yang terus-menerus.”

Banyak warga Kanada kemungkinan akan terus melakukan tindakan balasan dengan cara mereka sendiri — dengan sedikit dorongan dari para politisi terpilih — dengan menghindari perjalanan ke selatan dan memboikot produk-produk AS. Jumlah wisatawan Kanada ke AS telah menurun tajam sejak Trump kembali ke Gedung Putih, yang berdampak buruk pada negara bagian perbatasan dan destinasi wisata seperti Las Vegas.

Saat ditanya apakah sebagian pertimbangannya dalam melakukan tindakan balasan didasarkan pada angka jajak pendapat dan pasar obligasi AS, yang imbal hasilnya telah melonjak, Carney mengatakan tidak. Namun, ia menambahkan: “Pasar terkadang mengabaikan faktor-faktor fundamental ini, dan kemudian tiba-tiba mereka fokus padanya.”

## **Dolar AS Melemah, Rupiah Berpotensi Menguat Terbatas pada Senin (24/8)**

Minggu, 23 Agustus 2026 10:46 WIB

Reporter: Muhammad Fatih, Editor: Avanty Nurdiana

<https://investasi.kontan.co.id/news/dolar-as-melemah-rupiah-berpotensi-menguat-terbatas-pada-senin-248>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rupiah berpotensi menguat tipis pada perdagangan awal pekan. Penguatan ini berkat pelemahan indeks dolar Amerika Serikat (AS) serta sokongan transmisi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.

Mengutip data Bloomberg pada Jumat (21/8/2026), mata uang Garuda ditutup menguat 0,30% atau 54 poin ke level Rp 17.694 per dolar AS. Sementara nilai kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia menguat 0,42% dari Rp 17.779 menjadi Rp 17.705 per dolar AS.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan bahwa laju apresiasi rupiah pada akhir pekan lalu utamanya ditopang oleh penurunan indeks DXY ke kisaran 98,73 seiring langkah Departemen Keuangan AS memperluas program buyback obligasi jangka panjang dan masih tingginya ketidakpastian arah kebijakan The Fed.

Dari dalam negeri, keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 5,75% menjaga daya tarik imbal hasil aset domestik, yang tercermin dari masuknya net inflow portofolio asing triwulan III sebesar US\$ 1,8 miliar hingga pertengahan Agustus.

Langkah BI memberikan insentif swap lindung nilai dan menjaga stabilitas pasar valas turut menjadi penyangga bagi pergerakan rupiah.

Meski demikian, tingginya yield US Treasury 10 tahun di kisaran 4,71% dan harga minyak Brent di atas US\$93 per barel menandakan bahwa pasar belum sepenuhnya aman.

"Penutupan Rp 17.694 lebih tepat dibaca sebagai penguatan berbasis pelemahan dolar dan dukungan kebijakan domestik, bukan perubahan rezim menuju apresiasi panjang," ungkap Syafruddin kepada Kontan, Jumat (21/8/2026).

Memasuki perdagangan Senin (24/8/2026), pergerakan rupiah akan sangat bergantung pada respons pasar global selama akhir pekan terhadap dinamika DXY, rilis data ekonomi AS, serta eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang berisiko melambungkan harga minyak mentah.

Di sisi lain, instrumen pro-pasar seperti SRBI dan SBN diperkirakan masih sanggup menahan potensi arus modal keluar. "Indikator pembuka Senin yang paling penting ialah DXY, UST 10Y, Brent, dan arus portofolio," tambah Syafruddin.

Untuk perdagangan Senin (24/8/2026), Syafruddin memproyeksikan rupiah bergerak pada kisaran dasar Rp 17.620–Rp 17.780 per dolar AS dengan titik keseimbangan awal di Rp 17.680–Rp 17.720 per dolar AS.

Jika DXY terus melemah dan aliran modal asing mengalir deras ke SRBI, rupiah berpeluang masuk skenario kuat di rentang Rp 17.550–Rp 17.620, namun risiko risk-off dapat menekan nilai tukar menuju Rp 17.800–Rp 17.900 per dolar AS.

## **Ekonomi Tertekan, Jerman Pacu Reformasi untuk Dongkrak Pertumbuhan**

Minggu, 23 Agustus 2026 07:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-tertekan-jerman-pacu-reformasi-untuk-dongkrak-pertumbuhan>

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Kanselir Jerman Friedrich Merz akan mendorong kabinetnya untuk mempercepat reformasi yang bertujuan meringankan beban dunia usaha dan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan Bild am Sonntag pada Minggu (23/8/2026), Merz akan menjadikan percepatan reformasi tersebut sebagai fokus utama dalam rapat kabinet yang akan digelar pekan depan di Neuhardenberg, Brandenburg.

"Yang dipertaruhkan di Jerman adalah pertumbuhan dan lapangan kerja. Itu adalah isu paling penting," kata Merz kepada surat kabar tersebut menjelang pertemuan kabinet.

Merz, yang merupakan pemimpin Partai Uni Demokrat Kristen (CDU) yang berhaluan konservatif, berencana mengarahkan para menteri untuk segera menjalankan sejumlah reformasi yang telah disepakati sebelum masa reses musim panas.

Reformasi tersebut mencakup kebijakan perpajakan, pensiun, deregulasi, hingga digitalisasi.

"Kami telah membuat keputusan bersejarah sebelum masa libur musim panas. Sekarang keputusan tersebut harus diimplementasikan secepat mungkin," ujar Merz.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Jerman memprioritaskan pemberian keringanan ekonomi secara cepat dan menyeluruh. Kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk membantu para pelaku usaha, pengrajin, serta perusahaan kecil dan menengah.

Langkah tersebut dilakukan ketika pemerintah Jerman berupaya mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan menjaga penciptaan lapangan kerja di tengah tantangan yang masih membayangi perekonomian negara tersebut.

## **APBD 2026 Direvisi, Ekonom Sebut Daerah Mulai Hadapi Tekanan Fiskal**

Minggu, 23 Agustus 2026 16:00 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/apbd-2026-direvisi-ekonom-sebut-daerah-mulai-hadapi-tekanan-fiskal>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mulai menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyesuaian tersebut terjadi di tengah perubahan kemampuan fiskal daerah, terutama akibat koreksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Di sejumlah daerah, penurunan transfer membuat pemda harus merasionalisasi belanja, sementara daerah dengan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kuat masih memiliki ruang untuk mempertahankan belanja pembangunan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai perubahan postur APBD tersebut menjadi tanda menguatnya tekanan fiskal di daerah.

Menurutnya, sejumlah pemda mulai melakukan penyesuaian karena khawatir terjadi defisit hingga mengganggu pemenuhan layanan dasar dan pembayaran belanja pegawai.

"Ini sebenarnya tanda-tanda tekanan fiskal yang menguat di daerah. Karena di daerah pada akhir 2026, sisa beberapa bulan lagi, tapi karena ada kekhawatiran terjadinya defisit di daerah, bahkan juga terkait dengan jalannya layanan dasar dan gaji belanja pegawai yang direkrut oleh pemerintah daerah," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (23/8/2026).

Persoalannya, lanjut Bhima, pemda juga tidak mudah meningkatkan pendapatan di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih menghadapi tekanan.

Kenaikan pendapatan melalui pajak maupun pungutan daerah berpotensi menambah beban masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya siap.

"Kalau pendapatan yang dinaikkan dengan kondisi ekonomi seperti sekarang yang ada di daerah, tentunya banyak masyarakat, pelaku usaha juga tidak akan siap," ujarnya.

Bhima juga menyoroti belum jelasnya dukungan pemerintah pusat untuk membantu daerah yang menghadapi tekanan fiskal. Termasuk adanya wacana agar penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Menurut dia, daerah yang paling rentan adalah daerah pemekaran dan daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap Transfer ke Daerah (TKD).

"Situasi di daerah, terutama daerah-daerah yang pemekaran, daerah-daerah yang porsi dana transfer dari pusat yang masih cukup besar bergantung di situ, itu yang paling terdampak," katanya.

Tekanan tersebut, menurut Bhima, tidak hanya menjadi persoalan APBD 2026. Kondisi fiskal yang semakin sempit berpotensi berlanjut ke 2027.

Ia khawatir sejumlah pemda akan menahan pengadaan maupun proyek pembangunan pada awal 2027 karena ruang fiskal yang terbatas.

Jika kondisi tersebut sampai mengganggu layanan dasar dan aktivitas birokrasi, dampaknya dapat meluas ke perekonomian daerah.

Belanja pemerintah daerah selama ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap belanja pemerintah.

"Kalau sampai ganggu layanan dasar, masyarakat, kemudian ganggu jalannya birokrasi di daerah, maka pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah nanti akan dikorbankan," kata Bhima.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perubahan KUA dan PPAS 2026 tidak semata-mata merupakan penyesuaian administratif.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah mulai menyempit.

Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang sementara belanja pegawai dan belanja wajib tetap harus dipenuhi, pemda cenderung menahan atau merasionalisasi belanja yang lebih fleksibel.

Kondisi tersebut terlihat dari realisasi pendapatan daerah hingga Juli yang masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara belanja berjalan relatif lebih cepat.

Tambahan transfer seperti kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) memang membantu, tetapi lebih berfungsi sebagai penyangga jangka pendek.

Oleh karena itu, Yusuf menilai perubahan KUA dan PPAS pada Agustus menjadi momentum bagi pemda untuk menyesuaikan target pendapatan dan belanja dengan capaian yang realistis hingga akhir tahun.

Namun, tekanan fiskal tidak terjadi secara merata. Daerah dengan basis PAD yang kuat masih memiliki ruang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan belanja pembangunan. Sebaliknya, daerah yang sangat bergantung pada TKD menghadapi pilihan yang lebih sulit.

Ketika belanja pegawai, termasuk PPPK, dan mandatory spending harus tetap berjalan, belanja yang biasanya menjadi sasaran pengurangan adalah belanja modal, pemeliharaan, serta kegiatan yang secara langsung menggerakkan ekonomi lokal.

Yusuf menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena jika berlangsung berulang, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat akan semakin kuat dan ruang untuk melakukan investasi produktif semakin sempit.

"Solusi jangka panjangnya bukan hanya menambah transfer ketika tekanan muncul, tetapi memperkuat PAD, meningkatkan kualitas administrasi pajak daerah, dan memastikan desain TKD lebih sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan masing-masing daerah," kata Yusuf.

Menurutnya, perubahan KUA dan PPAS 2026 seharusnya menjadi sinyal untuk memperbaiki struktur fiskal daerah, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran hingga akhir tahun.

## **Banyak Pemda Ubah Postur Anggaran 2026, KPPOD Sebut Tekanan Fiskal Daerah Meningkat**

Minggu, 23 Agustus 2026 15:12 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-pemda-ubah-postur-anggaran-2026-kppod-sebut-tekanan-fiskal-daerah-meningkat>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mulai menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyesuaian tersebut terjadi di tengah perubahan kemampuan fiskal daerah, terutama akibat koreksi transfer dari pemerintah pusat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai perubahan postur APBD di sejumlah daerah saat ini tidak sekadar merupakan siklus rutin penganggaran, tetapi juga mencerminkan tekanan fiskal yang terjadi dalam sekitar satu setengah tahun terakhir.

"Kalau melihat kondisi satu setengah tahun terakhir ini memang itu lebih banyak karena persoalan tekanan fiskal akibat dari pemangkasan transfer ke daerah," kata Armand kepada Kontan.co.id, Minggu (23/8/2026).

Menurut dia, dampak perubahan transfer tersebut berbeda-beda antardaerah, bergantung pada kapasitas fiskal dan tingkat ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).

Armand menjelaskan, perubahan APBD 2026 juga dipengaruhi langkah pemerintah pusat menambah Dana Alokasi Umum (DAU) serta membayar kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Tambahan tersebut membuat sebagian daerah memperoleh ruang anggaran lebih besar, baik dari DAU, kurang bayar DBH, maupun keduanya.

Namun, tambahan transfer tersebut dinilai belum banyak mengubah program prioritas daerah. Pasalnya, tambahan anggaran lebih banyak diarahkan untuk mengatasi kebutuhan gaji dan belanja pegawai.

"Yang ditambahkan oleh pemerintah pusat kemarin itu lebih banyak pada upaya untuk mengatasi masalah gaji atau belanja pegawai. Memang itu juga tidak menimbulkan perubahan berarti pada program-program prioritas daerah," katanya.

Di sisi lain, daerah yang mengalami tekanan fiskal terpaksa melakukan penyesuaian belanja. Kondisi ini terutama terjadi pada daerah yang masih mengandalkan TKD sebagai sumber penerimaan utama dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penelusuran KONTAN, pola tersebut terlihat di sejumlah daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, memangkas proyeksi pendapatan dalam perubahan KUA-PPAS 2026 sekitar Rp 684,12 miliar menjadi Rp 4,53 triliun. Penurunan pendapatan tersebut diikuti dengan pengurangan belanja sekitar Rp 624,4 miliar.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Madiun yang mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat.

Sementara Kabupaten Banggai Laut juga memangkas proyeksi pendapatan Rp 26,18 miliar menjadi Rp 559,48 miliar, terutama karena transfer turun sekitar Rp 26,11 miliar.

Meski demikian, tidak seluruh daerah mengalami tekanan yang sama. Kabupaten Badung dan Kota Palangka Raya justru mencatat peningkatan pendapatan dalam perubahan KUA-PPAS 2026, sehingga memiliki ruang lebih besar untuk menambah belanja.

Armand menilai kondisi tersebut menunjukkan besarnya pengaruh TKD terhadap fleksibilitas fiskal daerah. Menurutnya, sekitar 90% dari 540 kabupaten, kota, dan provinsi memiliki kapasitas fiskal yang rendah.

"Artinya transfer ke daerah itu betul-betul berpengaruh ke fleksibilitas atau kapasitas fiskal mereka," jelas Armand.

Di tengah tekanan fiskal, sejumlah daerah juga berupaya meningkatkan target PAD. Ia menilai langkah tersebut pada dasarnya wajar dan memang perlu dilakukan, tetapi pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menentukan strategi peningkatan penerimaan.

Menurut dia, peningkatan PAD sebaiknya tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah karena tarif yang berlaku dinilai sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang mesti menjadi catatan adalah caranya. Cara menaikkan PAD-nya itu jangan sampai berdampak negatif terhadap masyarakat," katanya.

Armand mendorong pemda mengoptimalkan sistem pemungutan dan administrasi perpajakan daerah. Potensi penerimaan, kata dia, masih dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sistem pemungutan serta penertiban dan pembaruan data wajib pajak.

Selain pajak dan retribusi, pemda juga dapat mencari sumber penerimaan lain melalui optimalisasi aset daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

"Kalau misalnya pemotongan transfer ke daerah terus dilakukan, yang mereka bisa andalkan sebetulnya adalah pendapatan sendiri, dalam hal ini PAD," jelasnya.

Armand juga menilai ruang fiskal pemerintah daerah pada 2027 masih akan terbatas jika rencana alokasi TKD sebesar Rp 735 triliun tidak berubah.

Ia membandingkan angka tersebut dengan alokasi TKD 2025 yang mencapai sekitar Rp 919 triliun. Sementara TKD tahun ini sekitar Rp 693 triliun dan kemudian meningkat menjadi sekitar Rp 725 triliun setelah adanya sejumlah dinamika fiskal.

Menurutnya, jika TKD 2027 ditetapkan Rp 735 triliun, kenaikannya hanya sekitar Rp10 triliun dibandingkan posisi tahun berjalan.

Tambahan tersebut dinilai belum cukup memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah karena lebih banyak menopang belanja operasional. "Kami sih berharapnya (TKD 2027) itu seperti di TKD 2025. TKD 2025 itu kan Rp 919 triliun," imbuhnya.

Oleh karena itu, KPPOD berharap pemerintah mempertimbangkan peningkatan alokasi TKD 2027 hingga mendekati batas atas kisaran tersebut.

## **DJP Kejar Target Pajak Rp 806 Triliun dari Wajib Pajak Besar pada 2026**

Minggu, 23 Agustus 2026 13:57 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/djp-kejar-target-pajak-rp-806-triliun-dari-wajib-pajak-besar-pada-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 806 triliun dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) pada 2026. Target tersebut setara dengan sekitar 34,4% dari target penerimaan perpajakan nasional.

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Dasto Ledianto mengatakan pencapaian target tersebut akan tetap mengedepankan pendekatan cooperative compliance. Menurutnya, DJP tidak ingin mengejar penerimaan secara membabi buta dengan mengorbankan hubungan dengan wajib pajak.

Dasto menegaskan, pencapaian target penerimaan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan wajib pajak. DJP akan memberikan ruang lebih besar bagi wajib pajak yang telah menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi.

"Jika tingkat kepatuhan Bapak/Ibu berada di kuadran kanan (tinggi), kami tidak perlu setiap tahun menguji melalui pemeriksaan," ujar Dasto dalam keterangan resmi, Minggu (23/8/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi bagian dari perubahan paradigma DJP dari hubungan regulator dan wajib pajak menjadi hubungan kemitraan. Transparansi data menjadi salah satu fondasi agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Dasto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Kanwil DJP WPB bersama KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan KPP Wajib Pajak Besar Empat, Rabu (19/8/2026).

Forum melibatkan 55 pimpinan wajib pajak BUMN strategis, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai perwakilan praktisi, serta media massa.

Pertemuan tersebut mengangkat tema fasilitas nilai buku, Tax Control Framework (TCF), dan kuasa wajib pajak sebagai jembatan bagi restrukturisasi usaha dan peningkatan kepatuhan.

Dasto menekankan bahwa Kanwil DJP WPB terbuka terhadap masukan dari wajib pajak untuk memperbaiki kualitas layanan perpajakan.

Pendekatan cooperative compliance juga diperkuat melalui penerapan TCF. Kerangka tersebut mendorong perusahaan mengintegrasikan sistem perpajakan ke dalam sistem pengendalian internal, termasuk melalui pemetaan General Ledger (GL) dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

DJP menjelaskan bahwa pergeseran menuju TCF diperlukan untuk menghindari pola hubungan yang hanya bertumpu pada pemeriksaan dan perlawanan. Dengan transparansi dan kepastian layanan, DJP berharap kepatuhan dapat dibangun sebelum muncul sengketa.

Pendekatan tersebut dinilai penting di tengah agenda besar pemerintah melakukan streamlining BUMN. Pemerintah tengah mendorong penyederhanaan jumlah entitas BUMN dari 1.074 entitas menjadi sekitar 300 entitas.

## **Defisit Neraca Dagang Indonesia Melebar, BI Makin Sulit Pangkas Suku Bunga Agresif**

Minggu, 23 Agustus 2026 11:01 WIB

Reporter: Vendy Yhulia Susanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-neraca-dagang-indonesia-melebar-bi-makin-sulit-pangkas-suku-bunga-agresif>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) Indonesia melebar signifikan pada kuartal II 2026. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal dan mempersempit ruang Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran moneter secara agresif.

Bank Indonesia mencatat CAD Indonesia mencapai US\$ 12,49 miliar pada kuartal II 2026, setara 3,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Managing Director of Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai pelebaran CAD tersebut memperkuat alasan bagi BI untuk mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas dalam jangka pendek.

"Ke depan, kami memperkirakan CAD akan tetap berada di bawah tekanan karena harga minyak berpotensi terus tinggi, pertumbuhan impor tetap solid, dan penerimaan ekspor berada di bawah tekanan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global," ujar Harry saat dikonfirmasi Kontan, Minggu (23/8/2026).

Menurut Harry, tekanan terhadap transaksi berjalan berpotensi berlanjut seiring potensi kenaikan harga minyak mentah dunia dan peningkatan impor.

Ia juga memperkirakan ekspor komoditas Indonesia ke China akan melemah. Di sisi lain, impor Indonesia berpotensi meningkat karena masuknya produk-produk murah dari China.

Selain itu, depresiasi yuan China sebagai upaya untuk mendorong ekspor negara tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap mata uang regional, termasuk rupiah.

Kondisi tersebut dapat mengurangi penguatan rupiah yang saat ini turut ditopang oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (AS).

Samuel Sekuritas menilai pelebaran CAD terutama disebabkan oleh penurunan tajam surplus neraca barang. Surplus barang Indonesia turun menjadi hanya US\$1,32 miliar pada kuartal II 2026, dari US\$10,52 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut mencerminkan permintaan domestik yang masih tangguh sekaligus meningkatnya biaya impor energi di tengah risiko geopolitik yang meningkat di Timur Tengah.

Kondisi ini sejalan dengan data neraca nasional kuartal II 2026. Ekspor riil barang dan jasa tumbuh 4,13% yoy, sedangkan impor tumbuh jauh lebih cepat, yakni 8,82% yoy.

"Sebagian dari percepatan impor mencerminkan aktivitas dan investasi domestik yang sehat. Namun, impor yang tumbuh lebih dari dua kali lebih cepat daripada ekspor menunjukkan bahwa neraca eksternal menjadi kurang mendukung," jelas Harry.

Tekanan terhadap transaksi berjalan juga terlihat pada neraca jasa. Defisit jasa melebar menjadi US\$5,98 miliar dari US\$5,30 miliar pada kuartal II 2025.

Sementara itu, defisit pendapatan primer masih berada pada level tinggi, yakni US\$9,67 miliar.

Dengan defisit transaksi berjalan sebesar US\$4,01 miliar pada kuartal I 2026, akumulasi CAD sepanjang semester I 2026 mencapai sekitar US\$16,5 miliar.

Di tengah pelebaran defisit tersebut, arus masuk portofolio asing sebesar US\$8,5 miliar pada kuartal II 2026 memberikan penyangga penting bagi pembiayaan eksternal Indonesia.

Namun, Harry menilai ketergantungan yang lebih besar terhadap arus modal portofolio juga meningkatkan sensitivitas Indonesia terhadap perubahan sentimen dan selera risiko investor global.

"Dari perspektif pasar, kami melihat data tersebut sebagai dampak negatif moderat bagi rupiah dan sedikit bearish untuk jangka panjang kurva obligasi pemerintah," kata Harry.

Dengan demikian, pelebaran CAD menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan BI dalam menentukan arah kebijakan moneter ke depan, terutama di tengah kebutuhan menjaga stabilitas rupiah dan pembiayaan eksternal Indonesia.

## **Ekonomi Sirkular Berpotensi Jadi Sektor Pembiayaan Baru**

Minggu, 23 Agustus 2026 15:49 WIB

Reporter: Aura Putri, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonomi-sirkular-berpotensi-jadi-sektor-pembiayaan-baru>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi sirkular merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan kembali limbah atau barang bekas agar memiliki nilai ekonomi. Sektor ini dinilai berpotensi membuka peluang pembiayaan baru bagi perbankan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, bisnis daur ulang sampah plastik pada skala perusahaan, termasuk industri FMCG, telah memiliki model bisnis yang berjalan.

"Sektor ekonomi sirkular punya prospek yang cukup baik. Contoh untuk skala perusahaan di FMCG, hasil sampah plastik yang didaur ulang membutuhkan dukungan pembiayaan. Model bisnisnya sudah ada dan berjalan lebih efisien dibanding pembelian bahan baku plastik," kata Bhima kepada Kontan, Kamis (20/8/2026).

Selain itu, peluang pembiayaan juga terbuka pada segmen UMKM, seperti pengolahan limbah industri pakaian hingga refurbish limbah elektronik.

Menurut Bhima, pembiayaan dapat diberikan berdasarkan rencana bisnis debitur. Namun, diperlukan dukungan berupa suku bunga yang rendah dan agunan yang ringan agar pembiayaan sektor ekonomi sirkular dapat berkembang.

PT Bank DBS Indonesia mencatat portofolio pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp 15,6 triliun sepanjang 2025, naik dari Rp 14,1 triliun pada 2024. Nilai tersebut setara 19,1% dari total penyaluran pinjaman DBS Indonesia.

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika mengatakan, ekonomi sirkular memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

“Ekonomi sirkuler kita melihatnya dari potensi dalam pembangunan ekonomi atau economic growth dari masyarakat sekitar sama daerah-daerah yang desa-desa,” ujar Mona di Bandung, Kamis (20/8/2026).

Salah satu dukungan pendanaan DBS dilakukan melalui DBS Foundation. Yayasan ini memberikan dana hibah hingga SGD250.000 untuk wirausaha sosial, dengan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam proposal.

Mona mengatakan, DBS menyasar usaha yang belum besar tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Menurutnya, kelompok usaha tersebut masih kerap kesulitan mendapatkan modal untuk melakukan scale up.

“Yang tengah-tengah ini biasanya suka kurang dapat bantuan dana,” ujarnya.

Selain melalui pendanaan, DBS juga menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam operasionalnya. Pengelolaan sampah operasional DBS di Indonesia dilakukan hingga mencapai kondisi zero waste to landfill.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 78,6 triliun per Juni 2026, setara 22,9% dari total pembiayaan. Dari jumlah tersebut, green financing mencapai Rp 17,4 triliun.

Dalam portofolio green financing itu, kategori produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya atau eco-efficient memiliki porsi 38,1%.

Di luar portofolio pembiayaan tersebut, BSI juga menjalankan program Waste Management melalui Green Zakat yang mengusung konsep ekonomi sirkular. Program ini mengolah sampah anorganik menjadi produk bernilai tambah dan mengonversi sampah yang disetor masyarakat menjadi saldo tabungan BSI Emas.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta mengatakan, BSI ingin mengubah pandangan terhadap sampah yang selama ini dianggap sebagai limbah menjadi sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada tahap awal, program tersebut menyasar 73 penerima manfaat di Bantar Gebang dan Tangerang Selatan dengan target mengelola lebih dari 27 ton sampah daur ulang. BSI juga mengalokasikan Rp1 miliar untuk pelatihan pengelolaan sampah, pengembangan keterampilan produksi barang daur ulang, dan pembangunan kios Waste Management.

# BI Fasilitasi Pembiayaan UMKM Capai Rp 285 Miliar Hingga Juli 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 11:21 WIB

Reporter: Siti Masitoh ,Editor: Avanty Nurdiana

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-fasilitasi-pembiayaan-umkm-capai-rp-285-miliar-hingga-juli-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah memfasilitasi business matching Rp 285 miliar hingga Juli 2026. Nilai tersebut terdiri dari pembiayaan inklusif sebesar Rp 150 miliar dan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 135 miliar.

Adapun capaian tersebut berasal dari delapan lembaga keuangan bersama UMKM mitra BI melakukan penandatanganan pembiayaan. Empat kesepakatan pembiayaan merupakan pembiayaan inklusif dan empat lainnya merupakan pembiayaan berkelanjutan.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI dengan UMKM mitra masing-masing dalam acara Gebyar Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Aida menyampaikan, capaian tersebut masih akan terus bertambah seiring realisasi pembiayaan hingga akhir 2026. Untuk itu, BI memperkuat pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia di antaranya mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, dan perluasan akses pasar.

“Selanjutnya, BI mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas,” tutur Aida dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Lebih lanjut, Aida menyampaikan, BI berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif. Dari sisi demand, digitalisasi pembayaran memanfaatkan QRIS membangun rekam jejak usaha.

“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Aida.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa pembiayaan perlu didukung peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar agar UMKM dapat terus berkembang dan menjaga kualitas pembiayaan.

Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM, 65% di antaranya disalurkan kepada sektor produksi.

Pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem, serta

mendorong sinergi business matching untuk memperluas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

"Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet," ujar Maman.

## **Penyerapan APBD Kudus capai Rp1,17 triliun**

Minggu, 23 Agustus 2026 16:39 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642819/penyerapan-apbd-kudus-capai-rp117-triliun>

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penyerapan APBD tahun 2026 selama periode Januari-Juli 2026 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp1,17 triliun atau 51,15 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun.

"Realisasi penyerapan tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Minggu.

Ia mengungkapkan meskipun realisasi penyerapan anggaran belum maksimal, indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus.

Mengingat ada kegiatan fisik yang pengerjaannya dibiayai secara total hingga jadi oleh pihak pemenang lelang, baru mengajukan tagihan ke Pemkab setelah pekerjaan selesai seluruhnya.

Ada pula pekerjaan fisik yang pencairan anggarannya berdasarkan termin, sesuai realisasi pekerjaan fisiknya. Sehingga, dari sisi penyerapan APBD belum terlihat maksimal karena masih menunggu pihak ketiga.

Berdasarkan data realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) per 31 Juli 2026, belanja operasi menjadi komponen dengan nilai realisasi terbesar, yakni Rp962,72 miliar atau 55,49 persen dari anggaran Rp1,73 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp46,69 miliar atau 15,60 persen dari anggaran sebesar Rp299,27 miliar.

Untuk belanja tidak terduga, realisasinya tercatat Rp1,39 miliar atau 20,69 persen dari anggaran Rp6,73 miliar. Sedangkan belanja transfer terealisasi Rp155,56 miliar atau 64,94 persen dari anggaran Rp239,55 miliar.

Dari sejumlah OPD yang mendapatkan anggaran besar, mencatatkan penyerapan anggaran yang bervariasi. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan persentase tertinggi mencapai 78,74 persen atau Rp38,91 miliar dari total anggaran sebesar Rp49,42 miliar.

Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus dari anggaran sebesar Rp673,25 miliar, terserap sebesar Rp375,57 miliar atau 55,78 persen. Sedangkan Dinas Kesehatan Kudus dari anggaran Rp229 miliar terserap Rp128,88 miliar atau 56,28 persen. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran di OPD lainnya bervariasi antara ratusan juta hingga puluhan miliar.

Djati menjelaskan capaian tersebut masih akan terus bergerak seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Kudus, juga terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Untuk percepatan, Pemkab Kudus juga membentuk desk percepatan penyerapan anggaran dengan melibatkan Asisten II Setda Kudus untuk memonitor ke masing-masing OPD.

## **Ekspor Jawa Tengah Tembus 119 Negara, Keamanan Hayati tak Bisa Ditawar**

Minggu, 23 Agustus 2026 06:58 WIB

R Widiyartono

<https://suarabaru.id/2026/08/23/ekspor-jawa-tengah-tembus-119-negara-keamanan-hayati-tak-bisa-ditawar?utm>

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyebut instansinya berkomitmen mendorong percepatan layanan ekspor dan impor komoditas pertanian serta perikanan.

Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding mengatakan, upaya itu tanpa mengurangi pengawasan terhadap ancaman penyakit dan hama. Tidak boleh mengurangi standar keamanan hayati atau biosecurity.

Sebaliknya, menurut dia, sistem karantina harus mampu memastikan komoditas yang keluar maupun masuk Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan hayati sekaligus memenuhi ketentuan negara tujuan.

“Barantin bertindak sebagai penjaga perbatasan ekonomi sekaligus fasilitator perdagangan. Kami mengawal peningkatan mutu produk, pemenuhan standar sanitari-fitosanitari atau SPS negara tujuan, ketertelusuran, hingga hilirisasi komoditas ekspor,” kata Karding dalam Forum Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) pelaku usaha ekspor dan impor di Kantor Karantina Jawa Tengah, Semarang, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Dari sisi layanan, kata dia, percepatan menjadi salah satu fokus transformasi kelembagaan Barantin untuk mendukung pelaku usaha menembus pasar global.

### **Ekspor Jawa Tengah Jangkau 119 Negara**

Terlebih, sebut Karding, besarnya potensi produk ekspor dari Jawa Tengah. Hal itu terlihat dari data sistem sertifikasi BEST TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology).

“Sepanjang Januari hingga Juli 2026, komoditas asal Jawa Tengah telah menjangkau 119 negara dengan total 14.960 sertifikat ekspor. Nilai ekspor yang tercatat mencapai sekitar Rp10,9 triliun,” katanya.

Komoditas unggulan ekspor sektor hewan antara lain sarang burung walet, kulit kambing, kulit sapi, bulu bebek, dan pupuk. Sementara dari sektor ikan, komoditas yang banyak diekspor antara lain cumi-cumi, ikan tenggiri, udang vaname, ikan kerapu, dan ikan kakap.

Adapun komoditas tumbuhan yang menjadi unggulan ekspor Jawa Tengah antara lain kayu lapis, kayu albasia, furnitur, bunga melati segar, dan kayu veneer.

Data tersebut, kata Karding, menunjukkan bahwa potensi komoditas daerah untuk masuk ke pasar global sangat besar.

Salah satu contohnya adalah gula merah yang diproduksi UMKM Jawa Tengah. Berdasarkan data BEST TRUST, gula merah asal Jawa Tengah sepanjang Januari-Juli 2026 telah rutin diekspor ke 43 negara.

Sepuluh negara tujuan ekspor gula merah tersebut antara lain Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Inggris, Yunani, Australia, Peru, Kanada, Belgia, dan Meksiko.

Karding mengatakan capaian tersebut harus terus didorong dengan memperkuat kualitas produk dan memastikan pelaku usaha memahami persyaratan pasar internasional.

Ia mengatakan Barantin akan menggunakan masukan dari pelaku usaha sebagai bahan untuk memperbaiki layanan di lapangan.

“Keandalan sistem biosecurity nasional harus tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kelancaran arus logistik perdagangan internasional,” katanya. (\*)

## **Pameran UMKM Hari Jadi Jateng Catat 15.159 Pengunjung, Transaksi Capai Rp1,165 Miliar**

Minggu, 23 Agustus 2026 05:43 WIB

<https://suarabaru.id/2026/08/23/pameran-umkm-hari-jadi-jateng-catat-15-159-pengunjung-transaksi-capai-rp1165-miliar>

SEMARANG — SUARABARU.ID: Gelaran Pameran UMKM dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah mencatatkan 15.159 orang pengunjung, dengan total transaksi mencapai Rp1,165 miliar.

Walakin, kegiatan yang dilaksanakan pada 20-22 Agustus 2026 di halaman Kantor Gubernur dan DPRD Jateng itu bukan sekadar diukur dari jumlah pengunjung maupun nilai transaksinya, melainkan didorong agar ada peningkatan kelas dan jangkauan pasar produk UMKM.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat menutup Pameran Program dan UMKM HUT ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Taj Yasin berharap, event tersebut mampu meningkatkan potensi masing-masing UMKM untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas.

“Ada salah satu pelaku UMKM jamu yang menyampaikan kepada kami, akan melakukan MoU dengan Malaysia,” ujarnya.

Ia menilai, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pameran dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis. UMKM yang sebelumnya hanya menjangkau pasar kabupaten/kota, dapat berkembang ke tingkat nasional bahkan internasional.

“Artinya kita mengantarkan para pelaku UMKM kita yang skala kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Yang awalnya hanya di sekitar kabupaten/kota, lompatannya bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi sampai ke luar negeri,” kata Taj Yasin.

Taj Yasin berharap penyelenggaraan tahun depan dapat semakin menarik, bukan hanya dalam mendatangkan pengunjung, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berbelanja produk UMKM

“Bagaimanapun juga, ini bagian dari menyejahterakan UMKM, menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah, dan bagian dari pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan UMKM dinilai sangat penting, karena sektor tersebut terbukti mampu menopang perekonomian dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis moneter dan pandemi Covid-19.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga menghasilkan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kerja sama tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM sekaligus membantu meningkatkan omzet penjualan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desy Arijani mengatakan, pameran ini dirancang dengan konsep zonasi, meliputi zona Kranasda Expo, zona kuliner dan jamu, zona program, zona tematik UMKM binaan Bank Jateng, serta zona mobil pelayanan.

Pameran tersebut diikuti 221 stan. Rinciannya, 35 stan zona Kranasda Expo, 50 stan zona komersial dan jamu, 110 stan zona program, 20 stan zona tematik UMKM binaan Bank Jateng, serta enam unit mobil pelayanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai kegiatan pendukung turut digelar untuk menarik minat masyarakat. Di antaranya lomba memasak ikan bagi siswa SMK, job fair yang melibatkan puluhan perusahaan pencari tenaga kerja, lomba mural tingkat SMA sederajat, lomba menggambar tingkat SD sederajat, lomba stan terbaik, hiburan musik, hingga nonton bareng film-film lawas setiap malam.

Desy berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

“Kami berharap kegiatan pameran ini dapat menjadi momentum strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, serta mempererat kolaborasi antara instansi, pelaku usaha, dan masyarakat Jawa Tengah,” katanya.

Pada acara penutupan, panitia juga mengumumkan para pemenang lomba sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta yang telah menampilkan kreativitas, keberanian, dan inovasi selama pameran. (\*)

## **Konsekuensi yang Diterima Kanada Jika Tolak Kesepakatan AS**

Senin, 24 Agustus 2026 08:40 WIB

Thomas Seal, Erik Hertzberg, Nojoud Al Mallees and Melissa Shin

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/119266/konsekuensi-yang-diterima-kanada-jika-tolak-kesepakatan-as/2>

Warga Kanada menginginkan perdana menteri mereka untuk bersikap tegas dan tidak menandatangani kesepakatan perdagangan yang buruk dengan AS. Tetapi runtuhnya pembicaraan, dan eskalasi perang tarif, akan menimbulkan konsekuensi.

AS menerapkan pajak baru sebesar 50% untuk impor ratusan barang Kanada termasuk furnitur, plastik, kayu lapis, dan peralatan listrik pada Sabtu. Tarif yang sangat tinggi ini dapat menutup pasar terbesar di dunia bagi beberapa perusahaan Kanada.

Profesor ekonomi Universitas Calgary, Trevor Tombe, memperkirakan bahwa 90.000 pekerjaan — sekitar 0,4% dari angkatan kerja Kanada — mungkin akan hilang jika tarif baru ini tetap berlaku. Pasar bereaksi: Dolar Kanada jatuh tajam terhadap dolar AS ketika perdagangan Asia dibuka pada hari Senin.

Banyak produsen kecil Kanada sebelumnya terlindungi dari putaran awal tarif AS, seperti tarif IEEPA awal, karena AS mengecualikan barang-barang yang sesuai dengan Perjanjian AS-Meksiko-Kanada yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.

Namun, pungutan baru sebesar 50%, yang diperintahkan oleh Trump berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tarif 1930 yang belum pernah digunakan sebelumnya, mengabaikan perjanjian perdagangan tersebut. Kanada kemungkinan akan merasakan dampak perselisihan ini lebih cepat daripada AS.

Pemerintah Carney telah menjanjikan bantuan keuangan untuk bisnis yang terjebak dalam konflik ini. Hal itu mungkin terbukti lebih rumit daripada paket bantuan sebelumnya untuk industri seperti baja yang telah menghadapi tarif AS selama lebih dari setahun.

Tarif baru ini "sangat tersebar, dan khususnya mengenai usaha kecil dan menengah di berbagai bagian negara dan dalam rantai pasokan yang sangat berbeda," kata Matthew Holmes, kepala kebijakan publik di Kamar Dagang Kanada. "Sangat sulit bagi pemerintah federal khususnya untuk membuat paket dukungan bagi mereka."

Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan Kanada akan merespons dengan tarif balasan terhadap baja, produk susu, peralatan rumah tangga, elektronik, dan produk lainnya dari AS senilai \$20 miliar mulai 8 September. Ia tidak ragu mengakui bahwa perang dagang akan merugikan perekonomian, tetapi menekankan bahwa Kanada tidak memulainya.

"Anda berada dalam perang ketika Anda diserang. Kami diserang," kata Carney selama konferensi pers 50 menit di Ottawa, kurang dari 12 jam setelah negosiasi secara resmi dihentikan.

Tiga dari empat warga Kanada mendukung keputusan Carney untuk menghentikan pembicaraan, menurut jajak pendapat daring yang dilakukan oleh Angus Reid Institute sejak negosiasi gagal. Tetapi 38% dari mereka yang bekerja juga khawatir pertarungan ini akan memengaruhi pekerjaan mereka, dan 89% khawatir hal itu akan memperburuk biaya hidup.

Sentimen menantang tetap ada bahkan setelah beberapa bagian ekonomi, seperti pabrik mobil dan pabrik baja Ontario, telah menghadapi kesulitan dan PHK yang signifikan sebagai akibat dari tarif sektoral yang diperintahkan Trump tahun lalu.

"Kami telah melihat publik Kanada siap merespons, tidak ingin menyerah pada apa yang mereka anggap sebagai intimidasi. Jadi ini akan sedikit menyakitkan sebelum membaik," kata Holmes.

Pemerintah Carney melihat sedikit peluang untuk melanjutkan negosiasi sebelum pemilihan paruh waktu AS pada bulan November, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pemimpin Kanada sedang merancang langkah-langkah yang bertujuan untuk membantu bisnis yang terkena dampak tarif AS sehingga mereka dapat bertahan hingga akhir masa jabatan Trump jika perlu, tambah orang-orang tersebut, yang diberikan anonimitas untuk membahas pertimbangan sensitif.

Beberapa orang memperingatkan bahwa situasinya masih berubah-ubah dan AS belum mengesampingkan kemungkinan dimulainya kembali negosiasi.

## **Inflasi Asia Beragam, Harga Minyak Uji Bank Sentral Kawasan**

Senin, 24 Agustus 2026 13:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119301/inflasi-asia-beragam-harga-minyak-uji-bank-sentral-kawasan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Laju inflasi negara-negara Asia bergerak tak seragam. Rupanya kenaikan harga minyak mentah yang telah melonjak lebih dari 50% sepanjang tahun ini akibat perang Timur Tengah memiliki pengaruh yang beragam terhadap gerak perubahan harga di masing-masing negara.

Jika dipetakan, maka kondisi inflasi negara-negara Asia setidaknya terbagi jadi tiga kelompok. Pertama, negara dengan inflasi yang relatif terkendali atau berada dalam kisaran target bank sentral seperti Indonesia, India, Thailand, dan Vietnam.

Kedua, negara yang inflasinya sedikit di atas target bank sentral seperti Korea Selatan dan Taiwan. Ketiga, negara dengan tekanan inflasi tinggi seperti Pakistan dan Filipina.

Seorang pekerja mengisi bahan bakar sepeda motor di sebuah pompa bensin di Karachi, Pakistan, Kamis (30/6/2023). (Asim Hafeez/Bloomberg)

Mengacu data Bloomberg, dari sebagian negara di kawasan, Pakistan mencatat inflasi tertinggi sebesar 9,2%, disusul Filipina 6,2%. Di sisi lain, China hanya mencatat inflasi 0,5%, jauh di bawah target 2%.

Melansir Bloomberg News, kenaikan harga minyak mulai menekan permintaan bahan bakar terlihat dari pernyataan Sinopec, perusahaan penyulingan minyak terbesar China. Konsumsi bensin di China tercatat turun hampir 8%, sedangkan penggunaan solar turun 12% pada paruh pertama tahun ini akibat harga yang tinggi dan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Sementara, inflasi Indonesia tercatat dalam posisi relatif nyaman di 2,88%, masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar  $3\% \pm 1\%$ . Sejalan dengan Indonesia, pergerakan inflasi di India juga berada di kisaran 4,45% dari target bank sentralnya  $4\% \pm 2\%$ .

Begitu juga dengan Thailand yang mencatat inflasi 1,95% masih berada di rentang target bank sentral 1-3%, dan Vietnam mencatat inflasi 4,45%, nyaris mendekati batas target 4,5%.

Kedua negara ini menghadapi tekanan harga yang masih relatif terkendali meski memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Sementara, inflasi Malaysia tercatat landai di 1,8% dari posisi sebelumnya di 1,9%. Sebaliknya, inflasi di Korea Selatan melampaui target bank sentral dan berada di 2,8%, sedangkan targetnya di 2%.

### **Sikap Bank Sentral**

Jika dipersempit pada kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, maka laju inflasi relatif terkendali, kecuali Singapura yang mengalami percepatan menjadi 2,2%. Meski begitu, inflasi Singapura berada di bawah ramalan Bloomberg Economics (2,7%) dan konsensus yang dihimpun Bloomberg (2,4%).

Sementara Filipina yang mencatat inflasi tinggi 6,2%, sepertinya tak memberikan banyak pilihan pada bank sentral. Terlepas dari inflasi Filipina, dan inflasi di Singapura yang tercatat naik, secara garis besar sebagian besar ekonomi utama di kawasan ASEAN tidak sedang menghadapi lonjakan inflasi yang ekstrem.

Tamu undangan meninggalkan lokasi acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Kondisi ini pula yang membuat bank sentral di kawasan ini relatif punya ruang yang lebih leluasa terkait kebijakan suku bunga.

Bank Indonesia (BI) misalnya, memilih mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% dengan inflasi yang masih berada dalam target dan suku bunga riil yang positif. Keputusan suku bunga ini sejalan dengan proyeksi ekonom dan analisis yang dihimpun Bloomberg.

Dengan begitu, BI memiliki ruang untuk menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan.

Langkah yang sama juga ditempuh oleh bank sentral Thailand. Bank of Thailand diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di 1%. Sebaliknya, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) bank sentral

Filipina diproyeksikan mengerek suku bunga acuan menjadi 5% dari posisi 4,75% lantaran inflasi yang berada di atas target bank sentral.

Namun, jika ditarik lebih jauh hingga Asia Timur seperti Korea Selatan, maka keputusan bank sentral bisa jadi berbeda. Bank of Korea (BOK) diperkirakan akan kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 3% pada pertemuan Kamis (27/8/2026) mendatang.

Perbedaan respons di antara bank sentral di Asia juga menunjukkan bahwa kenaikan harga energi global tak secara otomatis menghasilkan respons moneter yang sama. Respons bank sentral bukan hanya mengacu seberapa tinggi angka inflasi, tapi juga sumber tekanan, kekuatan permintaan domestik, kondisi nilai tukar, dan berapa besar kenaikan biaya energi diteruskan kepada konsumen.

Sementara itu, meski inflasi Singapura tercatat lebih landai dari proyeksi, namun Monetary Authority of Singapore tetap memperingatkan bahwa inflasi berpotensi meningkat akibat tekanan energi dan dampak konflik Timur Tengah.

### **Proyeksi Harga Minyak**

Inflasi di Asia umumnya didorong oleh kenaikan harga minyak mentah yang kemudian diteruskan pada harga konsumen. Meski begitu, ternyata dampaknya tidak linear terhadap inflasi kawasan.

Negara yang jadi importir energi akan lebih rentan terhadap kenaikan harga minyak, tapi besar dampaknya juga tergantung pada subsidi energi, struktur konsumsi, kebijakan fiskal, kondisi nilai tukar, dan kemampuan produsen dalam meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

Meski Indonesia mencatat inflasi yang relatif aman pada Juli, tetapi ruang ini tetap punya batas. Memang harga minyak mentah relatif jinak dan kembali di rentang US\$92/barel. Namun angka tersebut masih berada di atas asumsi makroekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang berada di US\$70/barel.

Jika harga rerata minyak mentah tetap terhitung tinggi, maka pemerintah memang masih dapat menekan melalui skema subsidi. Akan tetapi, dampaknya terhadap fiskal tak bisa diabaikan. Sehingga bagi Indonesia, capaian inflasi yang masih berada dalam target ini masih berisiko datang dari transmisi guncangan eksternal melalui harga energi serta volatilitas nilai tukar.

## **Swiss Tertekan Tarif AS, Ekspor Terancam Kalah Saing dari Uni Eropa**

Senin, 24 Agustus 2026 15:18 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/swiss-tertekan-tarif-as-ekspor-terancam-kalah-saing-dari-uni-eropa>

KONTAN.CO.ID - ZURICH. Perusahaan industri Swiss mulai mengkhawatirkan dampak tarif impor Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi terhadap produk Swiss. Kondisi tersebut dinilai menempatkan eksportir Swiss pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing dari Uni Eropa (UE) yang menghadapi bea masuk lebih rendah.

Sejak akhir Juli 2026, AS mengenakan tarif sebesar 12,5% terhadap produk asal Swiss. Tarif tersebut 2,5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan terhadap produk dari Uni Eropa.

Asosiasi industri Swissmem memperingatkan kesenjangan tarif tersebut berpotensi semakin melebar. Pasalnya, AS tengah melakukan penyelidikan terkait kelebihan kapasitas industri yang dapat berujung pada pengenaan tarif lebih tinggi terhadap produk Swiss.

Ketua Swissmem Martin Hirzel mengatakan perbedaan tarif 2,5 poin persentase dengan UE bukan satu-satunya kekhawatiran industri Swiss.

"Yang mengkhawatirkan saya, selain perbedaan tarif 2,5 poin persentase dibandingkan UE, adalah pemerintah AS yang terus mempertahankan ketegangan pada level tinggi," ujar Hirzel.

Berdasarkan survei Swissmem, lebih dari separuh perusahaan Swiss memilih menanggung kenaikan biaya tarif dengan mengorbankan margin keuntungan daripada membebankannya kepada pelanggan di AS.

Strategi tersebut diambil karena perusahaan khawatir kehilangan pelanggan AS jika menaikkan harga jual untuk mengimbangi kenaikan bea masuk.

Sementara itu, sekitar 42% perusahaan masih mampu meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen AS.

Namun, Swissmem memperingatkan konsekuensinya dapat menjadi jauh lebih serius apabila selisih tarif Swiss dan UE yang saat ini 2,5 poin persentase kembali meningkat.

Hirzel mengatakan ruang bagi kenaikan tarif lebih lanjut semakin terbatas. Pasalnya, ekspor Swiss ke AS telah turun 5,3% pada enam bulan pertama 2026.

Menurutnya, apabila kesenjangan tarif dengan UE melebar menjadi 5 poin persentase, hampir separuh perusahaan Swiss mengaku bisnis mereka di AS akan terancam secara serius.

Meski menghadapi tarif lebih tinggi, perusahaan Swiss diperkirakan tidak serta-merta memindahkan fasilitas produksi ke AS.

Hirzel mengatakan salah satu kendalanya adalah keterbatasan tenaga kerja terampil di AS.

"Perusahaan tidak akan memindahkan produksinya ke AS sebagai akibat dari kondisi ini, salah satunya karena terdapat kekurangan tenaga kerja terampil di sana," ujarnya.

Swissmem menilai kesepakatan perdagangan yang tidak menempatkan Swiss pada posisi yang lebih buruk dibandingkan pesaing utama tetap menjadi hal yang sangat penting.

"Kesepakatan yang tidak menempatkan kami pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing terpenting kami tetap sangat penting," kata Hirzel.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan tarif AS bukan hanya berdampak pada margin perusahaan Swiss, tetapi juga mulai memengaruhi daya saing ekspor Swiss di pasar AS, terutama ketika produk dari Uni Eropa memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah

# Dolar Diperdagangkan Mendekati Level Terendah, Tertekan kekhawatiran Utang

Senin, 24 Agustus 2026 13:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-diperdagangkan-mendekati-level-terendah-tertekan-kekhawatiran-utang>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Dolar AS tertahan di dekat level terendah dalam beberapa bulan pada Senin (24/8/2026) di tengah pasar yang gelisah akibat janji Departemen Keuangan AS untuk membeli kembali lebih banyak obligasi jangka panjang. Sementara para pedagang menantikan rincian sanksi terhadap Iran serta pidato kebijakan minggu ini di AS dan Jepang.

Mengutip Reuters, Dolar Kanada melemah 0,3% dalam perdagangan di Asia menjadi US\$ 1,3807 per dolar, setelah perundingan perdagangan dengan AS gagal dan Washington memberlakukan tarif 50% atas barang-barang Kanada, yang dibalas dengan tindakan serupa oleh Kanada.

Dolar Australia dan Selandia Baru diperdagangkan tepat di bawah level tertinggi tiga bulan, masing-masing di angka US\$ 0,7166 dan US\$ 0,5972.

Euro bertahan dengan nyaman di atas level US\$ 1,16 pada angka US\$ 1,1680, sementara yen tetap berada di posisi kuat di bawah level 159 per dolar.

Data hari Jumat yang menunjukkan pertumbuhan sektor jasa AS terkuat dalam hampir dua tahun pada bulan Agustus sempat menahan aksi jual dolar, namun tidak cukup memicu lonjakan nilai mata uang tersebut.

Dolar mencatat penurunan mingguan terbesar terhadap bitcoin dalam hampir 3,5 tahun pada hari Minggu dan merosot tajam terhadap emas akibat kekhawatiran yang muncul kembali bahwa mata uang tersebut akan melemah jika AS berupaya menekan imbal hasil obligasi.

Imbal hasil obligasi jangka panjang terus meningkat secara global akibat kombinasi dari prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, ekspektasi inflasi yang meningkat, dan kekhawatiran mengenai utang negara yang membengkak.

Pekan lalu, setelah imbal hasil obligasi tenor 30 tahun mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade, Departemen Keuangan AS mengumumkan akan melipatgandakan pembelian kembali (buyback) obligasi jangka panjang menjadi US\$ 4 miliar per operasi.

Angka tersebut tergolong kecil di pasar yang bernilai US\$ 32 triliun, namun sinyal intervensi itu membuat para pedagang khawatir dan menekan nilai dolar.

"Dengan berupaya menahan penurunan harga sekuritas berdurasi panjang, dolar menjadi satu-satunya saluran penyesuaian yang tersisa untuk mendorong arus masuk modal asing guna membiayai transaksi berjalan AS," ungkap analis Goldman Sachs dalam sebuah catatan.

Mata uang poundsterling bertahan kuat di level US\$ 1,3650 pada perdagangan pagi, sementara yuan—yang mencatat kenaikan mingguan selama delapan pekan berturut-turut pekan lalu—bergerak di dekat level tertinggi dalam 3,5 tahun di angka 6,7232 per dolar.

## Sanksi dan Warsh

Pada hari Senin pukul 18.00 GMT, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan mengadakan konferensi pers setelah mengancam akan menjatuhkan "sanksi terberat dalam sejarah" terhadap Iran; pasar pun menyoroti apakah ia juga akan menargetkan China.

Menteri Luar Negeri Iran telah menepis ancaman sanksi baru AS tersebut sebagai tanda "keputusan".

Pelaku pasar juga menantikan kejelasan mengenai prospek suku bunga AS saat Ketua Federal Reserve Kevin Warsh berbicara di Jackson Hole, Wyoming, pada hari Jumat.

Ia dipastikan akan menghadapi pertanyaan seputar langkah pembelian kembali obligasi oleh Departemen Keuangan.

"Komentar apa pun mengenai neraca keuangan, pasokan durasi, atau premi jangka waktu (term premium) dapat lebih mempengaruhi pergerakan obligasi jangka panjang dibandingkan data itu sendiri. Namun, mengingat gaya bicara Warsh yang biasanya hati-hati dan terukur, kami tidak terlalu berharap banyak akan adanya kejutan besar," ujar ahli strategi BNY, Geoff Yu.

Penampilan Deputy Gubernur Bank of Japan (BOJ), Ryozi Himino, pada hari Kamis juga akan dicermati sebagai pembuka jalan menuju pertemuan kebijakan bulan depan. Secara khusus, investor akan memantau apakah ia akan menepis ekspektasi pasar yang memperkirakan laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat.

"Himino mungkin akan memberi sinyal bahwa BOJ semakin dekat untuk kembali menaikkan suku bunga," kata ahli strategi Commonwealth Bank of Australia, Joe Capurso.

Namun, komentar bernada hawkish kemungkinan hanya akan memberikan tekanan penurunan yang terbatas pada USD/JPY. Perkembangan di pasar obligasi AS merupakan faktor pendorong yang lebih penting bagi USD/JPY.

## **Rupiah Ditutup di Rp17.712/US\$**

Senin, 24 Agustus 2026 15:37 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119337/rupiah-ditutup-di-rp17-712-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan spot Senin (24/8/2026) dengan pelemahan 0,11% ke Rp17.712/US\$, seiring melemahnya sebagian besar mata uang Asia pada sesi siang.

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) berbalik menguat 0,17% ke 98,96 meski harga minyak relatif stabil dan kembali terpangkas 1,31% ke US\$93,15/barel.

Penguatan pada dolar AS justru terjadi di tengah taruhan bearish terhadap dolar oleh para investor sambil menunggu rincian lebih lanjut mengenai rencana fiskal baru oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk mengatasi biaya pinjaman pemerintah AS yang kini berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Indeks dolar AS diuntungkan oleh sikap pasar yang tengah berhati-hati terhadap rilisnya data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartalan serta data inflasi lewat data Personal Consumption Expenditure (PCE) yang akan menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan.

Di Asia, yen Jepang memimpin pelemahan, disusul rupiah, ringgit Malaysia, peso Filipina, dan dolar Singapura. Sementara, yuan offshore, dolar Taiwan, yuan China, dan rupee India melemah lebih terbatas. Sebaliknya, won Korea Selatan menguat bersama baht Thailand, dan dolar Hong Kong.

Meski rupiah sedikit tertekan, di pasar surat utang pergerakan yield lebih semarak. Sebagian besar tenor memangkas yield, terutama tenor pendek dan menengah yang kembali di kisaran 6%. Tenor 2 tahun mengalami penurunan yield paling tajam 5,1 bps ke 6,59%, lalu tenor 5 tahun juga turun 1,1 bps ke 6,84%.

Sementara yield 9 tahun juga terpankas banyak 9,7 bps hingga turun ke 6,99%. Namun, tenor acuan masih tertahan dengan kenaikan 4 bps di 6,99%.

Di pasar surat utang, Indonesia mencatat arus modal masuk sebesar US\$656,7 juta pada 20 Agustus dan merupakan level tertinggi sejak Juli 2019. Arus modal yang deras masuk ke pasar surat utang terjadi dipicu oleh berkurangnya frekuensi lelang pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pekan lalu, sehingga investor berburu yield, yang dipandang sudah cukup atraktif, melalui instrumen obligasi pemerintah.

Bank Indonesia mengurangi frekuensi lelang SRBI sejalan dengan stabilnya pergerakan rupiah sepanjang bulan Agustus ini. Meski hari ini tercatat melemah, sejatinya rupiah sudah menguat 1,63% sepanjang Agustus, dan berada di posisi ketiga mata uang terkuat Asia, setelah won Korea Selatan yang menguat 3,88%, dan baht Thailand 2,18%.

## **Arus Modal Topang Surat Utang RI, Yield Banyak Terpankas**

Senin, 24 Agustus 2026 10:47 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119295/arus-modal-topang-surat-utang-ri-yield-banyak-terpankas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pergerakan yield di pasar surat utang cenderung turun pada perdagangan Senin (24/8/2026), sejalan dengan stabilnya nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.694/US\$ pada pukul 10:26 WIB.

Melansir data Bloomberg, permintaan cukup tinggi terhadap surat utang Indonesia terlihat pada tenor pendek hingga menengah. Sebaliknya, investor masih meminta premi tinggi pada tenor panjang.

Dari 18 tenor yang terpantau, sebanyak 14 tenor mencatat penurunan yield. Penurunan yield paling tajam terjadi di tenor 9 tahun yang terpankas 10,8 basis poin (bps) menjadi 6,98%, diikuti tenor 2 tahun yang merosot 6,8 bps menjadi 6,58%.

Sementara yield tenor 4 tahun turun 3 bps menjadi 6,78%, dan tenor 20 tahun turun 3,1 bps menjadi 7,12%. Sedangkan tenor 5 tahun turun 2,5 bps ke 6,82%.

Namun, pergerakan di pasar surat utang belum sepenuhnya bullish. Sebab di tenor acuan 10 tahun, yield justru tercatat naik 3,7 bps menjadi 6,99%, kembali mendekati level psikologis 7%. Kenaikan ini jadi sinyal bahwa investor masih meminta kompensasi yang lebih tinggi untuk menahan surat utang dengan durasi yang lebih panjang.

Derasnya arus modal masuk yang membanjiri pasar surat utang menjadi salah satu penopang, meski pergerakan rupiah belum banyak berubah dan masih berada di rentang Rp17.650-17.750/US\$.

Investor global tercatat membukukan pembelian bersih surat utang domestik sebesar US\$656,7 juta pada 20 Agustus, dan menjadi level tertinggi sejak Juli 2019. Begitu juga di pasar saham, investor masih mencatat pembelian saham domestik senilai US\$55,2 juta pada 21 Agustus.

Aksi beli oleh investor asing ini telah memperkuat posisi rupiah sepanjang pekan lalu, serta membuat yield tenor pendek dan menengah di pasar obligasi lebih landai.

Meski begitu, yield surat utang RI berdenominasi dolar Amerika Serikat alias INDON untuk tenor acuan 10 tahun justru tercatat naik 0,9 bps ke 5,67%.

Namun, menurut Lionel Priyadi, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, pelemahan dolar AS tetap memberikan katalis positif bagi rupiah, sekaligus menjaga daya tarik aset domestik bagi investor asing.

Selain itu, premi risiko Indonesia terpengkas, dengan turunnya Credit Default Swap (CDS) INDON 5 tahun yang berada di 84,66, turun dari posisi tertingginya di 105,95 pada Maret 2026.

Untuk diketahui, stabilnya pergerakan aset rupiah juga tertopang oleh indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama yang masih terpengkas dan bertahan stabil di 98,82. Pelemahan ini mendorong penguatan pada sebagian mata uang Asia pagi ini. Won menguat paling tajam 0,47%, disusul baht Thailand 0,15%, dan dolar Taiwan 0,11%.

## **Harga Pangan Hari Ini: Beras, Cabai, Telur Kompak Naik**

Senin, 24 Agustus 2026 09:50 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119282/harga-pangan-hari-ini-beras-cabai-telur-kompak-naik>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional tercatat mengalami kenaikan pada Senin (24/8/2026). Kenaikan harga tersebut terjadi pada komoditas beras, cabai, serta sumber protein seperti daging dan telur.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata beras kualitas bawah II naik 1% menjadi Rp14.650 per kilogram (kg). Beras kualitas medium I naik 0,61% menjadi Rp16.500/kg, sedangkan beras medium II naik 1,24% menjadi Rp16.300/kg. Selain itu, harga beras kualitas super II juga naik 0,56% menjadi Rp17.250/kg.

Di sisi lain, harga beras kualitas bawah I justru turun 0,34% menjadi Rp14.800/kg. Sementara itu, harga beras kualitas super I bertahan stabil pada angka Rp17.750/kg.

Komoditas protein juga kompak mengalami kenaikan. Harga telur ayam ras segar naik 0,17% menjadi Rp29.250/kg, sedangkan daging ayam ras segar merangkak naik 1,69% menjadi Rp42.000/kg.

Selanjutnya, harga rata-rata daging sapi kualitas 1 naik 0,77% menjadi Rp151.450/kg dan daging sapi kualitas 2 naik 0,38% menjadi Rp142.500/kg.

Untuk kelompok bumbu dapur, kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak 12,37% menjadi Rp69.950/kg. Harga cabai merah keriting naik 3,53% menjadi Rp51.300/kg, sedangkan cabai rawit hijau naik 3,45% menjadi Rp57.050/kg. Sebaliknya, harga cabai merah besar melandai 1% menjadi Rp49.250/kg.

Penurunan harga juga dialami oleh komoditas bawang dan minyak goreng kemasan. Harga rata-rata bawang merah ukuran sedang turun 1,27% atau turun Rp500 menjadi Rp38.850/kg, sementara bawang putih ukuran sedang turun 0,86% atau turun Rp350 menjadi Rp40.150/kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2 masing-masing turun menjadi Rp24.300/kg dan Rp23.500/kg. Adapun harga rata-rata minyak goreng curah tercatat stagnan pada angka Rp20.450/kg.

Sementara itu, harga gula pasir mencatatkan pergerakan yang bervariasi. Harga gula pasir lokal di pasar tradisional turun menjadi Rp19.000/kg, sedangkan harga gula pasir kualitas premium naik menjadi Rp20.350/kg.

# Ekonom: Hilirisasi Sawit Buka Peluang UMKM Menembus Pasar Ekspor

Senin, 24 Agustus 2026 18:19 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://industri.kontan.co.id/news/ekonom-hilirisasi-sawit-buka-peluang-umkm-menembus-pasar-ekspor>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hilirisasi kelapa sawit dinilai membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas akses ke pasar ekspor.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, potensi pengembangan UMKM berbasis kelapa sawit di Indonesia masih sangat besar. Pelaku UMKM dapat mengembangkan beragam produk turunan sawit, mulai dari pangan atau oleofood, bahan kimia atau oleochemical, hingga bioenergi.

“Hingga saat ini program hilirisasi kelapa sawit telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional mulai dari peningkatan harga TBS di tingkat petani, perluasan lapangan kerja, serta penciptaan efek ekonomi berantai yang lebih luas,” kata Eisha di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Menurut dia, pengembangan UMKM berbasis sawit perlu diarahkan pada produk yang mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat masuk ke rantai nilai produk hilir.

“Potensi UMKM berbasis kelapa sawit sangat besar. Ke depan perlu ditingkatkan UMKM yang mampu memberikan nilai tambah dari produk atau komoditas kelapa sawit,” ujarnya.

Eisha juga mendorong pelaku UMKM berbasis kelapa sawit untuk meningkatkan daya saing dan berani masuk ke pasar internasional. Pasalnya, kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor nasional saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 15%.

“Kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya sekitar 15% dan nilainya stagnan, tidak berkembang. Ke depan perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Menurut Eisha, komoditas kelapa sawit berpotensi menjadi salah satu sektor yang mendorong peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor. Terlebih, sawit merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia.

Ia menilai keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global juga dapat mendorong transformasi usaha. Ketika masuk ke pasar internasional, baik sebagai eksportir maupun pemasok dalam rantai nilai global, UMKM akan dituntut memenuhi standar dan kualifikasi pasar global.

“Karena ketika UMKM masuk pasar global baik menjadi eksportir atau pemasok rantai nilai global maka akan berproduksi dengan standar dan kualifikasi pasar global. Hal itu akan mendorong UMKM untuk lebih efisien dalam produksi dan mendorong mereka naik kelas,” paparnya.

Eisha meyakini UMKM berbasis kelapa sawit memiliki peluang untuk memenuhi standar pasar global tersebut. Hal ini tercermin dari perkembangan hilirisasi sawit yang mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan.

Secara umum, hilirisasi sawit dapat meningkatkan nilai ekonomi produk sekitar tiga hingga 10 kali lipat. Sementara untuk produk bernilai tinggi seperti vitamin E dan sejumlah produk oleokimia, peningkatan nilai tambah bahkan dapat mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Meski demikian, Eisha menilai dukungan pemerintah masih dibutuhkan untuk mendorong lebih banyak UMKM sawit berorientasi ekspor. Dukungan tersebut antara lain penguatan kapasitas keuangan, pemberian insentif, hingga bantuan teknis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

“Tantangan menjadi eksportir cukup besar bagi UMKM. Terlebih, untuk menembus pasar global yang mana memiliki barrier cukup besar di tengah keterbatasan kapasitas finansial dan produksi dari UMKM,” ujarnya.

Selama ini pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong pengembangan UMKM berbasis kelapa sawit yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat industri sawit nasional sekaligus mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah dinilai perlu memperkuat dukungan melalui pemetaan pasar potensial, pencarian calon pembeli atau potential buyer, serta fasilitasi business matching antara UMKM dengan mitra usaha di pasar global.

“Perwakilan Indonesia di luar negeri, atase perdagangan, dan ITPC perlu lebih aktif melakukan pemetaan potensi pasar bagi UMKM ekspor,” pungkask Eisha.

## **Pemprov Jateng dorong transformasi sektor perhubungan berbasis ekonomi hijau**

Senin, 24 Agustus 2026 22:58 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642956/pemprov-jateng-dorong-transformasi-sektor-perhubungan-berbasis-ekonomi-hijau>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong transformasi di sektor perhubungan melalui serangkaian inovasi berbasis energi bersih dan digitalisasi layanan, mulai dari pengoperasian taksi dan kendaraan travel listrik hingga penerapan sistem pembayaran nontunai di terminal.

Beragam layanan itu diresmikan langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam acara "Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026" di Kantor Dinas Perhubungan Jateng, Semarang, Senin.

Luthfi yang sempat mencoba langsung taksi listrik tersebut dengan berkeliling di sekitar Kantor Dishub Jateng menilai kendaraan listrik menawarkan kenyamanan, sekaligus mendukung pengurangan polusi dan penggunaan energi fosil.

"Ini sangat nyaman sekali. Saya coba muter kantor (Dishub), argonya tinggal pencet, enggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil," katanya.

Ia menyambut positif hadirnya taksi listrik sebagai bagian dari inovasi transportasi umum berbasis energi bersih.

Menurut dia, transformasi menuju energi terbarukan merupakan bagian dari arah pembangunan Jateng yang mendukung konsep ekonomi hijau.

Diharapkan, penggunaan kendaraan listrik tidak berhenti pada sektor kendaraan pribadi maupun taksi tetapi juga pada berbagai moda transportasi umum lainnya.

"Kami sedang mengkaji, termasuk untuk transportasi Trans, taksi maupun travel. Semuanya sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan agar ke depan penggunaan energi yang lebih bersih bisa benar-benar dikedepankan," katanya.

Kepala Dishub Jateng Arif Djatmiko mengatakan peluncuran taksi listrik dan mobil travel listrik menjadi satu dari delapan inovasi dalam Transformasi Perhubungan Jateng 2026.

Selain elektrifikasi kendaraan, Pemprov Jateng juga mendorong transformasi melalui digitalisasi serta integrasi layanan transportasi, salah satunya melalui penerapan pembayaran nontunai pada Terminal Tipe B.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Sigit Djokosoetono, mengatakan Semarang menjadi kota pertama di Jateng yang menjadi lokasi pengoperasian taksi listrik Bluebird dengan armada BYD E6.

Pada tahap awal, sebanyak 10 unit kendaraan listrik dioperasikan untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat, baik di dalam Kota Semarang maupun perjalanan menuju sejumlah titik transportasi seperti bandara.

Selain menawarkan kenyamanan dengan kabin yang lebih lega dan kapasitas penumpang lebih besar, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi dari sektor transportasi.

"Untuk di Semarang kita mulai dengan 10 unit. Ke depan akan kita review dan melihat kemungkinan untuk dikembangkan dengan tipe-tipe kendaraan lainnya," katanya.

Secara nasional, Bluebird telah mengoperasikan hampir 1.000 kendaraan listrik yang tersebar di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan kini Semarang.

Meski jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan total armada perusahaan, ia memastikan jumlah kendaraan listrik tersebut terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Ke depan, kata dia, Bluebird membuka kemungkinan menambah kendaraan listrik dengan kapasitas dan tipe berbeda yang diharapkan biaya pengadaan dapat semakin kompetitif dan berdampak pada layanan yang lebih terjangkau.

## **Pemkab Batang menyampaikan tiga raperda strategis investasi ke DPRD**

Senin, 24 Agustus 2026 15:36 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642904/pemkab-batang-menyampaikan-tiga-raperda-strategis-investasi-ke-dprd>

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah ini.

Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Senin, mengatakan bahwa ketiga raperda tersebut yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

"Kami menilai ketiga regulasi ini merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah terutama dengan berkembangnya kawasan industri dan berbagai sektor strategis lainnya," katanya.

Pada acara Rapat Paripurna DPRD Batang, Senin (24/8), ia mengatakan tuntutan terhadap ketersediaan ruang dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan akan menjadi semakin tinggi.

Raperda RPPLH, kata dia, disusun untuk periode 2027–2057 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Menurut dia, dokumen perencanaan ini diarahkan untuk mencapai empat sasaran utama yakni mewujudkan kelestarian sumber daya alam terutama sumber daya air, mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat, mendorong pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta mengharmonisasikan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

"RPPLH ini krusial agar kita memiliki landasan, kepastian dan kekuatan hukum yang tetap dalam penyelenggaraan pembangunan daerah jangka panjang," katanya.

Terkait dalam pengelolaan barang milik daerah, Suyono menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

"Sebagian besar ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan praktik penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang selaras dengan perkembangan zaman," katanya.

Menurut dia, melalui pembaruan regulasi ini, pihaknya menargetkan optimalisasi pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan aset daerah secara efektif dan efisien, serta penguatan instrumen pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemudian untuk Raperda RTRW, ia mengatakan, disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendaliannya, pengembangan wilayah, serta investasi hingga 20 tahun ke depan.

Tujuan penataan ruang di daerah, kata dia, adalah mewujudkan Kabupaten Batang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang berdaya saing, didukung ruang perkotaan dan perdesaan yang terpadu, aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan pertumbuhan sektor industri berjalan selaras dengan perlindungan lahan pertanian yang produktif, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah. Keseimbangan ini penting agar kemajuan ekonomi memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Batang tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan," katanya.

# UMKM Jateng Unjuk Gigi di KKI 2026, Bidik Pasar Nasional hingga Ekspor

Senin, 24 Agustus 2026 12:42 WIB

Arif

<https://jatengpos.co.id/nasional/2026/08/24/umkm-jateng-unjuk-gigi-di-kki-2026-bidik-pasar-nasional-hingga-ekspor/?utm>

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jawa Tengah unjuk gigi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI). Kehadiran UMKM Jateng menjadi momentum memperluas jejaring usaha sekaligus membidik pasar nasional hingga ekspor.

KKI 2026 berlangsung 20-23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Tahun ini, KKI mengusung semangat “Beudaya Meusare Sare” dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, dengan tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”.

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga aspek utama, yakni bangkit, tangguh dan berdaya saing. Ketiganya menjadi fondasi agar UMKM mampu menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memperluas pasar.

“Penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing,” ujar Destry saat membuka KKI 2026.

Menurutnya, semangat bangkit diwujudkan melalui pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Sementara ketangguhan diperkuat melalui struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan, sedangkan daya saing didorong melalui inovasi produk serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Partisipasi UMKM Jawa Tengah dalam KKI 2026 cukup kuat. Lebih dari 100 UMKM binaan BI se-Jawa Tengah ikut ambil bagian, baik secara luring maupun daring, dengan sektor usaha meliputi makanan dan minuman, fesyen, kriya, furniture dan home décor, kopi serta teh.

Khusus UMKM binaan Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, tercatat 40 UMKM berpartisipasi dalam KKI 2026. Sebanyak 24 UMKM mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 16 UMKM lainnya berpartisipasi melalui platform digital KKI.

Sejumlah UMKM Jateng yang hadir secara luring bergerak di sektor kriya dan wastra. Produk yang ditampilkan antara lain kerajinan berbahan daur ulang serta batik khas berbagai daerah di Jawa Tengah yang mengangkat kekayaan kearifan lokal.

Tidak hanya mengandalkan pasar domestik, beberapa UMKM binaan BI Jateng yang tampil dalam KKI 2026 juga telah berorientasi ekspor. Mereka sekaligus mulai menerapkan praktik usaha berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho menuturkan, melalui partisipasi UMKM binaannya mendorong produk lokal agar tidak berhenti pada promosi, tetapi mampu berkembang melalui perluasan jejaring, akses pembiayaan, pasar dan pengembangan kapasitas. KKI menjadi salah satu ruang strategis untuk mempertemukan UMKM dengan calon mitra dan pasar potensial.

Secara keseluruhan, KKI 2026 merupakan penyelenggaraan ke-11 dan diikuti lebih dari 550 UMKM secara luring serta 1.300 UMKM melalui pameran daring. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan KKI 2025 yang diikuti 362 UMKM secara luring dan lebih dari 1.100 UMKM secara daring.

KKI 2026 juga menghadirkan 44 rangkaian kegiatan, mulai talkshow ekonomi dan keuangan inklusif berkelanjutan, pagelaran karya kreatif, business matching pembiayaan dan ekspor, showcase UMKM unggulan, showcase pariwisata, hingga zona hijau dan berbagai aktivitas interaktif.(aln)

## **UMKM Jawa Tengah Catat Transaksi Rp2,94 Miliar di KKI 2026**

Senin, 24 Agustus 2026

<https://www.portaljateng.id/2026/08/24/umkm-jawa-tengah-catat-transaksi-rp294-miliar-di-kki-2026/?utm>

JAKARTA — Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah mencatatkan kinerja positif dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026. Selama empat hari pelaksanaan pameran pada 20-23 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), 11 UMKM Jawa Tengah membukukan total transaksi Rp2,94 miliar.

Capaian tersebut melonjak Rp1,93 miliar dibandingkan realisasi KKI 2025 yang mencapai Rp1,009 miliar. Jumlah UMKM Jawa Tengah yang berpartisipasi secara offline juga meningkat menjadi 11 UMKM dari sebelumnya enam UMKM pada KKI 2025.

Peningkatan transaksi tersebut didorong oleh semakin beragamnya produk UMKM Jawa Tengah yang telah melalui proses kurasi. Ragam produk yang dipamerkan mencakup fesyen wastra, ready to wear, hingga aksesoris.

Sebelas UMKM Jawa Tengah yang berpartisipasi yakni Batik Pusaka Beruang, Batik Maranata Ong's Art, Batik Eka, Batik Alfa Shoofa, Muria Batik, Batik Kidang Mas, Batik Sekar Mulyo, Batik Gading Kencana, Batik Pramesti, Rorokenes, dan Syams Indonesian Handicraft.

Selain pameran, UMKM Jawa Tengah juga memanfaatkan KKI 2026 untuk memperluas akses pasar melalui Business Matching (BM) Ekspor. Dari kegiatan tersebut, tercatat 11 peluang kerja sama dengan buyer domestik maupun mancanegara.

Peluang kerja sama tersebut mencakup produk furniture dan home decoration, makanan dan minuman olahan, kerajinan, serta kopi. Bentuk kerja samanya antara lain purchase order (PO), letter of intent (LoI), hingga quotation offer.

Potensi transaksi yang telah teridentifikasi mencapai sedikitnya Rp4,41 miliar. Sejumlah pasar yang menjadi tujuan potensial antara lain Prancis, Afrika Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.

Pencapaian ini menunjukkan terbukanya peluang kerja sama ekspor, investasi, hingga joint venture bagi UMKM Jawa Tengah.

Secara nasional, KKI 2026 juga mencatatkan peningkatan kinerja. Penjualan sementara hingga 22 Agustus 2026 mencapai Rp144,2 miliar atau naik 46% dibandingkan capaian 2025.

Sementara itu, Business Matching ekspor berhasil mencatat potensi transaksi Rp169,9 miliar yang melibatkan 192 UMKM dengan buyer dari 16 negara. Dari sisi pembiayaan, realisasi Business Matching pembiayaan mencapai Rp285 miliar atau meningkat 30,3% dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan KKI tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM, tetapi juga bagian dari ekosistem pengembangan usaha dari hulu hingga hilir.

“Setiap tahun, dengan penuh rasa syukur kami adakan KKI agar UMKM Indonesia bisa terus tumbuh, tangguh, dan berdaya saing. Tapi, UMKM perlu mempunyai ekosistem yang menjadi tujuan berkelanjutan agar tumbuh, tangguh, dan berdaya saingnya UMKM Indonesia terus berlangsung,” ujar Aida dalam Seremoni Penutupan KKI 2026 di JICC Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurut Aida, Bank Indonesia akan terus mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, inovasi, digitalisasi, serta pembangunan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

KKI 2026 mengusung semangat “Beudaya MeusareSare” atau berdaya bersama-sama. Melalui sinergi antara UMKM, masyarakat, pemerintah, industri, lembaga keuangan, buyer global, dan mitra strategis, BI mendorong produk UMKM Indonesia semakin dikenal di dalam negeri sekaligus mampu menembus pasar global.

Aida pun mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan nyata terhadap produk UMKM nasional.

“Cintai, bangga, dan pakai produk UMKM Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi UMKM Indonesia menjadi tuan rumah produk Indonesia dan bisa tumbuh, tangguh, dan berdaya saing,” kata Aida.

## **China Borong Emas Lagi, Impor Juli Melonjak 28%, Ada Apa?**

Selasa, 25 Agustus 2026 19:24 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-borong-emas-lagi-impor-juli-melonjak-28-ada-apa>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor bersih emas China melalui Hong Kong meningkat pada Juli 2026, menunjukkan penguatan permintaan investasi terhadap logam mulia di tengah ketidakpastian ekonomi.

Mengutip data Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong pada Selasa (25/8/2026), impor bersih emas China melalui Hong Kong mencapai 56,193 ton pada Juli 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 11% secara bulanan dibandingkan 50,679 ton pada Juni 2026.

Jika dibandingkan dengan Juli 2025, impor bersih emas tersebut melonjak sekitar 28% dari 43,923 ton.

Analisis StoneX Rhona O'Connell mengatakan, peningkatan impor bersih tersebut kemungkinan besar mencerminkan kenaikan permintaan terhadap produk investasi emas, seperti emas batangan dan koin.

"Perkembangan impor bersih tersebut kemungkinan besar mencerminkan peningkatan permintaan terhadap produk investasi seperti emas batangan dan koin, sementara permintaan perhiasan cenderung datar di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar O'Connell.

Sementara itu, total impor emas China melalui Hong Kong pada Juli mencapai 75,457 ton, turun lebih dari 3% dibandingkan Juni yang mencapai 78,147 ton.

Namun, data perdagangan melalui Hong Kong belum mencerminkan keseluruhan impor emas China. Pasalnya, emas juga masuk ke China melalui pusat perdagangan lainnya, termasuk Shanghai dan Beijing.

## **Bank Sentral China Borong Emas**

Permintaan emas China juga mendapat dukungan dari bank sentralnya. Bank sentral China meningkatkan pembelian emas untuk bulan kelima berturut-turut pada Juli 2026.

Berdasarkan data resmi yang dirilis sebelumnya, pembelian tersebut menjadi penambahan emas terbesar ke dalam cadangan devisa China sejak Oktober 2023.

Analisis Bank of America menilai, peningkatan impor emas China juga berkaitan dengan strategi Beijing untuk memperkuat posisi yuan atau renminbi (RMB) dalam sistem keuangan global.

"Perlu dicatat bahwa impor emas China telah mencatat serangkaian rekor tertinggi sepanjang tahun berjalan. Salah satu alasannya adalah China memandang emas sebagai instrumen strategis untuk mendukung internasionalisasi yuan," tulis analisis Bank of America dalam catatan risetnya.

Menurut mereka, China berupaya menghubungkan pasar emas dengan aktivitas perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi berbasis RMB.

Langkah tersebut secara bertahap membuka alternatif terhadap sistem keuangan global yang masih berpusat pada dolar AS.

Peluncuran sistem kliring terpusat logam mulia di Hong Kong juga dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam strategi tersebut.

Di pasar global, harga emas spot mencatat kenaikan bulanan pertamanya dalam lima bulan pada Juli 2026.

Penguatan tersebut terjadi setelah data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah dari perkiraan mengurangi ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut.

## **Keyakinan Pebisnis Jerman Menguat Seiring Pemulihan Aktivitas Ekonomi**

Selasa, 25 Agustus 2026 18:18 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/keyakinan-pebisnis-jerman-menguat-seiring-pemulihan-aktivitas-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Optimisme pelaku usaha di Jerman semakin menguat. Indeks iklim bisnis yang dirilis Ifo Institute naik menjadi 88,8 poin pada Agustus 2026. Kenaikan tersebut menjadi yang keempat secara beruntun dan membawa indikator ke level tertinggi sejak Agustus 2025.

Perbaikan sentimen bahkan lebih kuat dari perkiraan pasar. Konsensus proyeksi ekonom sebelumnya memperkirakan indeks hanya meningkat ke 87,2 poin. Angka tersebut juga lebih baik dari posisi indeks di Juli, yakni 86,7 poin.

Menguatnya iklim bisnis terjadi karena perusahaan Jerman semakin puas terhadap kondisi bisnis saat ini, sekaligus jauh lebih optimistis terhadap prospek beberapa bulan ke depan.

Indeks penilaian kondisi bisnis saat ini meningkat menjadi 88,5 poin, dari 86,5 poin pada Juli. Sementara indeks ekspektasi melonjak menjadi 89,1 poin, dari 86,8 poin.

Presiden Ifo Institute Clemens Fuest mengatakan perbaikan sentimen menunjukkan perekonomian Jerman mulai memasuki fase pemulihan. “Meskipun harga energi kembali meningkat, ekonomi Jerman sedang pulih,” sebut Fuest dalam keterangan resmi, Selasa (25/8/2026).

Fuest juga menekankan, perusahaan kini lebih puas terhadap kondisi bisnis mereka dan secara signifikan meningkatkan ekspektasi. Pada saat yang sama, ketidakpastian terus menurun.

Perbaikan sentimen tidak hanya terjadi pada satu sektor. Ifo mencatat iklim bisnis membaik di seluruh sektor yang disurvei, yakni manufaktur, jasa, perdagangan, dan konstruksi.

Di sektor manufaktur, indeks meningkat menjadi -4,2 poin pada Agustus, dari -9,6 poin pada Juli. Manajer perusahaan menilai kondisi bisnis saat ini jauh lebih baik dan tingkat skeptisisme terhadap prospek ke depan berkurang. Perusahaan juga memperkirakan produksi akan meningkat dalam tiga bulan mendatang.

Namun, pemulihan sektor industri belum sepenuhnya solid. Perusahaan manufaktur masih mengeluhkan kondisi pesanan yang mereka terima.

Di sektor jasa, indeks iklim bisnis naik menjadi -2,1 poin, dari -4,4 poin pada Juli. Ekspektasi perusahaan terus membaik dan penilaian terhadap kondisi bisnis saat ini juga lebih positif. Perusahaan penyedia layanan teknologi informasi menjadi lebih percaya diri terhadap prospek bisnisnya. Sebaliknya, kondisi sektor transportasi dan logistik masih sulit.

Sentimen di sektor perdagangan juga membaik. Indeks meningkat menjadi -20,5 poin, dari -23,4 poin. Pedagang ritel semakin puas terhadap kondisi bisnis saat ini, sementara ekspektasi terus bergerak naik. Perbaikan sentimen bahkan lebih signifikan di perdagangan grosir.

Sektor konstruksi mencatat kenaikan indeks menjadi -16,5 poin, dari -20,5 poin. Namun, perbaikan tersebut terutama berasal dari berkurangnya pesimisme terhadap prospek ke depan. Penilaian perusahaan terhadap kondisi bisnis saat ini justru sedikit memburuk.

Indeks iklim bisnis Ifo memiliki posisi penting dalam membaca arah perekonomian Jerman. Survei ini dilakukan setiap bulan terhadap sekitar 9.000 perusahaan di sektor manufaktur, jasa, perdagangan, dan konstruksi. Perusahaan diminta menilai kondisi bisnis saat ini dan memberikan ekspektasi terhadap perkembangan bisnis selama enam bulan ke depan.

Dengan cakupan responden yang besar dan rekam jejak korelasinya dengan kondisi ekonomi Jerman maupun kawasan euro, survei Ifo menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan pelaku pasar. Rilis indeks tersebut juga cenderung memberikan dampak cukup besar terhadap pasar karena memberikan gambaran mengenai perubahan sentimen dunia usaha sebelum data ekonomi resmi tersedia.

Indeks ini juga berfungsi sebagai indikator pendahulu kesehatan ekonomi. Perusahaan biasanya merespons perubahan kondisi pasar relatif cepat. Karena itu, perubahan keyakinan bisnis dapat menjadi sinyal awal mengenai arah aktivitas ekonomi berikutnya, termasuk keputusan perusahaan untuk meningkatkan belanja, merekrut tenaga kerja, maupun melakukan investasi.

Perbaikan sentimen dunia usaha juga muncul bersamaan dengan data ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada hari yang sama, Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis) melaporkan ekonomi Jerman tumbuh 0,3% secara kuartalan pada kuartal II-2026, lebih tinggi dari estimasi awal 0,2%.

# Ekonomi Jerman Tumbuh 0,3%, Aktivitas Ekspor Masih Menjadi Penopang

Selasa, 25 Agustus 2026 17:44 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-jerman-tumbuh-03-aktivitas-ekspor-masih-menjadi-penopang>

KONTAN.CO.ID - WIESBADEN. Perekonomian Jerman tumbuh lebih kuat dari perkiraan awal pada kuartal II-2026. Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis), Selasa (25/8/2026), mengumumkan produk domestik bruto (PDB) Jerman meningkat 0,3% dibandingkan kuartal sebelumnya, setelah disesuaikan dengan faktor harga, musiman, dan kalender.

Angka yang diumumkan tersebut merupakan angka pertumbuhan ekonomi final. Data pertumbuhan PDB final tersebut lebih tinggi dibandingkan konsensus proyeksi ekonom, yang menunjukkan pertumbuhan 0,2%.

Realisasi tersebut memang lebih rendah dibanding angka pertumbuhan kuartal I-2026, sebesar 0,4%. Tapi realisasi tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama setahun sebelumnya, di mana ekonomi tercatat stagnan.

Secara tahunan, PDB Jerman pada kuartal II-2026 tumbuh 1,0% secara riil, naik dari pertumbuhan 0,8% pada kuartal I. Dengan penyesuaian kalender, pertumbuhan tahunan juga mencapai 1,0%. Angka tersebut sekaligus direvisi naik dari estimasi awal 0,9%.

Presiden Destatis Ruth Brand mengatakan, ekonomi Jerman mempertahankan momentum pertumbuhan yang terbentuk sejak awal tahun. “Seperti pada kuartal I, pertumbuhan pada kuartal II terutama ditopang perkembangan ekspor yang positif,” papar Brand, melalui keterangan resmi, Selasa (25/8/2026).

Data sebelumnya dari Destatis menunjukkan ekspor telah menjadi faktor penting pertumbuhan pada kuartal I, ketika ekspor meningkat tajam.

Dari sisi penggunaan, ekspor barang dan jasa meningkat 2,0% dibandingkan kuartal sebelumnya setelah disesuaikan dengan harga, faktor musiman, dan kalender. Pertumbuhan ekspor tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan impor barang dan jasa yang mencapai 1,5%.

Sementara itu, konsumsi final hanya meningkat 0,1% secara kuartalan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 0,1%, sedangkan konsumsi pemerintah juga naik 0,1%.

Kinerja investasi masih menjadi titik lemah. Pembentukan modal tetap bruto turun 0,2% pada kuartal II. Investasi mesin dan peralatan merosot 1,4%, sementara investasi konstruksi hanya meningkat tipis 0,1%.

Destatis mencatat pemulihan investasi konstruksi belum cukup kuat setelah kinerja yang lemah pada awal tahun. Ini antara lain disebabkan kondisi cuaca yang sangat dingin.

Alhasil, struktur pertumbuhan ekonomi Jerman pada kuartal II masih sangat bergantung pada sektor eksternal. Ekspor yang menguat mampu mengimbangi konsumsi domestik yang hanya tumbuh tipis dan investasi yang kembali melemah.

Pertumbuhan tersebut memperpanjang tren ekspansi ekonomi Jerman pada 2026. Setelah tumbuh 0,4% pada kuartal I, ekonomi terbesar Eropa itu mencatat pertumbuhan 0,3% pada kuartal II. Sebelumnya, perekonomian Jerman mengalami stagnasi pada sejumlah periode sepanjang 2025 dan hanya mencatat pertumbuhan tahunan 0,2% pada 2025.

Meski demikian, momentum pertumbuhan masih menghadapi sejumlah risiko. Pemerintah Jerman sebelumnya mencatat, permintaan domestik masih tertahan akibat tekanan daya beli dan ketidakpastian geopolitik. Sementara itu, prospek ekspor tetap menghadapi risiko dari ketegangan perdagangan global dan harga energi yang tinggi.

Secara keseluruhan, data final Destatis menunjukkan pemulihan ekonomi Jerman pada paruh pertama 2026 berlangsung sedikit lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Namun, sumber pertumbuhan masih belum merata karena ekspor menjadi motor utama, sementara konsumsi dan investasi domestik belum menunjukkan penguatan yang berarti.

## **Trump Siapkan Tarif Baru 7,5% untuk Barang China**

Selasa, 25 Agustus 2026 15:46 WIB

Sumber: Bloomberg, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/trump-siapkan-tarif-baru-75-untuk-barang-china>

KONTAN.CO.ID – WASHINGTON Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan tarif tambahan sebesar 7,5% terhadap barang-barang asal China. Kebijakan ini dikaitkan dengan tuduhan kelebihan kapasitas manufaktur China dan berpotensi diumumkan sebelum pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada September 2026.

Jika diterapkan, tarif tersebut akan membuat total tarif era pemerintahan kedua Trump terhadap produk China kembali ke sekitar 20%. Beijing sebelumnya menyebut level tersebut masih sesuai dengan kesepakatan gencatan perdagangan antara AS dan China.

Laporan Bloomberg (25/9), besaran tarif final belum diputuskan. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah menetapkan tarif pada level lebih tinggi, tetapi menanggukuhkan sebagian pungutan sehingga tarif efektif yang berlaku menjadi 7,5%.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Trump menghidupkan kembali kebijakan perdagangan proteksionis setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif global yang sebelumnya diberlakukan pemerintahannya. Trump kini berupaya menggunakan dasar hukum lain untuk mempertahankan kebijakan tarifnya.

Pemerintah AS pada Maret lalu memulai penyelidikan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 terhadap lebih dari selusin mitra dagang terkait dugaan kelebihan kapasitas industri. Penyelidikan tersebut mencakup China dan dapat menjadi dasar penerapan tarif baru.

AS menargetkan hasil penyelidikan mengenai kelebihan kapasitas tersebut rampung sebelum Trump dan Xi bertemu di Washington pada 24 September. Namun, penyusunan laporan tersebut menghadapi sejumlah persoalan hukum.

Di sisi lain, AS dan China juga tengah membahas perpanjangan gencatan perdagangan yang berlaku selama satu tahun dan akan berakhir pada 10 November. Karena itu, tarif baru tersebut diperkirakan dirancang agar tidak memicu eskalasi perang dagang di luar batas yang telah disepakati.

Langkah AS ini juga muncul setelah pemerintahan Trump pada Juli memberlakukan tarif 12,5% terhadap barang China dengan alasan upaya Beijing menangani praktik kerja paksa belum memadai. China mengecam kebijakan tersebut, tetapi tidak langsung mengambil langkah balasan.

China sebelumnya menyatakan AS telah sepakat membatasi tarif tambahan terhadap ekspor China hingga 20%. Tiongkok berharap AS tetap mematuhi batas tersebut dalam kebijakan tarif berikutnya.

Rencana tarif baru juga menghadapi tantangan hukum. Sebanyak 25 negara bagian AS, termasuk New York, California, dan Illinois, telah menggugat penggunaan Section 301 untuk menggantikan tarif yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Pemerintahan Trump menyatakan tarif berdasarkan Section 301 memiliki dasar hukum yang kuat. Jika diberlakukan, kebijakan tersebut akan kembali menambah tekanan terhadap hubungan dagang dua ekonomi terbesar dunia, sekaligus menjadi ujian bagi upaya Trump dan Xi mempertahankan gencatan perdagangan menjelang pertemuan September.

## **Ekonomi India Tumbuh 7,1%, Investasi Swasta Melemah**

Selasa, 25 Agustus 2026 13:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-india-tumbuh-71-investasi-swasta-melemah>

KONTAN.CO.ID – BENGALURU. Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mulai kehilangan momentum. Produk domestik bruto (PDB) India diproyeksikan tumbuh 7,1% secara tahunan pada kuartal II-2026, melambat dari 7,8% pada kuartal sebelumnya.

Proyeksi tersebut berdasarkan jajak pendapat Reuters terhadap 58 ekonom pada 17-24 Agustus. Jika terealisasi, India masih menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara-negara ekonomi utama dunia.

Perlambatan terutama dipicu investasi swasta yang belum menunjukkan penguatan secara luas dan berkelanjutan. Sebaliknya, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih menjadi penopang utama ekonomi India.

Pemangkasan tarif Pajak Barang dan Jasa (GST) serta pajak penghasilan yang dilakukan tahun lalu juga masih memberikan ruang bagi pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut membantu menjaga konsumsi di tengah tekanan inflasi.

Namun, prospek investasi swasta masih menjadi perhatian. Melansir Reuters (25/8), Principal Economist HDFC Bank Sakshi Gupta mengatakan, pemulihan investasi yang mulai terlihat sejak paruh kedua tahun lalu belum cukup kuat dan merata.

Ketidakpastian geopolitik turut membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi kapasitas. Tekanan tersebut semakin besar karena harga minyak mentah berada di atas US\$90 per barel.

India sangat bergantung pada impor energi. Lebih dari 85% kebutuhan minyak negara tersebut berasal dari luar negeri. Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya bahan bakar dan transportasi, sekaligus menekan daya beli rumah tangga dan margin perusahaan.

Tekanan terhadap ekonomi juga datang dari pelemahan mata uang rupee. Nilai rupee telah melemah lebih dari 6% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa India masih tumbuh lebih dari 11% secara tahunan pada kuartal II-2026 sehingga memberikan tambahan dukungan bagi pertumbuhan.

Chief Economist Canara Bank Madhavankutty G menilai, investasi swasta belum akan banyak bergerak tanpa kepastian geopolitik. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi India masih akan banyak ditopang belanja modal pemerintah.

Para ekonom juga memperkirakan pertumbuhan India akan kembali melambat pada kuartal-kuartal berikutnya. PDB diproyeksikan tumbuh 6,6% pada kuartal III-2026 dan 6,5% pada kuartal IV-2026.

Untuk tahun fiskal 2026/2027, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan rata-rata 6,7%, sejalan dengan proyeksi Reserve Bank of India (RBI). Sementara pertumbuhan nilai tambah bruto (GVA) diperkirakan mencapai 7,2%.

Di tengah perlambatan tersebut, RBI diperkirakan mempertahankan suku bunga. Para ekonom dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan suku bunga acuan tidak berubah setidaknya selama enam bulan ke depan.

Dengan demikian, tantangan India ke depan bukan hanya menjaga konsumsi, tetapi juga memastikan investasi swasta kembali menjadi mesin pertumbuhan. Harga minyak, pelemahan rupee dan ketidakpastian geopolitik menjadi faktor yang akan menentukan seberapa kuat ekonomi India mempertahankan momentumnya.

## **Baht Thailand Jadi Mata Uang Asia dengan Pelemahan Terbesar, Turun 0,16%**

Selasa, 25 Agustus 2026 09:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://investasi.kontan.co.id/news/baht-thailand-jadi-mata-uang-asia-dengan-pelemahan-terbesar-turun-016>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mata uang Asia bergerak tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (25/8/2026). Baht Thailand menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar, sedangkan rupiah stagnan.

Mengutip Reuters pukul 02.15 GMT atau 09.15 WIB, baht melemah 0,16% ke 32,750 per dolar AS. Sementara itu, rupiah bertahan di Rp 17.705 per dolar AS. Yen Jepang melemah 0,11% ke 159,260 per dolar AS.

Dolar Singapura dan dolar Taiwan masing-masing turun 0,03%. Sebaliknya, won Korea Selatan dan peso Filipina menguat 0,03%.

Jika dihitung sejak akhir 2025, rupiah telah melemah 5,85% terhadap dolar AS. Pelemahan rupiah masih lebih kecil dibandingkan rupee India yang turun 6,14%, tetapi lebih dalam dari baht Thailand yang terkoreksi 3,97%.

Di sisi lain, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang Asia dengan penguatan terbesar sepanjang tahun, yakni 4,10%. Yuan China menguat 3,92%, sedangkan dolar Singapura naik 1,19%.

Pergerakan tersebut menunjukkan tekanan terhadap mata uang Asia masih beragam, dengan rupiah tetap menghadapi tekanan cukup besar terhadap dolar AS sepanjang 2026.

# Beban Bunga Utang Melonjak di 2027, Pemerintah Dinilai Lalai Efisiensi Anggaran

Selasa, 25 Agustus 2026 15:21 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/beban-bunga-utang-melonjak-di-2027-pemerintah-dinilai-lalai-efisiensi-anggaran>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban bunga utang pemerintah semakin besar seiring peningkatan jumlah utang.

Pada tahun 2027, pemerintah harus menyiapkan dana Rp 650,31 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut tumbuh 11,69% dibanding outlook tahun ini.

Di satu sisi, pembayaran bunga utang dalam negeri naik 9,64% atau Rp 589,68 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp 60,63 triliun, atau naik paling tinggi sebesar 36,46%.

Ekonom Bright Institute Andri Perdana menilai, peningkatan beban bunga utang tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dinilai belum cukup efisien dalam mengelola anggaran.

Menurutnya, kondisi suku bunga yang masih tinggi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat. Hal ini membuat penerimaan negara berisiko tidak mencapai target sehingga kebutuhan pembiayaan kembali ditutup melalui penerbitan utang baru.

“Selain dari suku bunga yang masih tinggi ketika ekonomi di bawah lemah sehingga penerimaan tidak bisa mencapai target dan harus kembali ditutupi dengan penerbitan utang baru,” kata Andri, Selasa (25/8/2026).

Di sisi lain, ia menilai ekspansi penerbitan utang pada pemerintahan sebelumnya turut memberikan dampak terhadap peningkatan beban bunga saat ini.

Menurutnya, pelaksanaan berbagai program unggulan pemerintah tanpa didahului proyek percontohan (pilot project) juga berpotensi mendorong kebutuhan penerbitan utang baru.

“Dipaksakannya program-program flagship Presiden tanpa pilot project terus mendorong penerbitan utang baru dengan suku bunga tinggi,” ujarnya.

Andri secara khusus menyoroti lonjakan pembayaran bunga utang luar negeri. Menurut dia, terdapat dua faktor utama yang perlu diperhatikan, yakni pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri.

Depresiasi rupiah akan meningkatkan nilai kewajiban pemerintah dalam rupiah ketika utang dalam valuta asing harus dibayarkan. Sementara itu, peningkatan belanja alutsista dari luar negeri turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.

“Yang paling bisa diperhatikan pada membengkaknya bunga utang luar negeri adalah dua faktor, yang pertama depresiasi nilai rupiah, dan yang kedua adalah melonjaknya pembelian alutsista dari luar negeri,” jelasnya.

Andri menilai peningkatan beban bunga utang tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia bahkan menilai kondisi tersebut belum dapat dikatakan aman apabila tren peningkatan beban bunga terus berlanjut.

“Kalau ditanya aman atau tidak jelas tidak aman,” tegasnya.

Meski demikian, risiko yang muncul menurutnya lebih bersifat kronis dan tidak serta-merta memicu krisis dalam waktu dekat. Persoalannya, peningkatan pembayaran bunga utang secara terus-menerus dapat menggerus ruang fiskal pemerintah.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai pemerintah pada periode berikutnya akan menghadapi ruang anggaran yang semakin terbatas karena sebagian besar penerimaan harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang.

“Dalam kemungkinan terbaik saja efeknya kronis, bukan langsung krisis, tapi di pemerintahan selanjutnya akan terseok-seok untuk bisa mengelola anggaran karena ruang fiskalnya sudah habis duluan untuk membayar bunga utang saja,” pungkas Andri.

## **Transfer ke Daerah 2027 Hanya Rp735 Triliun, KPPOD Soroti Tekanan Fiskal Daerah**

Selasa, 25 Agustus 2026 15:03 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/transfer-ke-daerah-2027-hanya-rp735-triliun-kppod-soroti-tekanan-fiskal-daerah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah masih menghadapi tekanan fiskal di tengah rencana pemerintah pusat mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 735 triliun dalam RAPBN 2027.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai, penyesuaian anggaran yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah tidak terlepas dari kebijakan pemangkasan TKD dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Herman, kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Pasalnya, struktur pendapatan daerah tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga transfer dari pemerintah pusat.

“Kami melihat ini lebih karena kebijakan pemangkasan transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat satu-dua tahun ini. 2025 kan ada pemangkasan, kemudian 2026 juga ada pemangkasan transfer ke daerah. Itu berpengaruh juga ke penerimaan daerah,” ujar Herman kepada Kontan, Selasa (25/8/2026).

Herman menjelaskan, dampak pemangkasan TKD tidak hanya dirasakan dari sisi penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. PAD juga berpotensi ikut tertekan karena aktivitas ekonomi di sejumlah daerah masih bergantung pada belanja pemerintah.

Ketika belanja pemerintah daerah dikurangi akibat keterbatasan fiskal, sektor-sektor ekonomi yang selama ini mendapatkan manfaat dari belanja tersebut juga dapat terdampak.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah.

“Transfer ke daerah itu kan memang jelas berpengaruh ketika misalnya pemerintah pusat memangkas TKD. Itu berpengaruh juga ke penerimaan daerah dari TKD. Sementara di sisi penerimaan, terutama dari pajak daerah dan PAD, itu juga terpengaruh oleh pemangkasan transfer ke daerah,” jelasnya.

Herman menilai kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyesuaian tersebut antara lain tercermin dalam perubahan APBD 2026 maupun proyeksi penerimaan untuk tahun berikutnya.

Salah satu contohnya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Proyeksi pendapatan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 turun Rp684,12 miliar, dari Rp5,22 triliun menjadi Rp4,53 triliun.

Menurut Herman, penurunan pendapatan tersebut pada akhirnya memaksa pemerintah daerah melakukan prioritas ulang terhadap program yang telah direncanakan.

Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) idealnya mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Namun, ketika kapasitas fiskal berubah, pemerintah daerah harus memilih program yang masih dapat dibiayai.

“Ketika misalnya idealnya RKPD itu disupport oleh anggaran yang kompatibel dengan perencanaan, tapi karena adanya pemangkasan transfer ke daerah, mereka melakukan penyesuaian. Mereka harus memilih program-program yang bisa disupport dengan kondisi fiskal yang ada,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan maupun meningkatkan pelayanan publik.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, anggaran yang tersedia dikhawatirkan lebih banyak terserap untuk belanja operasional, terutama belanja pegawai.

Karena itu, KPPOD berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi TKD dalam APBN 2027. Herman menilai angka Rp735 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2027 masih perlu ditingkatkan agar memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah.

“Karena ini masih sifatnya rancangan, belum definitif melalui undang-undang, mestinya pemerintah pusat itu bisa menaikkan itu agar memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, terutama untuk belanja-belanja yang parah kepada pelayanan publik atau pembangunan daerah pada umumnya,” ujarnya.

Herman menilai, secara ideal besaran TKD perlu disesuaikan dengan kebutuhan belanja dan program masing-masing daerah. Ia menekankan prinsip money follow function dan money follow program dalam menentukan besaran transfer.

“Kalau bicara agregat secara nasional, kita berharap dengan APBN kita dirancang Rp4.000-an triliun, mestinya TKD itu minimal seperti yang tahun 2025 sebesar Rp900-an triliun. Atau sebetulnya kalau bicara yang lebih ideal lagi ya di atas Rp1.000 triliun,” ungkapnya.

Di sisi lain, Herman mengatakan pemerintah daerah juga perlu memperkuat sumber pendapatan sendiri. Dalam jangka pendek, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan PAD melalui perbaikan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Namun, KPPOD tidak mendorong pemerintah daerah sekadar menaikkan tarif. Menurut Herman, perbaikan administrasi pemungutan dan basis data justru perlu menjadi prioritas.

“Kami di KPPOD mendorong pemda itu tidak menaikkan tarif, tapi lebih pada pembenahan di sisi administrasi pemungutannya dan juga database-nya yang perlu dirapikan,” katanya.

Untuk jangka panjang, pemerintah pusat juga dinilai perlu memberikan pendampingan kepada daerah dalam melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan alternatif.

Herman mencontohkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan kapasitas fiskal dan kesiapan yang memadai.

Namun, ia menekankan kebijakan fiskal daerah tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam. Dukungan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

“Jangan samakan antara daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal yang tinggi dengan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah karena punya pengaruh efektivitas yang berbeda-beda di daerah,” pungkasnya.

## **Rupiah Melemah ke Rp 17.723 Hari Ini, Cek Proyeksi untuk Rabu (26/8)**

Selasa, 25 Agustus 2026 16:45 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Yudho Winarto

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-ke-rp-17723-hari-ini-cek-proyeksi-untuk-rabu-268>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah bergerak terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (25/8/2026), meski pasar domestik libur nasional.

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup di level Rp 17.723 per dolar AS, melemah tipis 0,03% dibandingkan posisi penutupan Senin (24/8) di Rp 17.721 per dolar AS.

Pergerakan rupiah berlangsung di tengah penguatan dolar AS serta meningkatnya sentimen risk-off di pasar global.

Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh penguatan dolar AS di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

"Rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS yang rebound di tengah sentimen risk-off global akibat meningkatnya ketidakpastian terkait dampak Economic D-Day yang diserukan AS," ujar Lukman kepada Kontan, Senin (24/8/2026).

Menurut Lukman, ketidakpastian tersebut berkaitan dengan potensi pemberlakuan sanksi AS terhadap negara pihak ketiga, bank asing, maupun perusahaan komersial yang memberikan dukungan ekonomi vital kepada Iran.

Kondisi tersebut mendorong investor untuk lebih berhati-hati dan berpotensi meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven, termasuk dolar AS. Pada akhirnya, sentimen tersebut memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

### **Rupiah Diproyeksikan Rp 17.700-Rp 17.800**

Untuk perdagangan Rabu (26/8/2026), Lukman mengatakan pelaku pasar masih akan mencermati perkembangan terkait sanksi AS terhadap Iran.

Selain sentimen geopolitik, pasar juga akan menunggu sejumlah data ekonomi penting dari AS yang dapat memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Federal Reserve.

Salah satunya adalah data Personal Consumption Expenditures (PCE) yang menjadi salah satu indikator inflasi utama yang diperhatikan The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga.

Pasar juga akan mencermati revisi kedua pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi perekonomian Negeri Paman Sam.

"Pasar masih akan mencermati perkembangan sanksi AS dan data ekonomi AS," kata Lukman.

Dengan mempertimbangkan berbagai sentimen tersebut, Lukman memperkirakan rupiah pada perdagangan Rabu (26/8/2026) akan bergerak dalam rentang Rp 17.700-Rp 17.800 per dolar AS.

## **BI: Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 Catat Penjualan UMKM Rp144,2 Miliar, Naik 46%**

Selasa, 25 Agustus 2026 13:13 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Yudho Winarto

<https://industri.kontan.co.id/news/bi-karya-kreatif-indonesia-kki-2026-catat-penjualan-umkm-rp1442-miliar-naik-46>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) mencatatkan penjualan sementara produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp144,2 miliar hingga 22 Agustus 2026. Nilai tersebut meningkat 46% dibandingkan capaian KKI pada 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, KKI 2026 juga menghasilkan business matching (BM) ekspor senilai Rp169,9 miliar. Kegiatan tersebut melibatkan 192 UMKM dengan pembeli dari 16 negara.

Selain itu, BM pembiayaan mencapai Rp285 miliar, atau meningkat 30,3% dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir.

“Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses UMKM terhadap pasar, pembiayaan, dan jejaring bisnis di dalam maupun luar negeri,” tutur Aida dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Menurut Aida, KKI 2026 tidak hanya berfungsi sebagai ajang promosi dan transaksi produk UMKM, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem UMKM yang berorientasi pada dampak.

Penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi, pembangunan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir, inovasi produk dan merek lokal oleh generasi muda, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

“Setiap tahun, dengan penuh rasa syukur kami adakan KKI agar UMKM Indonesia bisa terus tumbuh, tangguh, dan berdaya saing. Tapi, UMKM perlu mempunyai ekosistem yang menjadi tujuan berkelanjutan agar tumbuh, tangguh, dan berdaya saingnya UMKM Indonesia terus berlangsung,” ujar Aida.

### **Libatkan 1.860 UMKM**

KKI 2026 melibatkan lebih dari 1.860 UMKM dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hampir 560 UMKM berpartisipasi secara luring dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari wastra, ready to wear, makanan dan minuman, home decor, hingga karya kreatif generasi muda.

Ajang tersebut juga didukung oleh 27 kementerian/lembaga serta 34 asosiasi, mitra, pelaku industri, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bank Indonesia turut memperluas akses pasar UMKM melalui jaringan 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan lima Kantor Perwakilan Luar Negeri.

Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas UMKM dengan pasar domestik maupun global, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan dan jejaring bisnis.

BI menyatakan akan terus mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar dan pembiayaan, memperkuat inovasi serta digitalisasi, dan mengembangkan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

“Cintai, bangga, dan pakai produk UMKM Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi UMKM Indonesia menjadi tuan rumah produk Indonesia dan bisa tumbuh, tangguh, dan berdaya saing,” pesan Aida.

## Harga Daging Ayam dan Gula Naik Hari Ini

Selasa, 25 Agustus 2026 16:40 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119435/harga-daging-ayam-dan-gula-naik-hari-ini/2>

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional milik Bank Indonesia (BI) hingga pukul 15.05 WIB harga pangan hewani seperti daging ayam ras segar naik 6,95% menjadi Rp44.650 per kilogram (kg).

Kenaikan juga disusul daging sapi kualitas 1 dan kualitas 2 yang turut mengalami kenaikan masing-masing 1,35% serta 2,11% menjadi Rp153.450 per kg dan Rp145.450 per kg.

Selain itu, harga bawang putih ukuran sedang ikut naik 0,62% menjadi Rp40.450 per kg. Gula pasir kualitas premium juga ikut naik 1,23% menjadi Rp20.550 per kg.

Pada seluruh produk minyak goreng terpantau mengalami kenaikan. Minyak goreng curah kini berada di kisaran harga Rp21.850 per kg, minyak goreng kemasan bermerk 1 berada di harga Rp24.650 per kg, serta minyak goreng bermerk 2 naik menjadi Rp23.600 per kg.

Kendati demikian, sejumlah harga pangan terpantau mengalami penurunan harga.

Seperti pada kelompok beras turun harga mulai dari beras kualitas medium I turun 2,12% menjadi Rp16.150 per kg, disusul beras kualitas medium II yang turun hingga 3,07% menjadi Rp15.800 per kg.

Beras kualitas super I dan kualitas super II turut mengalami penurunan harga secara rata-rata nasional dikisaran harga Rp17.250 per kg dan Rp16.750 per kg atau turun masing-masing 2,28% serta 2,9%.

Beras kualitas bawah I juga turun 0,34% menjadi Rp14.750 per kg, sementara beras kualitas bawah II tetap berada di harga Rp14.650 per kg.

Di sisi pangan hortikultura bawang merah ukuran sedang kini berada di harga Rp38.750 per kg atau turun 0,64%. Di susul komoditas cabai secara keseluruhan seperti cabai merah besar yang turun menjadi Rp45.250 per kg.

Cabai merah keriting turun 6,63% menjadi Rp47.900 per kg. Cabai rawit hijau dan cabai rawit merah juga turun masing-masing hingga 10,41% dan 2,38% menjadi Rp50.350 per kg dan Rp65.750 per kg.

Adapun gula pasir lokal juga turun harga mencapai Rp19.000 per kg, sementara telur ayam ras segar turun hingga 0,34% menjadi Rp29.250 per kg.

# UMKM Banyumas Raya berhasil tembus pasar ekspor lewat KKI 2026

Selasa, 25 Agustus 2026 12:46 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642980/umkm-banyumas-raya-berhasil-tembus-pasar-ekspor-lewat-kki-2026>

Purwokerto (ANTARA) - Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari wilayah Banyumas Raya berhasil membuka peluang pasar ekspor melalui keikutsertaan dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta pada 20-23 Agustus.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Aswin Gantina di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan hasil business matching dalam KKI 2026 mencatat potensi transaksi ekspor UMKM Banyumas Raya sebesar 26 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp460 juta.

“Capaian UMKM Banyumas Raya (Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara) pada KKI 2026 menunjukkan bahwa produk unggulan daerah memiliki kualitas dan potensi pasar yang semakin luas,” katanya.

Menurut dia, potensi transaksi ekspor tersebut berasal dari pembeli di Afrika dan Singapura.

Selain itu, kata dia, buyer dari Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan terhadap produk UMKM Abon Koki yang ditindaklanjuti dengan pengiriman sampel produk.

“Banyumas Raya turut mengambil bagian dalam KKI 2026 melalui UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto yang mengikuti lima kategori, yakni Rumah Nusantara, Wastra Nusantara, Laras Nusantara, Cangkir Nusantara, dan Camilan Nusantara,” katanya.

Ia mengatakan kategori Rumah Nusantara diikuti Benang Mas, Kharisma Kerang, dan D&D Craft. Sementara kategori Wastra dan Laras Nusantara diwakili Pringmas, DK Gallery, serta Martadiredja.

Selanjutnya untuk kategori Cangkir Nusantara, Banyumas Raya diwakili Koperasi Pageland/Kasmaran, sedangkan kategori Camilan Nusantara diikuti Bunga Palm, Wins Brown Sugar, dan Abon Koki.

“Selain membuka peluang ekspor, keikutsertaan dalam KKI 2026 juga menghasilkan transaksi penjualan. Produk Banyumas Raya pada kategori Laras Nusantara mencatat penjualan Rp131,35 juta melalui Batik Martadiredja dan DK Fashion,” katanya.

Sementara itu, kata dia, kategori Wastra Nusantara mencatat penjualan Rp80,10 juta melalui Batik Pringmas.

Selanjutnya produk UMKM pada kategori home decor, Cangkir Nusantara, dan Camilan Nusantara juga menjangkau konsumen lebih luas selama penyelenggaraan KKI 2026.

Ia menilai capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat inovasi, jejaring, dan akses pasar UMKM Banyumas Raya.

“Melalui perluasan pasar, terbukanya peluang ekspor dan prestasi yang diraih menjadi momentum untuk terus memperkuat inovasi, jejaring, dan akses pasar UMKM Banyumas Raya,” katanya.

Menurut dia, Fadhluloh Bilal Chibrani yang merupakan perwakilan Banyumas Raya juga meraih Juara Favorit 2 dalam kompetisi Cangkir Barista.

Secara nasional, kata dia, KKI 2026 mencatat penjualan sementara Rp144,2 miliar hingga 22 Agustus 2026 atau meningkat 46 persen dibandingkan capaian 2025.

“Business matching ekspor mencapai Rp169,9 miliar, melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara,” kata Aswin

## **Pertumbuhan Ekonomi Pekalongan Naik 5,88 Persen, Sukirman : Saatnya Bangkit**

Selasa, 25 Agustus 2026 15:49 WIB

Penulis: Indra Dwi Purnomo, Editor: Muh Radlis

<https://jateng.tribunnews.com/kajen-setara/1264249/pertumbuhan-ekonomi-pekalongan-naik-588-persen-sukirman-saatnya-bangkit>

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren positif.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,88 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 5,08 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu modal bagi Kabupaten Pekalongan untuk terus bangkit dan meningkatkan daya saing daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman, menyampaikan capaian tersebut dalam amanatnya saat memimpin Apel Besar Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan di Lapangan Belakang Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (25/8/2026).

Mengusung tema 'Kajen Bangkit, Satukan Hati Bangun Negeri', peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan capaian pembangunan sekaligus memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat.

"Marilah kita bersama-sama meneguhkan komitmen untuk memajukan Kabupaten Pekalongan dengan semangat kebersamaan dan inovasi."

"Kita harus terus berupaya, agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan," kata Sukirman.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus diikuti dengan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya terlihat dari tingkat kemiskinan yang turun dari 8,95 persen menjadi 8,05 persen.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan juga mengalami penurunan menjadi 3,24 persen.

"Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan pada 2025 meningkat menjadi 72,71, dari sebelumnya 71,95 pada 2024," katanya.

Sukirman menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Justru, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Pekalongan.

"Sudah saatnya kita bangkit bersama-sama mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang maju dan unggul dibandingkan dengan daerah lain," ujarnya.

### **Infrastruktur Terus Didorong**

Selain indikator ekonomi dan kesejahteraan, Pemkab Pekalongan terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai penunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Sukirman menyebut pembangunan jalan, jembatan, dan drainase terus dilakukan dengan dukungan anggaran lebih dari Rp 60 miliar.

Pembangunan dan relokasi Rumah Sakit Kraton juga terus berjalan. Proyek dengan alokasi anggaran Rp196,6 miliar tersebut saat ini telah memasuki tahap finishing dan ditargetkan selesai pada April 2027.

Tak hanya pembangunan fisik, pemerintah daerah juga memperkuat tata kelola pemerintahan. Penguatan integritas dilakukan melalui whistleblowing system, pengendalian gratifikasi, serta kebijakan pencegahan benturan kepentingan.

"Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan tahun 2025 juga mencapai 81,11 dengan kategori A-," ungkap Sukirman.

### **Raih Sejumlah Penghargaan**

Berbagai capaian tersebut turut dilengkapi dengan sejumlah penghargaan yang diterima Kabupaten Pekalongan sepanjang 2026.

Di antaranya penghargaan atas pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi tahun 2025. Kabupaten Pekalongan juga meraih penghargaan Pengawasan Kearsipan dengan predikat AA atau "Sangat Memuaskan".

Sukirman mengatakan berbagai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Semua ini adalah hasil kerja kita bersama, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya," tuturnya.

### **Jaga Kondusivitas Pilkades**

Memasuki agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026 di 34 desa, Sukirman mengajak seluruh pihak menjaga sinergi dan kondusivitas.

Ia berharap pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkades agar berlangsung aman, lancar, dan tertib.

"Saya berharap semua elemen dapat bersinergi bersama untuk mengawal dan mengamankan agenda besar ini agar berjalan dengan lancar dan kondusif," pungkasnya. (Dro)

# Jelang KTT Xi-Trump, AS Berencana Kenakan Tarif 7,5% ke China

Rabu, 26 Agustus 2026 10:20 WIB

Lucille Liu dan Jenny Leonard

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119491/jelang-ktt-xi-trump-as-berencana-kenakan-tarif-7-5-ke-china/2>

Bloomberg, Amerika Serikat (AS) bersiap mengenakan tarif sebesar 7,5% terhadap barang-barang asal China atas tuduhan kelebihan kapasitas manufaktur jelang pertemuan puncak (KTT) antara Xi Jinping dan Donald Trump bulan depan, menurut sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Langkah ini akan mengembalikan besaran tarif era periode kedua pemerintahan Trump atas China ke kisaran 20%, sebuah tingkatan yang sebelumnya disebut Beijing masih sejalan dengan kesepakatan gencatan senjata dagang mereka dengan Washington. Tarif baru ini melengkapi pungutan lain yang telah diterapkan selama masa jabatan pertama Trump dan dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Kebijakan ini menjadi langkah terbaru Trump untuk menghidupkan kembali agenda perdagangan proteksionisnya setelah Mahkamah Agung AS membatalkan pajak impor yang sebelumnya ia tetapkan atas produk China dan puluhan negara lainnya, sembari tetap menjaga agar konflik dagang dengan Beijing tidak melampaui ambang batas yang telah disepakati.

Besaran tarif pasti masih belum difinalisasi, kata para sumber yang berbicara dalam kondisi anonim. Trump juga dikenal kerap menyampaikan tuntutan atau perubahan di menit-menit terakhir menjelang pengumuman kebijakan perdagangan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengumumkan tarif yang lebih tinggi untuk China, tetapi menangguk sebagian di antaranya guna menekan besaran tarif efektif menjadi 7,5%, ungkap seorang sumber yang memahami pembahasan tersebut.

Detail mengenai tarif mana yang akan ditangguk dan berapa lama penanggukan tersebut berlaku masih dalam tahap negosiasi, tambah para sumber. Beijing dan Washington juga berupaya memperpanjang pakta perdagangan mereka, yang menetapkan gencatan senjata selama satu tahun dan dijadwalkan berakhir pada 10 November mendatang.

Pada Maret lalu, pemerintahan Trump meluncurkan penyelidikan terhadap belasan mitra dagang utama di bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 atas kekhawatiran kelebihan kapasitas. Ini merupakan satu dari dua penyelidikan yang digunakan tim presiden untuk menggantikan tarif sebelumnya dengan kebijakan yang lebih mengikat secara hukum.

## KTT September

Para pejabat pemerintahan berharap dapat memublikasikan hasil penyelidikan kelebihan kapasitas tersebut sebelum Trump dan Xi dijadwalkan bertemu di Washington pada 24 September. Proses penyusunan detail laporan kelebihan kapasitas ini terbukti menghadirkan tantangan dari segi hukum, menurut pihak-pihak yang mengetahui masalah tersebut.

Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative) Jamieson Greer menyampaikan kepada Bloomberg Television pada Juli lalu bahwa penyelidikan kelebihan kapasitas akan memakan waktu lebih lama dibandingkan investigasi terkait kerja paksa karena kompleksitasnya, dan penundaan tersebut tidak ada hubungannya dengan upaya mempertahankan gencatan senjata dengan Beijing.

Saat dikonfirmasi mengenai rencana tarif tersebut, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa pengumuman apa pun akan disampaikan langsung oleh pihak pemerintah, dan setiap pemberitaan atau diskusi terkait hal itu harus dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar. Kantor Perwakilan Dagang AS tidak segera merespons permintaan komentar, sementara Kementerian Perdagangan China tidak membalas surat faks yang dikirimkan.

Pendekatan pemerintahan Trump terhadap China sebagai rival geopolitik utamanya berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap sejumlah sekutu tradisional terbesar AS. Saat Trump berhati-hati agar tidak merusak gencatan senjata tarif dengan China, pemerintahannya justru menerapkan tarif 50% atas produk Kanada senilai miliaran dolar dan sempat mewacanakan untuk membatalkan perjanjian perdagangan Amerika Utara yang pernah ia negosiasikan kembali pada masa jabatan pertamanya.

Trump tengah membangun kembali dinding tarif yang sempat diruntuhkan ketika Mahkamah Agung pada Februari lalu memutuskan bahwa bea masuk global yang ia terbitkan di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act) melanggar Konstitusi AS. Tarif global sementara sebesar 10% yang diterapkan presiden telah berakhir pada Juli, dan juga dinyatakan ilegal oleh pengadilan perdagangan.

Pihak kementerian membenarkan penetapan bea masuk global barunya berdasarkan temuan penyelidikan terhadap praktik kerja paksa dan kelebihan kapasitas industri di puluhan negara mitra dagang.

Sebagai bagian dari kampanye tersebut, pemerintahan Trump pada Juli menjatuhkan tarif 12,5% pada barang-barang Tiongkok dengan alasan minimnya upaya dalam mengatasi praktik kerja paksa. Meski Beijing mengkritik langkah itu, mereka tidak sampai mengumumkan tindakan balasan, melainkan menyatakan bahwa Washington telah sepakat untuk membatasi bea masuk tambahan pada ekspor Tiongkok maksimal di angka 20%. Pernyataan ini memperjelas kualifikasi sebelumnya yang mengacu pada batas atas tarif yang dibahas dalam perundingan dagang tahun lalu.

### **Kesepakatan Malaysia**

"Kami berharap AS akan menepati komitmennya, memastikan bahwa apa pun alasan yang diberikan untuk menerapkan atau mengganti tarif terhadap China di masa mendatang, tarif AS atas China tidak akan melebihi tingkat yang telah digariskan dalam konsultasi perdagangan di Kuala Lumpur," tulis Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan resmi pada Mei lalu.

Pasal 301 mengizinkan Perwakilan Dagang AS, di bawah arahan presiden, untuk mengenakan tarif sebagai respons atas kebijakan perdagangan negara lain yang dinilai diskriminatif terhadap bisnis Amerika atau melanggar hak-hak AS di bawah perjanjian perdagangan internasional. Namun, upaya untuk menerapkan pungutan ini telah berhadapan dengan gugatan hukum.

Koalisi 25 negara bagian termasuk New York, California, dan Illinois awal bulan ini mengajukan gugatan di Pengadilan Perdagangan Internasional AS, menambah deretan gugatan serupa oleh pelaku usaha kecil yang mengklaim pungutan tersebut ilegal. Negara-negara bagian tersebut menuduh Trump secara melawan hukum menggunakan Pasal 301 untuk menggantikan tarif yang telah dibatalkan Mahkamah Agung dengan menjadikan dalih kerja paksa sebagai alasan.

Pemerintahan Trump menegaskan bahwa tarif di bawah Pasal 301 sah secara hukum dan ketentuan tersebut telah didukung oleh putusan-putusan pengadilan sebelumnya.

Perselisihan lain berpotensi menyuntikkan ketidakpastian baru dalam KTT mendatang. Menteri Keuangan Scott Bessent pada Senin mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara mana pun yang berbisnis dengan Iran, sementara pembatasan teknologi terbaru oleh AS telah mendorong Beijing untuk memperketat kontrol ekspor minirakal (drone), menjatuhkan sanksi pada

entitas Amerika, serta memperingatkan bakal adanya langkah balasan lanjutan jika Washington melanjutkan kebijakannya.

## **BBM Mahal, Keyakinan Konsumen AS Anjlok ke Level Terendah**

Rabu, 26 Agustus 2026 06:40 WIB

Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119460/bbm-mahal-keyakinan-konsumen-as-anjlok-ke-level-terendah/2>

Bloomberg, Tingkat keyakinan konsumen di Amerika Serikat (AS) merosot pada Agustus ke level terendah sejak awal tahun seiring memburuknya prospek kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja.

Indeks keyakinan konsumen yang dirilis The Conference Board turun 0,8 poin menjadi 89,4 setelah adanya revisi penurunan pada angka bulan sebelumnya, menurut data yang dipublikasikan pada Selasa (26/8). Indikator ekspektasi untuk enam bulan ke depan merosot ke level terendah sejak Januari, meskipun indikator kondisi saat ini melonjak ke level tertinggi dalam empat bulan terakhir.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) serta tekanan biaya hidup yang kian meluas, ditambah dengan melambatnya perekrutan tenaga kerja, terus membebani rumah tangga di AS bulan ini. Data terbaru menunjukkan penjualan eceran AS pada Juli mengalami penurunan terdalam dalam lebih dari satu tahun terakhir karena konsumen mulai mengerem pengeluaran setelah pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama 2026.

Periode survei untuk laporan ini berlangsung pada 3–16 Agustus, kurva waktu yang mencatat rata-rata harga BBM di pompa bensin bertahan di atas US\$4 per galon akibat kembali memanasnya konflik AS-Iran yang mengerek harga minyak dunia. AS pada Senin mengumumkan rencana untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, langkah yang berpotensi menjaga biaya bahan bakar tetap tinggi jika kekhawatiran atas pasokan minyak terus berlanjut.

Survei The Conference Board menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi pasar tenaga kerja saat ini sebenarnya membaik pada Agustus. Proporsi konsumen yang menyatakan lapangan kerja melimpah mengalami peningkatan, sementara persentase yang menyebut pekerjaan sulit didapat justru menurun. Selisih antara kedua indikator tersebut—metrik yang dipantau ketat oleh para ekonom—mencapai rekor terlebar sepanjang tahun ini.

Kendati demikian, dalam memandang masa depan, konsumen cenderung lebih pesimistis terhadap prospek pekerjaan dan pendapatan mereka. Mereka juga kurang optimistis mengenai kondisi bisnis mendatang, meskipun persentase responden yang berencana mengambil liburan dalam enam bulan ke depan naik ke level tertinggi sejak Januari.

"Perkiraan pengeluaran untuk sektor jasa menurun pada Agustus setelah sempat melonjak pada sebagian besar aktivitas diskresioner bulan lalu, seiring lebih rendahnya harga bensin dan gelaran Piala Dunia musim panas yang diduga mendorong keinginan konsumen untuk berbelanja pada Juli," tulis laporan tersebut. "Meski begitu, konsumen secara keseluruhan tetap berencana menghabiskan lebih banyak dana untuk sektor jasa selama enam bulan ke depan."

Secara terpisah, indikator sentimen konsumen yang dirilis Universitas Michigan turut mencatat penurunan pada Agustus untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir, lantaran rumah tangga mengkhawatirkan memburuknya kondisi bisnis dan melambungnya inflasi.

Departemen Perdagangan AS dijadwalkan merilis data pengeluaran konsumen, pendapatan, dan inflasi bulan Juli pada Rabu. Para ekonom memprediksi laporan tersebut akan menunjukkan bahwa pengeluaran yang telah disesuaikan dengan inflasi mengalami stagnasi pada bulan lalu.

## **Bos IMF Desak Pemerintah Seluruh Dunia Atasi Risiko Fiskal**

Rabu, 26 Agustus 2026 05:30 WIB

Jorgelina do Rosario

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119457/bos-imf-desak-pemerintah-seluruh-dunia-atasi-risiko-fiskal>

Bloomberg, Di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekonomi global, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mendesak pemerintah untuk mengatasi tantangan fiskal yang kian besar dan para bank sentral untuk tetap berkomitmen menurunkan inflasi.

“Semua negara perlu mengatasi masalah fiskal mereka serta menyusun dan menyampaikan rencana kredibel untuk memastikan utang dan defisit mereka berada di jalur yang berkelanjutan,” kata Georgieva kepada wartawan dalam pernyataan di kantor pusat IMF di Washington, Selasa (25/8).

“Bank sentral harus benar-benar fokus pada mandatnya untuk menjaga stabilitas harga,” tambahnya.

Georgieva mengatakan ekonomi dunia sejauh ini tetap tangguh menghadapi inflasi yang sulit ditekan dan ketegangan perdagangan, salah satunya berkat lonjakan investasi di bidang kecerdasan buatan (AI). Namun, ketidakpastian terhadap prospek ekonomi masih tinggi, terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi dan minimnya kemajuan dalam menurunkan inflasi, tambahnya.

Georgieva juga mengatakan guncangan energi yang berasal dari perang di Iran belum berakhir. “Singkatnya, kita benar-benar menghadapi tarik-menarik antara guncangan pasokan negatif dari Timur Tengah dan guncangan permintaan positif dari AI.”

IMF akan menggelar pertemuan tahunan di Bangkok pada Oktober, ketika lembaga tersebut diperkirakan merilis penilaian terbaru mengenai ekonomi global. Pada Juli, IMF mempertahankan sebagian besar proyeksi pertumbuhan ekonomi globalnya di level 3% pada 2026, tetapi menaikkan proyeksi harga konsumen global, terutama akibat kenaikan biaya energi dan pangan.

Di antara risiko terhadap prospek ekonomi, Georgieva menyebut menyusutnya cadangan minyak dan gas saat belahan bumi utara memasuki musim dingin, pola cuaca El Niño yang parah yang dapat meningkatkan kerawanan pangan, serta dampak AI terhadap stabilitas keuangan.

“Semua ini tidak memberi ruang untuk berpuas diri, dan itulah pesan utama saya. Kita memang tidak mengalami kondisi yang terlalu buruk, tetapi hal itu tidak boleh membuat kita berkata, ‘Oke, semuanya baik-baik saja, ini mudah,’” ujarnya.

Pekan ini, Georgieva akan menghadiri simposium ekonomi tahunan Federal Reserve di Jackson Hole, Wyoming, untuk pertama kalinya. Gubernur The Fed, Kevin Warsh akan menyampaikan pidato besar pertamanya sejak memimpin bank sentral tersebut, dengan investor mencari petunjuk mengenai arah suku bunga ke depan.

Berbicara mengenai tinjauan pengawasan yang sedang dilakukan di IMF, Georgieva mengatakan lembaga tersebut “mendorong penggunaan skenario dan perencanaan kontingensi yang lebih besar untuk membantu negara-negara bergerak lebih gesit di tengah dunia yang semakin tidak pasti.”

# Pendapatan Pribadi Warga AS Naik 0,4% pada Juli 2026, Belanja Konsumen Melambat

Rabu, 26 Agustus 2026 20:09 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/pendapatan-pribadi-warga-as-naik-04-pada-juli-2026-belanja-konsumen-melambat>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pendapatan pribadi masyarakat Amerika Serikat (AS) meningkat pada Juli 2026, tetapi pertumbuhan belanja konsumen melambat. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli rumah tangga AS masih bertahan, meski konsumsi riil nyaris tidak bertumbuh di tengah kenaikan harga.

Berdasarkan laporan Bureau of Economic Analysis (BEA), Rabu (26/8/2026), pendapatan pribadi (personal income) naik US\$ 115,1 miliar atau 0,4% secara bulanan pada Juli 2026. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan kenaikan 0,2% pada Juni, serta lebih tinggi dibanding konsensus proyeksi ekonom yang memprediksi pertumbuhan 0,2% di Juli.

Pendapatan pribadi setelah dikurangi pajak alias disposable personal income (DPI) meningkat US\$ 125,9 miliar atau 0,5% pada Juli. Realisasi ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,2% pada bulan sebelumnya.

Kenaikan pendapatan pribadi terutama berasal dari peningkatan kompensasi pekerja, manfaat sosial pemerintah, serta pendapatan pribadi dari aset. Di dalam komponen kompensasi, kenaikan terutama didorong oleh upah dan gaji sektor swasta.

Sementara itu, manfaat sosial pemerintah meningkat terutama karena kenaikan pembayaran Medicaid dan Medicare. Pendapatan dividen juga menjadi pendorong utama kenaikan penerimaan pendapatan dari aset.

Di sisi konsumsi, pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures (PCE) meningkat US\$ 36,3 miliar atau 0,2% pada Juli. Pertumbuhan ini melambat dari 0,3% pada Juni. Ini adalah kenaikan PCE nominal.

Kenaikan PCE nominal terutama berasal dari belanja jasa yang meningkat US\$86,2 miliar. Namun, kenaikan tersebut sebagian besar terimbangi oleh penurunan belanja barang sebesar US\$ 49,9 miliar.

Jika memperhitungkan perubahan harga, konsumsi riil hampir tidak berubah. Nilai PCE riil hanya meningkat US\$1,3 miliar atau kurang dari 0,1% secara bulanan pada Juli, setelah tumbuh 0,4% pada Juni.

Data tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan volume konsumsi. Pertumbuhan belanja nominal pada Juli juga sebagian mencerminkan kenaikan harga, terutama ketika konsumsi riil hanya bergerak tipis.

Tekanan harga konsumen berdasarkan indeks PCE kembali meningkat pada Juli. Indeks harga PCE naik 0,2% secara bulanan, setelah turun 0,1% pada Juni. Jika dibandingkan dengan Juli 2025, indeks harga PCE meningkat 3,7%.

Sementara itu, indeks harga PCE inti, yang tidak memasukkan harga makanan dan energi, juga naik 0,2% secara bulanan. Secara tahunan, PCE inti meningkat 3,3%.

Kenaikan pendapatan yang lebih cepat daripada belanja juga mendorong peningkatan tabungan rumah tangga. BEA mencatat tabungan pribadi mencapai US\$ 712,0 miliar pada Juli, dengan rasio tabungan pribadi sebesar 3,0% dari pendapatan pribadi setelah pajak.

Pada Juni, tabungan pribadi tercatat US\$ 646,1 miliar dan rasio tabungan sebesar 2,7%. Dengan demikian, tingkat tabungan meningkat 0,3 poin persentase pada Juli.

Data pendapatan dan konsumsi Juli menjadi salah satu indikator penting untuk melihat daya tahan konsumen AS, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, perlambatan PCE nominal dan hampir stagnannya konsumsi riil menunjukkan rumah tangga mulai menghadapi kombinasi kenaikan harga dan pertumbuhan konsumsi yang lebih terbatas.

## **Inflasi AS Tetap Tinggi pada Juli, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 1,5%**

Rabu, 26 Agustus 2026 19:58 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-as-tetap-tinggi-pada-juli-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-15>

KONTAN.CO.ID - Inflasi Amerika Serikat (AS) tetap tinggi pada Juli 2026, menunjukkan tekanan harga masih sulit mereda dan berpotensi memperumit perdebatan Federal Reserve (The Fed) mengenai arah suku bunga. B

erdasarkan data Bureau of Economic Analysis (BEA) Departemen Perdagangan AS yang dirilis Rabu (26/8/2026), Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index naik 3,7% secara tahunan pada Juli.

Angka tersebut sama dengan pertumbuhan pada Juni dan lebih tinggi dari perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters sebesar 3,6%.

Dengan demikian, inflasi PCE masih berada di atas target The Fed sebesar 2% selama 65 bulan berturut-turut.

Secara bulanan, indeks PCE meningkat 0,2% pada Juli, berbalik dari penurunan 0,1% pada Juni. Penurunan pada Juni sebelumnya merupakan kontraksi bulanan terlemah sejak April 2020.

Inflasi PCE sebelumnya melonjak hingga 4,1% pada Mei, level tertinggi dalam tiga tahun, setelah perang AS-Israel melawan Iran pada akhir Februari mendorong harga energi dan mengganggu sekitar seperlima pasokan minyak global.

Enam bulan setelah konflik tersebut dimulai, situasi belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, intensitas serangan telah menurun dan harga minyak serta tekanan inflasi yang ditimbulkannya telah turun dari level tertinggi pada pertengahan musim semi.

### **Perdebatan Suku Bunga The Fed**

Penurunan inflasi dalam dua bulan terakhir menjadi salah satu alasan mayoritas anggota Federal Open Market Committee (FOMC) memilih mempertahankan suku bunga pada pertemuan Juli.

The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50%-3,75%, level yang telah bertahan sejak Desember.

Namun, perlambatan inflasi yang masih berjalan lambat berpotensi memperkuat pandangan sebagian pejabat The Fed yang menginginkan kebijakan moneter lebih ketat.

Inflasi PCE telah berada di atas target 2% sejak Februari 2021. Kondisi tersebut membuat sebagian pejabat The Fed menilai diperlukan pengetatan lebih lanjut agar inflasi dapat kembali menuju target.

Inflasi PCE sendiri pernah mencapai puncak 7,2% pada Juni 2022. Kenaikan suku bunga agresif The Fed, yang merupakan pengetatan paling tajam sejak 1980-an, kemudian membantu membawa inflasi turun mendekati target.

Namun, proses tersebut kembali menghadapi tekanan setelah Presiden Donald Trump memberlakukan berbagai tarif impor sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu.

Kebijakan tersebut mendorong kenaikan harga berbagai barang dan kemudian diperburuk oleh lonjakan harga energi akibat perang Iran.

Tekanan inflasi juga berpotensi kembali meningkat setelah perundingan perdagangan AS dengan Kanada, mitra dagang terbesar kedua AS, gagal pada Jumat lalu.

Kegagalan tersebut mendorong pemberlakuan tarif baru terhadap impor barang Kanada senilai US\$ 20 miliar.

Washington dan Ottawa juga telah mengumumkan langkah tarif balasan tambahan yang akan berlaku dalam beberapa bulan mendatang jika kesepakatan perdagangan tidak tercapai.

### **Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tak Berubah**

Dalam laporan terpisah, BEA juga mempertahankan estimasi pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal II 2026.

Produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh pada tingkat tahunan 1,5% pada kuartal II. Angka tersebut tidak berubah dari estimasi sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan perekonomian AS masih tumbuh, meski lajunya relatif moderat di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian perdagangan.

Perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga berikutnya.

## **Kanada Balas Tarif Trump dengan Bea Impor hingga 50%**

Rabu, 26 Agustus 2026 18:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/kanada-balas-tarif-trump-dengan-bea-impor-hingga-50>

KONTAN.CO.ID - OTTAWA. Pemerintah Kanada mengambil langkah tegas menghadapi kebijakan tarif terbaru Amerika Serikat (AS) dengan mengenakan bea masuk balasan terhadap impor produk AS senilai sekitar US\$20 miliar per tahun. Ottawa juga menyiapkan paket bantuan miliaran dolar Kanada untuk melindungi dunia usaha dan pekerja yang terdampak perang dagang kedua negara.

Tarif balasan tersebut akan mulai berlaku pada 8 September 2026 dan mencakup sekitar 700 produk AS. Berdasarkan pernyataan pemerintah Kanada, tarif yang dikenakan berada pada level 15%, 25%, hingga 50%.

Kebijakan tersebut merupakan respons langsung terhadap tarif baru Presiden AS Donald Trump terhadap produk impor Kanada senilai sekitar US\$20 miliar. Tarif AS sebesar 50% mulai berlaku pada Sabtu setelah perundingan perdagangan antara kedua negara mengalami kebuntuan.

Langkah saling membalas tarif ini menandai salah satu titik terendah dalam hubungan perdagangan antara Kanada dan AS yang selama ini merupakan sekutu dekat.

Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne mengatakan kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada berbagai kelompok yang terdampak.

"Tarif balasan kami dengan nilai dolar demi dolar dan tingkat tarif demi tingkat tarif, serta paket dukungan bernilai miliaran dolar akan melindungi pekerja, petani, keluarga, dan dunia usaha," kata Champagne.

Gedung Putih dan Perwakilan Dagang AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait kebijakan tarif balasan Kanada tersebut.

### **Kanada Kenakan Tarif hingga 50%**

Seorang pejabat pemerintah Kanada mengatakan tarif 50% akan dikenakan terhadap sejumlah produk seperti baja, aluminium, furnitur, dan pakaian.

Sementara itu, tarif sebesar 25% diterapkan terhadap produk keju, peralatan rumah tangga, serta sejumlah produk makanan laut. Adapun tarif 15% dikenakan terhadap produk elektronik dan peralatan atau perkakas.

Selain itu, daftar produk yang dikenai tarif Kanada mencakup makanan olahan, parfum dan produk perawatan tubuh, plastik, kayu, bubur kertas dan produk kertas, karpet, serta pakaian.

Dokumen pemerintah juga menunjukkan sejumlah barang industri masuk dalam daftar tersebut, termasuk besi dan baja, aluminium, perkakas tangan dan produk logam lainnya, mesin dan peralatan listrik, lokomotif kereta api, sepeda motor, furnitur, serta peralatan gim.

Tarif balasan Kanada tersebut dihitung berdasarkan data perdagangan 2024 dan mencakup barang yang nilainya setara dengan hampir 4,5% dari total impor Kanada dari AS.

Sementara itu, tarif baru yang diberlakukan Trump relatif lebih terbatas karena hanya berdampak terhadap sekitar 5% ekspor Kanada ke AS. Meski demikian, analis perdagangan memperingatkan dampaknya dapat terkonsentrasi pada sejumlah sektor yang telah menghadapi tekanan, termasuk produk kayu, khususnya produsen lemari dapur.

### **Kanada Gunakan Tarif untuk Tekan AS**

Menteri Perindustrian Kanada Melanie Joly mengatakan tarif balasan tersebut terutama ditujukan untuk melindungi perusahaan Kanada. Namun, kebijakan itu juga dimaksudkan sebagai instrumen tekanan politik menjelang pemilihan sela atau midterm elections AS pada 3 November 2026.

"Kami perlu memastikan para pesaing tidak memiliki akses ke pasar Kanada dengan cara yang lebih baik dibandingkan produk mereka sendiri... dan itulah mengapa para peritel perlu menunjukkan bahwa hal tersebut berasal dari Kanada," ujar Joly.

"Yang kedua, kami juga menargetkan produk-produk yang akan berdampak pada negara bagian di AS. Jadi, kami bersikap bijaksana dan strategis untuk memberikan tekanan politik, dan itulah mengapa kami menilai ini adalah langkah yang tepat saat ini," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif Kanada tidak hanya berorientasi pada perlindungan industri domestik, tetapi juga dirancang untuk memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada AS.

Ketegangan perdagangan semakin meningkat setelah Trump pada Selasa sebelumnya bahkan mengancam mengganti nama Danau Ontario, yang berada di antara Kanada dan AS, menjadi "Danau Amerika".

### **Kanada Siapkan Bantuan C\$7,5 Miliar**

Selain tarif balasan, pemerintah Kanada mengumumkan paket bantuan senilai C\$7,5 miliar. Program tersebut mencakup dukungan bagi usaha kecil dan menengah, fasilitas pendanaan arus kas perusahaan, serta bantuan bagi pekerja yang berisiko kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tarif baru.

Bank Pembangunan Bisnis Kanada, lembaga pembiayaan milik pemerintah federal, akan menyalurkan sebagian bantuan tersebut kepada perusahaan yang terdampak.

Perusahaan yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pinjaman tanpa bunga dengan nilai antara C\$2,5 juta hingga C\$5 juta.

Joly mengatakan perusahaan penerima bantuan tidak diwajibkan melakukan pembayaran kembali selama 36 bulan. Periode tersebut bahkan akan berlangsung hingga akhir masa pemerintahan Trump.

## **The Fed Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Jika Inflasi AS Tak Kunjung Mereda**

Rabu, 26 Agustus 2026 15:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/the-fed-beri-sinyal-kenaikan-suku-bunga-jika-inflasi-as-tak-kunjung-mereda>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) membuka peluang untuk kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat apabila data mendatang tidak menunjukkan penurunan inflasi yang berkelanjutan.

Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins mengatakan tekanan harga di Amerika Serikat masih terlalu tinggi dan telah menjadi perhatian luas di kalangan pelaku usaha maupun rumah tangga.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs Boston Fed pada Selasa (25/8/2026), Collins mengatakan suku bunga kebijakan The Fed saat ini, berdasarkan skenario utamanya, masih akan membantu menekan harga dan mendorong proses disinflasi secara bertahap.

Menurut Collins, kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang serta sejumlah faktor lainnya juga dapat membantu proses penurunan inflasi tersebut.

Namun, Collins memperingatkan The Fed tidak dapat menunggu terlalu lama jika kemajuan inflasi yang berkelanjutan tidak kunjung terlihat.

"Jika bukti kemajuan inflasi yang berkelanjutan tidak terwujud, saya yakin akan tepat untuk segera memperketat kebijakan guna memastikan kita mencapai stabilitas harga dalam jangka waktu yang wajar. ... Kekhawatiran mengenai tingginya harga sudah meluas dalam percakapan saya dengan para pemangku kepentingan di seluruh New England," tulis Collins.

## **Inflasi AS Masih di Atas Target The Fed**

Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan data inflasi terbaru yang akan dirilis pada Rabu (26/8) menunjukkan indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE), tidak termasuk makanan dan energi, naik pada tingkat tahunan 3,3% pada Juli.

Angka tersebut diperkirakan tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya dan masih jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2%.

Inflasi inti PCE yang menjadi salah satu indikator penting bagi The Fed dalam membaca arah inflasi ke depan juga terus meningkat sejak tahun lalu.

Sejumlah pejabat The Fed sebelumnya mengaitkan kenaikan inflasi dengan kebijakan tarif impor pemerintahan Donald Trump, kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran, serta lonjakan investasi dalam teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

## **Suku Bunga The Fed Masih Ditahan**

Suku bunga kebijakan The Fed saat ini berada dalam kisaran 3,5% hingga 3,75%. Bank sentral AS tersebut mempertahankan suku bunga pada level tersebut sejak Desember sembari menunggu tekanan inflasi mereda.

Collins mengatakan dirinya masih memperkirakan inflasi dapat kembali bergerak turun. Namun, ia menekankan bahwa inflasi telah berada di atas target selama lebih dari lima tahun sehingga The Fed tidak dapat terus menunggu tanpa batas waktu.

Ia juga mengkhawatirkan periode yang terlalu lama dengan inflasi di atas target dapat mengubah ekspektasi konsumen. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat target inflasi 2% semakin sulit dicapai.

## **Pasar Menanti Arah Kebijakan The Fed**

Perhatian pasar selanjutnya tertuju pada pidato Ketua The Fed Kevin Warsh pada Kamis dalam agenda simposium riset tahunan bank sentral AS di Jackson Hole, Wyoming.

Pidato tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai kebutuhan menaikkan suku bunga.

Selain itu, imbal hasil surat utang pemerintah AS atau US Treasury juga mengalami kenaikan. Pergerakan yield Treasury menjadi perhatian pasar global karena dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan kondisi likuiditas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sinyal Collins menunjukkan bahwa arah kebijakan moneter The Fed masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi. Jika tekanan harga tidak kunjung mereda, peluang kenaikan suku bunga dapat kembali menguat. Sebaliknya, bukti penurunan inflasi yang konsisten dapat memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan kebijakan yang ada.

# Bank Sentral Thailand Tahan Suku Bunga di 1%, Ekonomi Masih Lemah

Rabu, 26 Agustus 2026 15:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-thailand-tahan-suku-bunga-di-1-ekonomi-masih-lemah>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Bank of Thailand (BOT) mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan moneter Rabu (26/8/2026).

Keputusan tersebut menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut, seiring bank sentral menilai kebijakan moneter saat ini masih akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Komite Kebijakan Moneter BOT secara bulat mempertahankan suku bunga repo satu hari di level 1,00%. Suku bunga tersebut telah bertahan di level itu sejak Februari 2026.

Keputusan ini sesuai dengan ekspektasi mayoritas ekonom. Dari 32 ekonom yang disurvei Reuters, hanya dua yang memperkirakan adanya perubahan suku bunga.

"Ekonomi tumbuh sesuai ekspektasi, tetapi pertumbuhan masih rendah dan tidak merata," kata BOT dalam pernyataannya dilansir dari Reuters.

Bank sentral mencatat permintaan global yang kuat terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi swasta lebih tinggi dari perkiraan.

Baht Thailand relatif stabil setelah keputusan tersebut, berada di sekitar 32,71 baht per dolar AS.

Sebelumnya, BOT telah memangkas suku bunga sebanyak enam kali dengan total penurunan 150 basis poin sepanjang Oktober 2024 hingga Februari 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perekonomian yang terbebani lemahnya permintaan domestik dan tingginya utang rumah tangga.

Berbeda dengan Thailand, sejumlah bank sentral di Asia seperti Korea Selatan, Indonesia, dan Filipina telah menaikkan suku bunga setelah perang Iran mendorong kenaikan harga energi.

"Komite menilai suku bunga kebijakan saat ini sudah tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi," ujar BOT.

BOT juga menyatakan prospek pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2026 dan 2027 secara umum masih sesuai dengan penilaian sebelumnya.

Pada pertemuan Juni, BOT menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Thailand 2026 menjadi 2,3%. Bank sentral juga memperkirakan pertumbuhan ekspor sebesar 14% dan inflasi utama sebesar 2,8%.

Namun, pertumbuhan ekonomi Thailand melambat menjadi 1,9% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal II-2026, dibandingkan 2,8% pada kuartal sebelumnya.

Sepanjang tahun lalu, ekonomi Thailand tumbuh 2,4%, tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.

## **Prospek Inflasi Membaik**

Di sisi lain, BOT menilai prospek inflasi Thailand membaik. Inflasi utama pada 2026 dan 2027 diproyeksikan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, terutama karena harga energi global mulai mereda.

Inflasi utama Thailand melambat menjadi 1,95% pada Juli 2026 dan masih berada dalam kisaran target BOT sebesar 1%-3%.

Meski demikian, BOT memperkirakan inflasi akan meningkat hingga kuartal I-2027 akibat dampak pola cuaca El Nino. Setelah itu, tekanan inflasi diperkirakan kembali mereda.

Pertemuan kebijakan moneter BOT berikutnya dijadwalkan pada 28 Oktober 2026. Pada pertemuan tersebut, bank sentral akan memperbarui proyeksi ekonomi.

"Kedepannya, kami melihat komite akan mempertahankan suku bunga berdasarkan data inflasi yang lebih rendah," kata Kobsidhi Silpachai, Head of Capital Markets Research Kasikornbank.

## **Ringgit Malaysia Memimpin Penguatan Mata Uang Asia Rabu (26/8), Rupiah Naik 0,08%**

Rabu, 26 Agustus 2026 09:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ringgit-malaysia-memimpin-penguatan-mata-uang-asia-rabu-268-rupiah-naik-008>

KONTAN.CO.ID - Ringgit Malaysia memimpin penguatan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (26/8/2026).

Penguatan mata uang kawasan terjadi di tengah pergerakan dolar AS yang cenderung terbatas menjelang rilis data inflasi AS dan simposium Jackson Hole.

Mengacu pada data Reuters pada pukul 02.05 GMT atau sekitar 09.05 WIB, ringgit Malaysia menguat 0,50% menjadi 4,024 per dolar AS dari posisi sebelumnya 4,044.

Diikuti oleh yen Jepang yang menguat 0,16% menjadi 158,91 per dolar AS. Won Korea Selatan naik 0,07% ke 1.383,10 per dolar AS, sementara dolar Taiwan menguat 0,03% menjadi 31,860 per dolar AS.

Rupiah juga mencatat penguatan. Mata uang Indonesia naik 0,08% menjadi Rp17.690 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.705.

Sementara itu, dolar Singapura bergerak stabil di level 1,269 per dolar AS. Rupee India juga relatif datar di 95,413 per dolar AS.

Sebaliknya, baht Thailand melemah 0,06% menjadi 32,690 per dolar AS. Yuan China turun tipis 0,01% menjadi 6,721 per dolar AS, sedangkan peso Filipina melemah 0,02% ke 61,558 per dolar AS.

### **Ringgit Jadi Mata Uang Asia Terkuat**

Penguatan ringgit menjadi yang paling tinggi di antara mata uang Asia yang tercatat dalam perdagangan tersebut.

Secara kumulatif sejak awal 2026, ringgit juga masih mencatat penguatan 0,80% terhadap dolar AS.

Won Korea Selatan menjadi mata uang Asia dengan penguatan terbesar sejak awal tahun, yakni 4,08%, disusul yuan China yang menguat 3,98%.

Dolar Singapura menguat 1,29%, sedangkan ringgit Malaysia naik 0,80% sejak akhir 2025.

Di sisi lain, rupiah masih menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah secara tahunan.

Sejak awal 2026, rupiah telah melemah 5,77% terhadap dolar AS, lebih baik dibandingkan rupee India yang terdepresiasi 5,81%, tetapi lebih buruk dibandingkan yen Jepang yang turun 1,42%.

Peso Filipina mencatat pelemahan 4,48%, sementara baht Thailand turun 3,79%.

Pergerakan mata uang Asia pada Rabu juga dipengaruhi oleh sentimen terhadap dolar AS dan perkembangan di pasar energi.

Dolar AS bergerak dalam kisaran sempit menjelang rilis indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) AS untuk Juli, yang menjadi salah satu indikator penting bagi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Selain itu, meredanya sebagian ketegangan di Timur Tengah turut menopang sentimen risiko. Harapan pembukaan kembali Selat Hormuz membuat harga minyak turun, sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap tekanan inflasi dan biaya impor di negara-negara Asia.

## **Inflasi Australia Juli di Atas Perkiraan, Risiko Kenaikan Suku Bunga RBA Meningkat**

Rabu, 26 Agustus 2026 09:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-australia-juli-di-atas-perkiraan-risiko-kenaikan-suku-bunga-rba-meningkat>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen Australia meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada Juli 2026.

Kenaikan harga bahan bakar dan biaya perjalanan menjadi pendorong utama, sementara inflasi inti yang juga melampaui ekspektasi meningkatkan risiko kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA).

Melansir Reuters, Data Australian Bureau of Statistics yang dirilis Rabu (26/8/2026) menunjukkan, indeks harga konsumen (CPI) bulanan Australia naik 1% pada Juli dibandingkan Juni. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan ekonom sebesar 0,8%.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh harga bahan bakar yang melonjak 7,5% pada Juli, setelah sebelumnya turun selama tiga bulan berturut-turut.

Secara tahunan, inflasi Australia melambat menjadi 3,5% dari 3,8% pada Juni. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 3,3%.

Tekanan inflasi juga terlihat pada indikator inflasi inti. Trimmed mean, ukuran inflasi inti yang menjadi perhatian RBA, meningkat 0,5% secara bulanan pada Juli. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dalam setahun dan jauh di atas perkiraan 0,3%.

Secara tahunan, trimmed mean inflation berada di level 3,6%.

"Dengan hasil inflasi ini, kami menilai setidaknya masih akan ada satu kenaikan suku bunga RBA tahun ini untuk meredam inflasi," kata Russel Chesler, Head of Investments and Capital Markets VanEck.

### **Peluang Kenaikan Suku Bunga Naik**

Data inflasi tersebut langsung memengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Australia.

Pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga RBA pada September mencapai 27%, naik dari 17% sebelum data inflasi dirilis.

Sementara itu, peluang kenaikan suku bunga paling lambat Februari 2027 diperkirakan mencapai 80%.

RBA mempertahankan suku bunga di level 4,35% pada pertemuan bulan ini. Keputusan tersebut menjadi kali kedua secara berturut-turut bank sentral mempertahankan suku bunga setelah sebelumnya menaikkan suku bunga tiga kali sepanjang tahun ini untuk mengendalikan inflasi.

Para pembuat kebijakan RBA sebelumnya telah memperingatkan bahwa suku bunga dapat kembali dinaikkan apabila risiko inflasi kembali meningkat.

RBA sebelumnya memperkirakan inflasi trimmed mean akan melambat menjadi 3,3% pada akhir 2026.

Namun, data Juli yang lebih kuat dari perkiraan meningkatkan risiko bahwa proses penurunan inflasi dapat berlangsung lebih lambat.

### **Dolar Australia Menguat**

Di pasar valuta asing, dolar Australia merespons data inflasi dengan menguat tipis.

Dolar Australia naik 0,1% menjadi US\$0,7171, sementara kontrak berjangka obligasi pemerintah Australia tenor tiga tahun memangkas sebagian penguatan sebelumnya dan berada di level 95,44.

Pergerakan tersebut menunjukkan pasar mulai memperhitungkan kemungkinan RBA mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama untuk memastikan tekanan inflasi benar-benar mereda.

## **Poin-poin Bahasan Pertemuan dengan Purbaya dengan Kalangan Analis**

Rabu, 26 Agustus 2026 19:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119582/poin-poin-bahasan-pertemuan-dengan-purbaya-dengan-kalangan-analis/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah analis bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).

Usai pertemuan tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada awak media menuturkan apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu sore ini.

Josua menekankan pertemuan tersebut sebetulnya merupakan analysts meeting, forum yang menjadi wadah bagi para analis menyampaikan berbagai pandangan serta pertanyaan kepada Menteri Keuangan.

"Jadi nggak ada materi khusus yang disampaikan dari Pak Menteri sendiri, jadi seperti biasa aja. Mungkin momentumnya lagi pas sajam karena sebelum-sebelumnya memang sudah pernah dijadwalkan, tapi mungkin belum tepat waktunya," kata Josua.

Josua menjelaskan para analis dalam pertemuan itu para analis turut membahas berbagai isu mulai dari asumsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, peringkat kredit (rating), hingga belanja pemerintah.

Adapun salah satu pembahasan yang disorotinya adalah target penerimaan pajak dalam RAPBN 2027.

Lantaran menurutnya selain target penerimaan pajak naik hingga 10% di tahun depan yang memang perlu dicapai, di sisi lain peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dan perbaikan pengumpulan pajak juga perlu diperhatikan.

Di samping itu, ia berpandangan bahwa kenaikan target penerimaan pajak tidak semestinya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat bahwa pemerintah akan melakukan penarikan pajak secara masif.

"Itu mungkin yang harus kita tarik benang merahnya, karena kalau kita lihat dari 2025 kan memang disampaikan juga tadi, bahwa penerimaan kita kan jeblok kan, makanya kalau kita lihat di tahun ini, penerimaan pajak ini dengan optimalisasi, dan juga cortex sudah mulai bekerja, sehingga penerimaan pajak kita sudah mulai tumbuh," tuturnya.

Tak hanya itu, pembahasan lainnya yang juga turut dibahas yakni terkait upaya pendisiplinan dan restitusi serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disebut menjadi salah satu ruang pemerintah untuk memanfaatkan atau mendorong likuiditas perbankan.

Josua bilang, penempatan dana tersebut diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga transmisi likuiditas ke perekonomian dapat bekerja dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Artinya bagaimana juga dari sisi penempatan dana SAL pemerintah di ban-bank Himbara ini pun, juga diharapkan akan bisa lebih optimal lagi, sehingga transmisinya bisa berjalan dan bekerja, sekalipun memang tentunya ini juga bukan suatu hal yang mudah," pungkasnya.

## **Rupiah Stagnan, Pasar Mencerna Arah Kebijakan BI di Era Destry**

Rabu, 26 Agustus 2026 17:19 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/119573/rupiah-stagnan-pasar-mencerna-arrah-kebijakan-bi-di-era-destry/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Rabu (26/8/2026) dengan stagnasi, di posisi yang sama dengan penutupan Senin (24/8/2026) yakni Rp17.712/US\$, kala Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, melakukan tes uji kelayakan di DPR.

Indeks dolar AS yang kembali mendapat tenaga dan menguat secara terbatas ke 98,99 juga sedikit menahan sejumlah mata uang di Asia. Baht Thailand memimpin pelemahan 0,11%, diikuti won Korea Selatan dan dolar Singapura, juga yuan offshore. Sebaliknya, ringgit Malaysia berhasil menguat 0,39%, bersama dolar Taiwan, dan peso Filipina.

Namun, harga minyak yang juga tetap jinak di US\$85,83 masih membuat sisi eksternal kawasan diliputi sentimen positif.

Dari dalam negeri, investor mencermati arah kebijakan moneter dari kandidat tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Dalam paparannya, Destry menyatakan kondisi neraca pembayaran Indonesia perlu mendapatkan perhatian untuk menahan volatilitas rupiah dari gempuran sentimen eksternal. Sebab, tantangan rupiah dalam jangka panjang berasal dari sisi eksternal.

Salah satunya dengan peningkatan ekspor untuk memperkuat sektor eksternal Indonesia. Sebab, transaksi berjalan Indonesia masih menghadapi defisit, salah satunya akibat defisit jasa dan pembayaran pendapatan.

Ia memaparkan bahwa pergerakan rupiah dipengaruhi oleh dua faktor utama: kondisi fundamental ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek pergerakannya lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar.

Selain itu, ia juga mengatakan akan memastikan independensi BI sambil terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Saya ingin menegaskan bahwa sinergi bukan berarti mengurangi kredibilitas dan independensi BI dalam menjalankan tugasnya. Kami akan tetap menjunjung tinggi independensi sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Destry.

Pernyataan ini setidaknya meredakan kekhawatiran investor terkait intervensi pemerintah dalam kebijakan BI, setelah mundurnya mantan Gubernur BI Perry Warjiyo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, di pasar obligasi RI pergerakan yield kembali diuji dan mengalami konsolidasi setelah reli yang kuat pada pekan lalu. Sebagian besar tenor pendek dan menengah mengalami kenaikan yield pada perdagangan hari ini.

Yield tenor acuan 10 tahun bergerak naik 3,9 bps ke 7,05%. Sementara yield tenor 1 tahun kembali naik 5,9 bps ke 6,74%, dan tenor 5 tahun naik 3,3 bps ke 6,89%.

Kenaikan yield pada sebagian tenor hari ini mengindikasikan reaksi pasar yang melihat arah kebijakan BI di bawah kepemimpinan Destry Damayanti.

Pernyataan Destry terkait pentingnya menjaga stabilitas sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi sepertinya memberi sinyal bahwa kebijakan moneter ke depan akan tetap berupaya mencari keseimbangan antara dua kepentingan tersebut.

## **Purbaya Gelontorkan Rp7 Triliun untuk Benahi DTSEN**

Rabu, 26 Agustus 2026 16:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119559/purbaya-gelontorkan-rp7-triliun-untuk-benahi-dtsen/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan hampir Rp7 triliun untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan sensus pada tahun ini.

Hal ini menyusul masih ditemukannya persoalan dalam pengelompokan desil penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," jelas Purbaya ketika ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Purbaya, perbaikan data tersebut diharapkan membuat penyaluran program pemerintah lebih tepat sasaran mulai tahun depan.

Di sisi lain, terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite berdasarkan kelompok desil 9 dan 10, Purbaya mengatakan pemerintah masih menyiapkan sistemnya.

Di samping itu, apabila nantinya masih terdapat masyarakat yang masuk dalam kategori yang tidak sesuai, pemerintah akan menanganinya secara kasus per kasus.

"Nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan," tegasnya.

Sebelumnya, BPS menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN bukan ukuran absolut untuk menentukan tingkat kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan seseorang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengungkapkan desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan dengan keluarga lain berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Desil kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Meski demikian, keluarga yang masuk dalam desil tertentu tidak otomatis memiliki tingkat pendapatan atau kekayaan yang sama.

Sebagai contoh, keluarga yang berada pada desil 3 berarti masuk kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.

BPS menjelaskan, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator lainnya. Namun juga mempertimbangkan kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Untuk diketahui, DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.

Data tersebut dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif dan disinkronkan dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

# Destry Ungkap Strategi Jaga Rupiah dan Kendalikan Inflasi

Rabu, 26 Agustus 2026 16:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119537/destry-ungkap-strategi-jaga-rupiah-dan-kendalikan-inflasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon Gubernur sekaligus Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membeberkan sejumlah strategi dalam menjaga rupiah dan mengendalikan inflasi.

Dalam paparannya, Destry mengungkapkan bahwa gerak rupiah dipengaruhi oleh dua faktor yakni jangka panjang yang fundamental dan jangka pendek yang biasanya dipengaruhi oleh sentimen.

“Dan kalau kita lihat pergerakan dari rupiah itu sendiri, sebenarnya kalau melihat dari faktor fundamental kemudian termasuk juga apa yang terjadi di Amerika, di global dengan ketidakpastian yang tinggi, itu nilai rupiah kita sebenarnya bisa lebih rendah dari sekarang,” kata Destry dalam uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Oleh karenanya, Destry menilai tantangan jangka panjang yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas rupiah berasal dari sektor eksternal, khususnya kondisi neraca pembayaran Indonesia.

Menurutnya, pemerintah, BI, dan seluruh masyarakat perlu mendorong peningkatan ekspor untuk memperkuat sektor eksternal Indonesia. Pasalnya, transaksi berjalan Indonesia masih menghadapi defisit, salah satunya akibat defisit jasa dan pembayaran pendapatan.

“Jadi menjadi PR tentunya bagi kita semua, pemerintah, Bank Indonesia, dan juga semua masyarakat kita adalah bagaimana agar ekspor kita bisa kita tingkatkan,” katanya.

Destry mengatakan kondisi tersebut selama ini masih dapat ditutup oleh transaksi finansial, terutama melalui investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) yang relatif stabil. Namun, investasi portofolio masih menjadi pekerjaan rumah.

Untuk itu, Destry mengatakan BI akan lebih memfokuskan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen transmisi kebijakan suku bunga.

“Sekarang kami akan lebih fokus SRBI itu untuk menjadi transmisi untuk kebijakan suku bunga, supaya suku bunga juga di market bisa relatif melandai,” katanya.

Menurut Destry, rate SRBI saat ini mulai menurun, sementara outstanding-nya juga telah berkurang dari posisi tertinggi yang hampir mencapai Rp1.100 triliun menjadi sekitar Rp1.050 triliun. Penurunan tersebut dilakukan secara bertahap untuk menambah likuiditas dan menjaga suku bunga pasar tetap terkendali serta selaras dengan suku bunga overnight.

## Strategi Kendalikan Inflasi

Sementara itu, Destry menegaskan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh BI sendiri. Menurutnya, BI terutama berperan dalam mengendalikan sisi permintaan atau demand side, yang tercermin dalam inflasi inti atau core inflation.

Destry menyebut inflasi inti berkontribusi sekitar 65% terhadap inflasi headline. Sementara itu, inflasi pangan berkontribusi sekitar 19% sehingga pengendaliannya juga menjadi penting untuk menjaga inflasi secara keseluruhan.

“Jadi kalau inflasi pangan kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan mempengaruhi headline inflation walaupun core inflation-nya relatif rendah. Tapi inflasi keseluruhan dia akan tinggi,” ujarnya.

Karena itu, pengendalian inflasi pangan membutuhkan sinergi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan pihak terkait lainnya.

Selain inflasi pangan, Destry menyoroti administered prices yang berkontribusi sekitar 16% terhadap inflasi. Menurutnya, perubahan harga yang diatur pemerintah, seperti kenaikan harga BBM, dapat langsung mendorong inflasi headline dalam satu hingga dua bulan sebelum kembali menyesuaikan.

Sebagai catatan, inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88%, dengan inflasi inti sebesar 2,7%. Sementara itu, inflasi pangan atau volatile food turun menjadi 2,5% dari sebelumnya sekitar 5%, seiring dengan membaiknya pasokan pangan.

## **Destry Tekankan Stabilisasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi**

Rabu, 26 Agustus 2026 15:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119525/destry-tekanan-stabilisasi-untuk-dorong-pertumbuhan-ekonomi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon Gubernur sekaligus Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukannya dalam menjaga stabilisasi sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya menekankan stabilisasi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Karena memang sekarang ini apa yang terjadi termasuk di dunia, di global kita ini memang dalam menjalankan suatu kebijakan gak bisa hanya bertahan atau bersandar pada satu kebijakan tertentu,” kata Destry dalam uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ia menyontohkan banyak negara maju terutama di Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang kini tengah mengalami perlambatan ekonomi meski mengalami inflasi tinggi. Menurut Destry hal ini diakibatkan oleh semakin tingginya harga komoditas dan rantai pasok yang terganggu.

Tak cuma itu, indeks dolar atau DXY yang menguat justru diikuti oleh penguatan yield obligasi Amerika Serikat, sesuatu yang menurut Destry tak lazim dengan yield obligasi AS tenor 30 tahun mencapai 5,3% dan yield obligasi 10 tahun mencapai 4,6%.

“Jadi ini situasi yang kalau mereka hanya bicara inflasi naik, mereka langsung bisa naikkan suku bunga. Tapi ini enggak. Mereka menghadapi perlambatan ekonomi juga. Ini yang menyebabkan mereka harus membalancing,” katanya.

“Nah ini di Bank Indonesia kami coba membalancing dengan berbagai kebijakan yang kami miliki makanya kami menamakannya bauran kebijakan Bank Indonesia.”

Kebijakan tersebut termasuk kebijakan moneter, makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran. Selain itu terdapat sejumlah kebijakan pendukung seperti pendalaman pasar uang dan valas.

## **Pendalaman Pasar Uang dan Valas**

Destry menyebut pendalaman pasar uang dan valas tersebut merupakan salah satu kebijakan yang ingin ia perdalam apabila ia menjadi Gubernur Bank Indonesia nanti,

“Apalagi dengan target [pertumbuhan ekonomi] pemerintah 8%, pasti akan butuh financing yang besar,” katanya.

Destry memaparkan pengembangan pasar uang dalam 6 tahun terakhir sudah mengalami pertumbuhan sebesar 6 kali lipat dengan pengembangan uang valas sebesar 3 kali lipat.

Dengan demikian, rata-rata transaksi pasar valas per hari kini mencapai sekitar US\$12 miliar, meningkat dibandingkan dengan 2020 yang masih berada di kisaran US\$3-4 miliar.

“Jadi ini adalah makin dalam pasarnya, maka tentu stabilitas dari rupiah juga akan makin terjaga, kemudian juga sumber pembiayaan untuk pembangunan juga akan makin bisa kita dorong,” kata Destry.

“Jadi dalam hal ini memang kalau kita lihat stabilisasi tidak bisa kita hanya capai dari kebijakan moneter.”

Oleh karenanya Destry beralasan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir BI, senjata BI dalam menstabilkan nilai tukar tak cuma berasal dari kenaikan suku bunga saja, salah satu yang dilakukan adalah lewat pendalaman pasar uang dan valas.

Salah satunya adalah dengan memberikan insentif dan juga hedging cost yang relatif lebih murah karena BI membutuhkan lebih banyak aliran dana asing yang masuk.

“Dan Alhamdulillah itu juga tercapai sehingga baik SRBI ataupun SBN juga sudah mengalami inflow. Dan itu sedikit banyak menambah supply valas juga di market,” ujarnya.

## **Destry Papar Tantangan Domestik & Global bagi Perekonomian RI**

Rabu, 26 Agustus 2026 12:40 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119506/destry-papar-tantangan-domestik-global-bagi-perekonomian-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon Gubernur Bank Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai penjabat sementara bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membeberkan sejumlah tantangan global dan domestik bagi perekonomian Indonesia.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Bila sebelumnya tantangan lebih dominan berkaitan dengan isu siklus perkembangan terkini menunjukkan berbagai perubahan struktural,” kata Destry dalam uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dalam tantangan global, Destry memaparkan berbagai risiko seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dan meningkatnya inflasi global, higher for longer dan volatilitas aliran modal ke negara-negara berkembang dan perkembangan serta risiko digitalisasi yang menurutnya harus dikelola dengan baik.

Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, Destry menilai bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap bekerja baik dan berdaya tahan.

“Berbagai indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid mulai dari pertumbuhan yang tetap kuat implasi yang terkendali ketahanan eksternal yang terjaga hingga intermediasi perbankan yang tetap solid,” kata Destry.

Menurutnya, hal ini merupakan dampak positif berbagai stimulus kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

Sebagai informasi, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi calon Gubernur dan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada hari ini Rabu, 26 Agustus 2026.

Calon Gubernur Bank Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti, dijadwalkan menjalani uji kelayakan hari ini.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui juga mengusulkan nama Aida S. Budiman untuk menggantikan Deputy Gubernur Senior BI saat ini, Destry Damayanti yang akan menjadi calon tunggal Gubernur BI pilihan Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengusulkan calon Deputy Gubernur BI Solikin M Juhro dan M Anwar Bashori.

“Calon Gubernur BI dan Deputy Gubernur Senior [fit and proper test] tanggal 26 [Agustus], Deputy Gubernur tanggal 27 [Agustus],” kata Anggota Komisi XI Harris Turino kepada Bloomberg Technoz, Selasa (18/8/2026).

## **Rupiah Bergerak Stabil di Rp17.695/US\$**

Rabu, 26 Agustus 2026 10:05 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/119488/rupiah-bergerak-stabil-di-rp17-695-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah membuka sesi perdagangan Rabu (26/8/2026) dengan penguatan 0,1% ke posisi Rp17.695/US\$. Tak lama berselang, rupiah melanjutkan penguatan tetapi menipis menjadi 0,12% ke Rp17.690/US\$.

Stabilnya pergerakan rupiah sejalan dengan mata uang Asia yang sebagian besar menguat tertopang oleh meredanya harga minyak dunia dan lesunya dolar Amerika Serikat (AS). Harga minyak mentah Brent kembali terpangkas 2% ke US\$86,81/barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga turun 1,78% ke US\$80,89/barel.

Dengan begitu, sebagian mata uang kawasan mendapat ruang penguatan. Ringgit Malaysia memimpin penguatan 0,36%, disusul peso Filipina, baht Thailand, dan rupiah, juga yen Jepang.

Sebaliknya, won Korea Selatan kembali melemah, bersama yuan offshore dan dolar Hong Kong.

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) terhadap enam mata uang utama bergerak stabil di 98,91. Pergerakan dolar AS relatif stabil setelah Menteri Keuangan AS, Scott Bessent mengumumkan penggantian buyback obligasi tenor 10-30 tahun, yield tenor panjang itu sempat turun cukup tajam. Bahkan yield 30 tahun sempat turun 10 basis poin (bps) ke sekitar 5,18%, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak 2007.

Pelaku pasar sepertinya kini memiliki semacam jaminan psikologis bahwa pemerintah AS tidak akan membiarkan yield US Treasury tenor panjang melonjak tanpa intervensi.

Meski program buyback relatif kecil, senilai US\$14 miliar, dibandingkan total utang AS yang sebesar US\$40 triliun, tetapi paling tidak secara psikologis langkah ini memberi kepastian. Investor kini melihat bahwa jika tekanan jual obligasi AS kembali membesar, maka pemerintah AS berpotensi masuk sebagai pembeli.

Turunnya yield US Treasury membawa berkah bagi pasar obligasi di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Investor global tercatat melakukan pembelian bersih surat utang domestik sebesar US\$656,7 juta pada 20 Agustus, dan menjadi level tertinggi sejak Juli 2019.

Begitu juga di pasar saham, investor masih mencatat pembelian saham domestik senilai US\$55,2 juta pada 21 Agustus.

## **Resentralisasi Fiskal Menguat pada 2027, Ruang Fiskal Pemda Makin Terbatas**

Rabu, 26 Agustus 2026 19:59 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/resentralisasi-fiskal-menguat-pada-2027-ruang-fiskal-pemda-makin-terbatas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tren resentralisasi fiskal berpotensi masih berlanjut pada 2027 seiring meningkatnya belanja pemerintah pusat yang langsung masuk ke daerah, sementara ruang fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih terbatas.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kondisi ini dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan mendorong belanja produktif semakin tertekan.

Yusuf mengatakan, kenaikan TKD 2027 menjadi sekitar Rp 735 triliun perlu dilihat secara lebih utuh. Angka tersebut memang naik sekitar 5,5% dari outlook 2026 yang sekitar Rp 697 triliun, tetapi masih jauh di bawah pagu 2025 sekitar Rp 849 triliun dan realisasi 2023 sekitar Rp 881 triliun.

"Jadi, kenaikan tersebut lebih tepat dilihat sebagai pemulihan terbatas setelah pemangkasan, bukan sebagai ekspansi ruang fiskal daerah," ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (26/8/2026).

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah semakin besar, antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 240 triliun dan perlindungan sosial sekitar Rp 550 triliun.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa uang tetap mengalir ke daerah, tetapi semakin banyak melalui program pemerintah pusat dan bukan melalui APBD.

"Secara fungsional, ini menunjukkan adanya resentralisasi fiskal. Daerah tetap menjadi lokasi belanja, tetapi ruang kepala daerah untuk menentukan prioritas semakin terbatas," katanya.

Dalam jangka pendek, kondisi tersebut masih dapat menjaga konsumsi masyarakat karena aktivitas belanja pemerintah tetap berlangsung di daerah. Namun, dalam jangka menengah, keterbatasan ruang fiskal daerah berisiko menekan belanja modal, pemeliharaan infrastruktur, dan investasi publik.

Yusuf mengatakan, risiko tersebut semakin besar karena struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada TKD. Di banyak pemerintah daerah, porsi TKD masih mencapai sekitar 85%-90% dari pendapatan daerah.

Sementara itu, kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak merata. Daerah dengan basis perdagangan, jasa, dan industri memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan PAD, sedangkan banyak kabupaten dengan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer tetap bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Di tengah belanja pegawai, termasuk beban PPPK, yang relatif kaku, keterbatasan transfer membuat belanja produktif menjadi ruang yang paling mudah ditekan.

Dampaknya dapat terlihat dari tertundanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, meningkatnya biaya ekonomi, serta semakin sulitnya daerah menyusun investasi jangka menengah.

Yusuf menilai penguatan PAD tetap diperlukan, tetapi pendekatannya harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah. Daerah dengan basis ekonomi kuat perlu diberikan ruang untuk memperluas local taxing power dan memperbaiki administrasi pajak daerah.

Sementara itu, daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap membutuhkan TKD sebagai instrumen pemerataan. Menurut Yusuf, dorongan menuju kemandirian fiskal tidak berarti seluruh daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dengan kecepatan yang sama.

Selain pembangunan ekonomi, keterbatasan ruang fiskal daerah juga berpotensi memengaruhi kemampuan mitigasi bencana.

Bencana hidrometeorologi dan karhutla membutuhkan belanja pencegahan yang konsisten, sementara ruang fiskal daerah umumnya baru tersedia setelah kebutuhan belanja pegawai dan operasional terpenuhi.

Ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik menyusut dan TKD lebih banyak terserap untuk belanja rutin, anggaran untuk sistem peringatan dini, normalisasi sungai, sekat bakar, dan pemulihan lahan menjadi semakin terbatas.

Akibatnya, daerah cenderung mengandalkan status tanggap darurat untuk mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.

"Pola seperti ini membuat biaya ekonomi bencana menjadi lebih besar karena anggaran lebih banyak digunakan untuk menangani kerusakan daripada mencegahnya," pungkas Yusuf.

## **INDEF: Resentralisasi Fiskal Bisa Tekan Belanja Produktif dan Ekonomi Daerah**

Rabu, 26 Agustus 2026 18:45 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/indef-resentralisasi-fiskal-bisa-tekan-belanja-produktif-dan-ekonomi-daerah>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurrahman menilai, terdapat kecenderungan resentralisasi fiskal ketika semakin banyak program strategis di daerah dibiayai dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat.

Menurut Rizal, persoalan utama bukan hanya mengenai kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) secara nominal, tetapi juga apakah peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya ruang diskresi fiskal pemerintah daerah.

Adapun kenaikan TKD 2027 menjadi sekitar Rp 735 triliun atau meningkat sekitar 5,5% dibandingkan outlook 2026 yang sekitar Rp 697 triliun.

"Jika tidak, belanja produktif daerah bisa tertekan dan multiplier ekonomi lokal melemah," ujar Rizal kepada Kontan, Rabu (26/8/2026).

Kondisi tersebut berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk berperan sebagai shock absorber ketika terjadi tekanan ekonomi.

### **PAD Masih Tertekan**

Di sisi lain, kondisi penerimaan daerah juga menunjukkan tantangan terhadap kemandirian fiskal.

Pemerintah mencatat total realisasi pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencapai Rp 606,8 triliun hingga 31 Juli 2026. Angka tersebut turun sekitar 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 691,8 triliun.

Menurut Rizal, penguatan PAD tetap perlu dilakukan untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah. Namun, upaya tersebut sebaiknya tidak ditempuh dengan menaikkan tarif pajak daerah semata.

"Penguatan PAD jangan ditempuh dengan menaikkan tarif pajak, melainkan melalui perluasan basis ekonomi, optimalisasi aset, digitalisasi penerimaan, dan peningkatan kepatuhan," jelasnya.

Ia menilai, perluasan basis ekonomi daerah menjadi penting agar peningkatan PAD tidak justru membebani aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Dengan basis ekonomi yang lebih kuat, peningkatan penerimaan daerah dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan.

### **Risiko Bencana ke Ekonomi Daerah**

Rizal menambahkan, risiko terhadap ekonomi daerah menjadi semakin besar ketika ruang fiskal yang sempit berhadapan dengan meningkatnya bencana ekologis dan hidrometeorologi.

Apabila struktur APBD terlalu kaku, kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi, tanggap darurat, maupun pemulihan bencana akan melemah.

"Dampaknya langsung ke PDRB melalui kerusakan infrastruktur, terganggunya produksi, UMKM, tenaga kerja, dan investasi," katanya.

Karena itu, menurut Rizal, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah jangan sampai hanya menghasilkan desentralisasi secara administratif, tetapi pada saat yang sama terjadi resentralisasi fiskal.

"Pusat tetap perlu mengendalikan program prioritas, tetapi daerah harus memiliki fiscal space yang cukup untuk merespons kebutuhan dan risiko lokal," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Rizal ukuran keberhasilan TKD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan kepada daerah, tetapi juga dari seberapa jauh transfer tersebut mampu memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah merespons berbagai tekanan ekonomi maupun risiko lokal.

# Dana Asing Tetap Masuk ke Pasar Keuangan Domestik Meskipun Imbal Hasil Turun

Rabu, 26 Agustus 2026 09:04 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/dana-asing-tetap-masuk-ke-pasar-keuangan-domestik-meskipun-imbal-hasil-turun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arus dana asing ke pasar keuangan Indonesia masih berpeluang berlanjut meski imbal hasil atau yield instrumen rupiah mulai turun. Stabilitas rupiah menjadi kunci yang membuat aset domestik tetap menarik di mata investor global.

Investor asing mencatat inflow Rp 21,03 triliun ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 70,39 triliun ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sepanjang Juni 2026. Di pasar saham, asing justru membukukan net sell sebesar Rp 19,63 triliun.

Derasnya dana masuk tersebut terjadi setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate hingga 5,75%, sehingga aset berbasis rupiah menawarkan imbal hasil yang kompetitif.

Namun, daya tarik tersebut kini tidak hanya ditentukan oleh besarnya yield. Memasuki Agustus 2026, imbal hasil SBN dan SRBI mulai melandai.

Pada 21 Agustus 2026, yield SBN tenor 10 tahun turun 5,7 basis poin menjadi 6,96%. Sementara itu, yield SRBI hasil lelang berada di 7,06% untuk tenor enam bulan, 7,21% untuk tenor sembilan bulan, dan 7,37% untuk tenor 12 bulan.

Meski yield turun, investor asing belum menunjukkan tanda-tanda menarik dana dari aset rupiah. Pelaksana tugas Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan arus masuk asing justru masih berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.

"Yield SRBI terus turun, tetapi inflow tetap masuk," kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (19/8).

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, investor asing tidak hanya melihat tingkat yield nominal. Mereka juga menghitung potensi keuntungan setelah memperhitungkan pergerakan rupiah serta biaya lindung nilai.

Karena itu, selama rupiah relatif stabil, penurunan imbal hasil belum tentu membuat aset Indonesia kehilangan daya tarik.

Hal tersebut tercermin dari kepemilikan asing di SBN yang meningkat dari sekitar Rp 892 triliun pada akhir Juli menjadi Rp 909 triliun per 20 Agustus 2026.

"SRBI tetap menarik meskipun yield-nya menurun," ujar Josua. Chief Economist Citibank Indonesia Helmi Arman menilai, kondisi global dan domestik saat ini juga lebih mendukung dibandingkan kuartal sebelumnya.

Penurunan harga minyak, potensi pelemahan dolar AS, serta peluang penurunan suku bunga The Fed dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah.

Di sisi eksternal, Citi memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia dapat menyempit menjadi sekitar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada semester II-2026.

Dengan demikian, alasan dana asing masih mengalir ke Indonesia bukan semata-mata karena yield yang tinggi. Investor juga melihat stabilitas rupiah, selisih imbal hasil dengan aset AS, biaya lindung nilai, serta membaiknya risiko eksternal dan domestik.

## **Beban Bunga Utang 2027 Naik, Ruang Fiskal Makin Sempit?**

Rabu, 26 Agustus 2026 05:15 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/beban-bunga-utang-2027-naik-ruang-fiskal-makin-sempit>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban bunga utang pemerintah semakin besar seiring peningkatan jumlah utang. Pada tahun 2027, pemerintah harus menyiapkan dana Rp 650,31 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, naik 11,69% dibanding outlook tahun ini.

Di satu sisi, pembayaran bunga utang dalam negeri naik 9,64% atau Rp 589,68 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp 60,63 triliun, atau naik paling tinggi sebesar 36,46%.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, kondisi utang pemerintah masih terkendali. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai, terutama kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara untuk mengimbangi kenaikan beban bunga.

“Kalau ditanya apakah kondisi ini masih aman, saya melihatnya masih terkendali, tetapi ruang fiskalnya semakin sempit,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (25/8/2026).

Sebagaimana diketahui, defisit primer 2027 hanya sekitar Rp 20,9 triliun, jauh lebih rendah dari outlook 2026 sebesar Rp 152,1 triliun. Hal ini kaya Yusuf, menunjukkan bahwa hampir seluruh defisit tahun depan berasal dari pembayaran bunga, bukan karena pemerintah menambah belanja secara agresif.

Maka dari itu, dengan pertumbuhan ekonomi nominal yang masih lebih tinggi dari tingkat bunga efektif, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga belum menunjukkan tekanan yang mengkhawatirkan.

Permasalahannya ada pada kemampuan pemerintah menghasilkan pendapatan. Beban bunga diperkirakan menyerap sekitar 19% pendapatan negara pada 2027. Dengan rasio penerimaan terhadap PDB yang masih rendah, ruang fiskal Indonesia menjadi lebih terbatas, meskipun rasio utangnya sendiri masih relatif moderat.

“Jadi persoalannya bukan semata-mata seberapa besar utang, tetapi seberapa kuat kemampuan negara membayar bunga dari penerimaannya,” jelas Yusuf.

Karena itu, ia menilai risiko terbesar ke depan ada pada kredibilitas target pendapatan. Apabila penerimaan 2026 tidak mencapai target, pemerintah berpotensi membutuhkan pembiayaan lebih besar. Menurutnya dampak yang akan terjadi tidak berhenti pada defisit tahun berjalan, tetapi juga meningkatkan beban bunga pada tahun berikutnya.

“Di sisi lain, penggunaan utang untuk pembiayaan investasi juga perlu dipastikan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan penerimaan yang memadai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf juga melihat terdapat risiko dari perubahan kondisi pasar. Kenaikan yield atau imbal hasil SBN, pelemahan rupiah, risiko refinancing, serta pinjaman dengan bunga floating bisa membuat realisasi pembayaran bunga lebih tinggi dari asumsi APBN.

Sehingga, menurut Yusuf, kondisi utang Indonesia belum berada pada level berbahaya, tetapi toleransinya semakin tipis.

Menurutnya, kunci pengendalian utang bukan hanya bagaimana pemerintah mengelola utang dan bagaimana pemerintah meningkatkan penerimaan negara, terutama rasio pajak.

“Ini cukup menantang di tengah kredibilitas asumsi makro yang berpotensi meleset dan pada muara memberikan implikasi terhadap melesetnya target pajak itu sendiri,” tandasnya.

## **Mahasiswa Diharap Tak Hanya Jadi Pencari Kerja, Tapi Penggerak Ekonomi**

Rabu, 26 Agustus 2026

Penulis : Kontributor Kota Salatiga, Editor : UI, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mahasiswa-diharap-tak-hanya-jadi-pencari-kerja-tapi-penggerak-ekonomi/>

SALATIGA — Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi tumbuh sebagai inovator, wirausaha, maupun penggerak ekonomi di tengah masyarakat. Karenanya, penguatan kapasitas generasi muda juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Salatiga, di Auditorium Student Center Prof H Achmadi UIN Salatiga, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, kecerdasan akademik perlu berjalan beriringan dengan akhlak dan kemampuan membangun jejaring. Untuk itu, Robby mendorong mahasiswa menjadikan masa perkuliahan, sebagai ruang untuk membangun kapasitas sekaligus karakter.

“Yang paling penting bahwa di UIN ini tidak hanya mencetak mahasiswa atau generasi yang cerdas dalam keilmuan, tetapi tentunya mendidik atau mencetak sikap atau karakter yang akhlakul karimah. Gunakanlah kesempatan ini untuk menjadikan adik-adik menjadi manusia yang cerdas, berakhlak, dan memunyai jaringan yang luas,” tutur Robby.

Senada, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farichah menekankan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan pengelolaan sumber daya, termasuk pangan, energi, dan air. Karena itu, ilmu yang diperoleh di bangku kuliah harus mampu diterjemahkan menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ditambahkan, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi generasi yang unggul secara akademik. Mereka juga dituntut mampu membaca persoalan di masyarakat, dan mengambil peran dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

“Jangan dipisahkan antara ilmu yang didapat dari Pak Dosen dengan kehidupan nyata, karena sejatinya kampus-kampus seperti UIN Salatiga ini dihadirkan, agar lulusan-lulusan dari kampus bisa kembali ke masyarakat berdasarkan ilmu yang mereka miliki,” ujarnya.

Kehadiran Wamen Koperasi di Salatiga dilanjutkan dengan kunjungan ke Gedung Dekranasda Kota Salatiga, untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan UMKM Salatiga. Produk-produk lokal tidak hanya diperkenalkan sebagai hasil kreativitas pelaku usaha, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui penguatan koperasi, jejaring pemasaran, inovasi, dan kolaborasi.

# **Pemprov Kembali Gelar CJIBF, Tawarkan Proyek dengan Total Investasi Rp14,9 Triliun Lebih**

Rabu, 26 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-kembali-gelar-cjibf-tawarkan-proyek-dengan-total-investasi-rp149-triliun-lebih/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (27/8/2026). Sedikitnya 19 proyek siap ditawarkan, dengan total investasi Rp14,9 triliun.

Hal itu disampaikan Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Rutty Yosika, saat Dialog di Studio Jateng Online Radio, Senin (24/8/2026). Dikatakan, event tersebut menjadi ajang promosi potensi investasi Jawa Tengah kepada investor.

Rutty menjelaskan, CJIBF 2026 ini merupakan hasil sinergi Pemprov Jateng dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah melalui wadah Keris Jateng, yaitu Forum Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Tema yang diangkat kali ini, Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan.

“Tema yang diangkat ini menjadi tanggapan Jawa Tengah, terhadap kebutuhan investasi yang semakin memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG). Melalui CJIBF ini, Jawa Tengah merespons tantangan tersebut dengan mendorong investasi hijau, transisi ke energi terbarukan, kemudian penerapan ekonomi sirkular,” ujar Rutty.

Dia membeberkan, tak hanya pameran, event tersebut sekaligus menjadi forum bisnis, yang mempertemukan pemilik proyek dengan calon investor, juga menawarkan investasi di kawasan industri di Jawa Tengah. Proyek yang ditawarkan telah melalui proses kurasi, termasuk proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), yang dinilai telah siap ditawarkan kepada investor.

“Pemerintah tidak hanya menunggu investor datang, tetapi melakukan pendekatan langsung ke pusat-pusat investor, termasuk Jakarta. Pada CJIBF 2026 ini, terdapat 19 proyek IPRO yang akan ditawarkan dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp14,9 triliun. Proyek tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/ kota di Jawa Tengah, dan mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, industri, perikanan, pariwisata, pengelolaan sampah, hingga Kesehatan,” kata Rutty.

Melalui CJIBF 2026 ini, dia berharap investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Juga menjadi salah satu langkah pemprov untuk menjemput investasi, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi, yang siap menawarkan proyek-proyek berkelanjutan. (Mg/UI, Diskomdigi Jateng)

# **BEI catat transaksi pasar modal Solo Raya tembus Rp26 triliun hingga Mei 2026**

Rabu, 26 Agustus 2026 20:14 WIB

Pewarta: Aris Wasita, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/643120/bei-catat-transaksi-pasar-modal-solo-raya-tembus-rp26-triliun-hingga-mei-2026>

Solo (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah 2/Solo Raya dan Madiun Raya mencatat kinerja tren pasar modal di wilayah Solo Raya tumbuh positif dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp26 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan BEI Solo Raya dan Madiun Raya M. Wira Adibrata di pada pertemuan dengan wartawan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu menyampaikan angka tersebut menunjukkan lonjakan rata-rata transaksi bulanan dari sebelumnya Rp3 triliun menjadi sekitar Rp5 triliun perbulan (di luar wilayah Klaten).

"Tren pertumbuhan investor maupun transaksi pasar modal di Solo Raya terus menunjukkan kenaikan yang signifikan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis," kata Wira.

Berdasarkan data BEI per Mei 2026, jumlah investor di Kota Surakarta saja tercatat sebanyak 89.000 investor pasar modal yang mencakup instrumen saham, reksa dana, dan obligasi, dengan 48.000 di antaranya merupakan investor spesifik instrumen saham.

Terkait dengan dinamika pergerakan harga saham dan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Wira mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengaitkan pergerakan pasar secara spekulatif dengan satu isu politik tertentu.

"Sangat dini untuk mengambil kesimpulan bahwa respons pasar hari ini dipengaruhi oleh satu isu semata. Banyak faktor yang memengaruhi pergerakan pasar saham, termasuk kebijakan ekonomi, situasi politik global maupun domestik, dan variabel lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Wira menyoroti peran dominan Generasi Z dalam mendorong lonjakan investor melalui platform digital. Namun, ia menyayangkan masih maraknya fenomena Fear of Missing Out (FOMO) serta dorongan promosi influencer di media sosial tanpa dibarengi analisis fundamental dan teknikal yang memadai.

Untuk membentengi generasi muda dari spekulasi berisiko serta maraknya judi daring (online), BEI terus memperluas jaringan Galeri Investasi di lembaga pendidikan dan fasilitas publik. Saat ini, jumlah Galeri Investasi di Solo Raya telah genap mencapai 50 titik dari sebelumnya 46 lokasi.

Empat galeri baru yang telah beroperasi melalui kerja sama (MoU) meliputi RSU PKU Muhammadiyah, Universitas Sugeng Hartono, SMA Negeri 2 Sukoharjo, dan SMK Negeri 1 Sragen. BEI juga sedang memproses izin penambahan galeri di SMA Negeri 5 Surakarta dan SMK Negeri Jatiroto Wonogiri melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wira berharap media massa di Solo Raya terus berkolaborasi menyebarkan edukasi investasi yang kredibel guna menciptakan iklim pasar modal yang aman dan rasional bagi masyarakat.

# Dieng Culture Festival 2026 targetkan penguatan ekonomi masyarakat

Rabu, 26 Agustus 2026 06:17 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaraneews.com/berita/643031/dieng-culture-festival-2026-targetkan-penguatan-ekonomi-masyarakat>

Banjarnegara (ANTARA) - Dieng Culture Festival (DCF) 2026 yang digelar Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 28-30 Agustus 2026, ditargetkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pelibatan pelaku UMKM lokal.

Koordinator Umum DCF Alif Faozi di Banjarnegara, Selasa, mengatakan festival tersebut menjadi ruang kolaborasi masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan pelaku usaha.

"Festival kami adalah festival gotong royong yang melibatkan masyarakat, sivitas akademika, media, pemerintah, hingga para pelaku usaha atau bisnis," katanya.

Ia mengatakan DCF 2026 memadukan tradisi, seni, alam, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, rangkaian kegiatan juga dirancang memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk menangkap peluang ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

Bahkan, lanjut dia, tingkat keterisian penginapan di kawasan Dieng menjelang festival telah mencapai kisaran 95 persen.

Menurut dia, tingginya permintaan akomodasi menunjukkan minat wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Kalau penginapan terinformasi mungkin sudah 95 persen. Walaupun ada yang masih kosong mungkin satu-dua, bahkan saya juga kesulitan ketika beberapa teman mencari penginapan," katanya.

Menurut dia, permintaan penginapan tidak hanya terkonsentrasi di Dieng Kulon, juga meluas ke Desa Karangtengah, dan sejumlah kawasan lain di sekitar Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, termasuk ke Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Lebih lanjut, dia mengatakan DCF 2026 menghadirkan Ekspo UMKM di Venue Arjuna untuk memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha lokal.

Selain itu, kata dia, Festival Kopi Dieng dan Jazz Atas Awan Showcase di Venue Gatotkaca yang diharapkan memperluas potensi ekonomi komoditas kopi sekaligus menguatkan daya tarik wisata.

Sementara untuk agenda utama berupa Ruwatan Anak Berambut Gimbal yang akan digelar di kompleks Candi Arjuna pada 29 Agustus, lanjut dia, untuk sementara bakal diikuti 13 anak dari berbagai wilayah di kawasan Dieng, baik Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, maupun Batang.

"Ada lebih dari 40 anak berambut gimbal yang mendaftar untuk mengikuti ritual tersebut. Setelah melalui proses kurasi, terdapat 30 anak, dan hasil penjurian sementara hingga saat ini ada 13 anak yang dipastikan mengikuti ritual serta difasilitasi berbagai permintaannya," kata Alif.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan pemerintah daerah mendukung DCF sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi lokal, terutama masyarakat Desa Dieng Kulon.

Dia mengatakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa selama 16 tahun telah mengembangkan DCF sebagai industri wisata berbasis komunitas yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Laporan Bank Indonesia pada 2025 mencatat perputaran uang di kawasan Dataran Tinggi Dieng selama festival mencapai lebih dari Rp40 miliar, meskipun wisatawan rata-rata hanya menginap satu malam,” katanya.

## **Demi Investasi Rp5,3 Triliun, Gunung Ungaran Bakal Dibor Sedalam 2 Ribu Meter**

Rabu, 26 Agustus 2026 21:40 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1264396/demi-investasi-rp53-triliun-gunung-ungaran-bakal-dibor-sedalam-2-ribu-meter>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Jateng, Dwi Suryono mengungkapkan, nilai investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran mencapai 300 juta dolar AS atau senilai Rp5,3 Triliun.

Nilai potensi investasi tersebut dihasilkan selepas tahapan eksplorasi seluas 29,8 ribu hektare di dua kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.

"Ya potensi itu perlu pembuktian dengan melakukan pengeboran secara langsung dengan kedalaman 1.900-2.200 meter," ujar Dwi kepada Tribun saat konferensi pers di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (26/8/2026).

Dwi menyebut, tahapan eksplorasi tersebut bakal dilakukan dua tahun mendatang persisnya di akhir tahun 2028 atau awal tahun 2029.

Sebelum melakukan eksplorasi, PT PLN sebagai pemegang sah izin Wilayah Kerja Panas Bumi, perlu memetakan titik mana saja yang layak dieksplorasi.

Artinya, luasan lahan eksplorasi 29,8 ribu hektare di dua kabupaten masih akan dipetakan kembali.

"Jadi belum tahu, titik eksplorasi di Kabupaten Semarang atau Kendal, tetapi yang jelas dari luasan lahan konsesi itu, paling luas di Semarang," katanya.

Dari kondisi itu, ia meminta masyarakat di dua wilayah tersebut tidak perlu khawatir dari jalannya proyek.

Sebab, nantinya PT PLN akan mengajak berdiskusi dalam skema jejak pendapat.

### **Alasan Ngotot Pilih PLTP**

Dwi mengungkapkan, potensi energi panas bumi PLTP Gunung Ungaran mencapai 55 Megawatt (MW), diperkirakan menyumbang empat (4) sampai lima (5) persen total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah.

PLTP Dieng dengan potensi 70 MW menyumbang enam (6) persen bauran EBT.

Bauran EBT di Jawa Tengah telah mencapai 22,3 persen pada tahun 2025. Capaian itu, telah melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2025 sebesar 21,32 persen.

Dalam mengejar target itu, Dwi menjelaskan, sejumlah potensi PLTP di wilayah lain juga terus dikejar seperti Baturraden, Guci, Umbul Telomoyo, dan Jenawi.

"Dieng sudah operasi, Gunung Ungaran proses, Jenawi (Karanganyar) belum ada kegiatan lagi, di Umbul Telomoyo sudah ada sosialisasi-sosialisasi, Baturraden masih off, di Guci juga masih off," tandasnya. (Iwn)

## **UMKM Semarang Bidik Pasar Global, Buyer Mesir hingga India Jajaki Produk Lokal**

Rabu, 26 Agustus 2026 21:02 WIB

<https://kontensemarang.com/berita/umkm-semarang-bidik-pasar-global-buyer-mesir-hingga-india-jajaki-produk-lokal?all=1>

KONTENSEMARANG.COM — Peluang pelaku UMKM Kota Semarang untuk memperluas pasar ke luar negeri kembali terbuka melalui program Semarang Rise 2026.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon buyer dari berbagai negara dalam puncak kegiatan di Hotel Gumaya, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang promosi produk. Para pelaku UMKM juga mendapat kesempatan menjajaki kerja sama perdagangan dengan calon pembeli dari mancanegara.

Puncak program ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara pelaku UMKM Kota Semarang dan sejumlah calon buyer asing. Perwakilan pasar yang hadir antara lain berasal dari Mesir, kawasan Timur Tengah, dan India.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Margaritha Mita Dewi Sopa mengatakan Semarang Rise 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus membuka akses mereka ke pasar internasional.

"Ini merupakan rangkaian puncak dari program Semarang Rise 2026 dalam rangka mendukung program Waras Ekonomi Kota Semarang. Tujuannya agar teman-teman UMKM bisa naik kelas dan berhasil menembus pasar ekspor global," ujar Mita.

Menurut Mita, peserta Semarang Rise 2026 tidak langsung dibawa ke tahap promosi dan penjajakan pasar.

Mereka terlebih dahulu mengikuti serangkaian proses untuk memastikan produk dan kemampuan bisnisnya lebih siap bersaing di tingkat global.

Program yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2026 itu mencakup sosialisasi, kurasi, pengumuman peserta, penguatan kolaborasi pentahelix, hingga inkubasi bagi UMKM terpilih.

Sebanyak 100 UMKM mengikuti rangkaian program tersebut. Peserta terbagi menjadi 50 UMKM kuliner dan 50 pelaku usaha yang bergerak di bidang kerajinan atau craft.

Dalam agenda puncak, peserta memaparkan berbagai keunggulan produk sekaligus kapasitas produksinya kepada calon buyer.

Informasi tersebut menjadi bagian penting untuk menunjukkan kesiapan UMKM dalam memenuhi permintaan pasar internasional.

Mita menilai kualitas produk saja belum cukup untuk membawa UMKM masuk ke pasar ekspor. Pelaku usaha juga perlu memiliki kemampuan menjaga jumlah produksi, kualitas barang, serta kontinuitas pasokan.

“Melalui program ini kami ingin UMKM tidak hanya memiliki produk yang bagus, tetapi juga siap masuk ke pasar yang lebih luas,” kata Mita.

Upaya membuka akses pasar global tersebut melanjutkan capaian program pemerintah sebelumnya. Sepanjang 2025, sebanyak 11 UMKM Kota Semarang tercatat telah berhasil mengirimkan produknya ke pasar internasional.

Produk yang berhasil menembus pasar luar negeri di antaranya rengginang, kue jahe, hingga jamu jun. Dengan hadirnya calon buyer baru dalam Semarang Rise 2026, peluang ekspor produk lokal diharapkan semakin terbuka.

Salah satu pelaku UMKM yang telah merasakan manfaat pendampingan pemerintah adalah Hartati Tri Arini, pemilik La Romzi Etnik.

Usahanya yang berada di Pudakpayung, Banyumanik, Semarang, memproduksi berbagai produk fesyen dengan teknik eco print.

Produk La Romzi Etnik tidak hanya dipasarkan di Indonesia. Sejumlah karyanya telah menjangkau konsumen di Malaysia, Hong Kong, Sydney, hingga Inggris.

“Eco print kami sering dibawa ke luar negeri. Kami juga sering difasilitasi Dinas Koperasi Kota Semarang untuk mengikuti pameran, bahkan sampai ke luar negeri,” kata Hartati.

Hartati melihat pasar internasional sebagai peluang besar bagi produk kerajinan yang memiliki ciri khas. La Romzi Etnik memproduksi berbagai jenis barang, mulai pakaian, kain, syal, tas, topi, hingga pouch.

Di antara produk tersebut, syal menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati karena dapat digunakan dengan beragam gaya.

“Syal menjadi salah satu best seller kami. Bahkan satu syal bisa digunakan dalam delapan model,” ujarnya.

Keunggulan lain produk La Romzi Etnik terletak pada karakter eco print yang membuat setiap produk memiliki motif berbeda.

Penggunaan daun dan tanaman dalam proses pencetakan menghasilkan pola yang tidak sepenuhnya sama antara satu produk dengan lainnya.

Selain mengedepankan keunikan, Hartati juga menerapkan konsep produksi berkelanjutan. Sisa tanaman dari proses pembuatan eco print dimanfaatkan kembali sebagai bahan pupuk sehingga limbah produksi dapat ditekan.

“Produk kami sustainable dan berusaha tidak menghasilkan limbah. Bahkan sisa tanaman kami olah menjadi pupuk,” katanya.

Produk eco print La Romzi Etnik dibanderol mulai sekitar Rp95 ribu hingga Rp1,2 juta untuk kategori pakaian. (\*)

# Inflasi PCE AS Landai, Sinyal The Fed Tahan Suku Bunga

Kamis, 27 Agustus 2026 07:15 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119598/inflasi-pce-as-landai-sinyal-the-fed-tahan-suku-bunga/2>

Bloomberg, Indikator harga yang menjadi perhatian utama Federal Reserve (The Fed) meningkat sesuai ekspektasi pada Juli, sementara konsumsi rumah tangga mengalami stagnasi. Kondisi ini memberikan ruang bagi bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dalam jangka pendek.

Indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti—yang mengecualikan komponen pangan dan energi—naik 0,2% dari bulan sebelumnya, dan menguat 3,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang disesuaikan dengan inflasi tercatat tidak berubah bulan lalu, setelah sempat membukukan kenaikan kuat pada Mei dan Juni.

Rangkaian angka ini memperkuat deretan laporan yang mengindikasikan bahwa perekonomian mulai mendingin pada Juli setelah sempat mencatatkan pengeluaran yang kuat di awal musim panas. Banyak pejabat The Fed ingin menunggu lebih banyak sinyal bahwa tekanan inflasi akibat perang Iran mulai mereda, dan data ini dapat memperkuat alasan untuk menahan suku bunga acuan pada pertemuan mereka berikutnya di bulan September.

Para investor kini menantikan penjelasan Gubernur The Fed Kevin Warsh mengenai pandangannya tentang bagaimana bank sentral AS harus merespons inflasi yang persisten, saat ia berbicara pada pertemuan tahunan di Jackson Hole, Wyoming, Jumat mendatang. Data terbaru menunjukkan harga secara keseluruhan dalam indeks PCE yang menjadi acuan The Fed meningkat 3,7% dari setahun sebelumnya, masih jauh di atas target bank sentral sebesar 2%.

"Meskipun data Juli cenderung terkendali, satu-satunya masalah bagi The Fed adalah inflasi yang masih berada di atas target mereka," kata Richard Moody, kepala ekonom di Regions Financial Corp. "Dan meskipun tampaknya tidak akan melonjak lebih tinggi, inflasi juga belum terlihat akan turun kembali ke level target mereka."

Imbal hasil (yield) Treasury AS dan nilai tukar dolar AS menguat menyusul rilis data tersebut, sementara indeks S&P 500 dibuka melemah. Pasar berjangka mengindikasikan peluang kenaikan suku bunga di bulan September tetap berada di kisaran 40%, meski para investor masih memperkirakan adanya kenaikan sebelum akhir tahun.

Indikator inflasi jasa yang menjadi perhatian utama, tidak termasuk energi dan perumahan, meningkat 0,3%. Kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan harga jasa pengelolaan portofolio dan konsultasi investasi sebesar 5,6%, yang merupakan kenaikan terbesar dalam setahun.

Mulai bulan depan, Biro Analisis Ekonomi (BEA) akan mengubah metode pengukuran harga untuk sejumlah kategori, termasuk jasa hukum, perangkat lunak komputer, dan konsultasi investasi. Sejumlah ekonom memperkirakan perubahan tersebut akan menghasilkan angka PCE yang lebih rendah.

Revisi kecil ke atas terhadap data inflasi dalam beberapa bulan terakhir dapat menjadi amunisi bagi pejabat The Fed yang cenderung mulai menaikkan suku bunga, kata Veronica Clark, ekonom Citigroup Inc. Namun, dia menambahkan bahwa "tren tersebut tidak banyak berubah."

Dari sisi belanja, data menunjukkan pengeluaran riil yang disesuaikan dengan inflasi untuk barang inti turun 0,8%. Sementara itu, belanja riil untuk jasa meningkat 0,3%, didorong oleh kenaikan pengeluaran untuk jasa transportasi, makanan, dan akomodasi.

Keputusan Amazon.com Inc memajukan acara penjualan Prime Day ke Juni tahun ini dari Juli pada tahun sebelumnya kemungkinan membuat sebagian belanja konsumen terjadi lebih awal, sehingga menekan angka belanja barang pada bulan lalu. Sejumlah peritel, termasuk Walmart Inc, mengatakan konsumen yang sensitif terhadap harga masih berbelanja, tetapi lebih selektif dengan mencari diskon dan produk yang unik.

Data mengenai pendapatan dan tabungan dalam laporan tersebut menunjukkan konsumen mulai kembali memiliki daya beli setelah kenaikan harga menggerus pendapatan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Setelah disesuaikan dengan inflasi, pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat 0,4%, kenaikan terbesar sejak Januari. Sementara itu, tingkat tabungan naik menjadi 3%, tertinggi dalam empat bulan.

Para ekonom masih mewaspadai prospek ekonomi karena harga rata-rata bensin kembali berada di atas US\$4 per galon. Sejumlah ekonom juga menilai manfaat dari pengembalian pajak yang lebih tinggi dari biasanya, yang kemungkinan membantu menopang belanja dalam beberapa bulan terakhir, kini telah berakhir.

Laporan terpisah yang dirilis pada Rabu menunjukkan ekonomi AS tumbuh pada laju yang sama seperti estimasi awal pada kuartal II, meski rincian datanya menunjukkan belanja konsumen tumbuh lebih kuat.

## **Ekonomi AS Q2-2026 Tumbuh 1,5%, Konsumsi & Investasi Lebih Kuat**

Kamis, 27 Agustus 2026 06:45 WIB

Jeffrey Sparshott

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119596/ekonomi-as-q2-2026-tumbuh-1-5-konsumsi-investasi-lebih-kuat/2>

Bloomberg, Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh di laju 1,5% pada kuartal kedua, tidak berubah dari estimasi sebelumnya. Namun, rincian indikator utama menunjukkan konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis berkinerja lebih kuat dari laporan awal.

Kenaikan tahunan pada produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan inflasi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan 2,1% pada kuartal pertama, menurut estimasi kedua yang dirilis Rabu (26/8) oleh Biro Analisis Ekonomi (Bureau of Economic Analysis).

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, melonjak hingga 3,4% secara tahunan—lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 3,2%. Sementara itu, investasi tetap non-residensial tumbuh pesat di laju 8,5%.

Indikator permintaan domestik yang lebih spesifik, yakni penjualan akhir kepada pembeli swasta domestik, naik setelah direvisi menjadi 4,2% pada kuartal kedua. Angka ini menandai pertumbuhan terkuat dalam lebih dari tiga tahun terakhir, melampaui estimasi awal di level 3,9%. Ukuran ini mengecualikan ekspor bersih, persediaan barang, serta belanja pemerintah.

Di sisi lain, belanja pemerintah merosot 1% secara tahunan pada kuartal kedua, mencerminkan penurunan tajam pada belanja non-pertahanan.

Sementara itu, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti—yang mengecualikan sektor pangan dan energi—direvisi naik ke tingkat tahunan 3,6% dari sebelumnya 3,4%. Data terpisah yang dirilis pada Rabu turut menunjukkan kenaikan 0,2% pada pengukur harga PCE inti periode Juli dibanding bulan sebelumnya.

Laporan tersebut juga memperlihatkan tidak adanya perubahan pada konsumsi riil rumah tangga sepanjang Juli, setelah sempat mencatatkan lonjakan kuat pada dua bulan sebelumnya.

## **Yen Stabil, Dolar Bergerak Terbatas Jelang Simposium Jackson Hole**

Kamis, 27 Agustus 2026 15:12 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-stabil-dolar-bergerak-terbatas-jelang-simposium-jackson-hole>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pergerakan dolar Amerika Serikat (AS) cenderung terbatas pada Kamis (27/8/2026), menjelang simposium Jackson Hole. Sementara itu, yen Jepang bertahan stabil setelah pejabat Bank of Japan (BOJ) tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan depan, meski belum memberikan sinyal yang tegas.

Mengutip Reuters, euro menguat 0,05% terhadap dolar AS menjadi US\$ 1,1655. Poundsterling Inggris melemah tipis 0,05% ke US\$ 1,3586, sedangkan dolar Australia naik 0,18% menjadi US\$ 0,718.

Yen Jepang relatif stabil di level 159,30 per dolar AS. Pergerakan yen tidak banyak berubah setelah Wakil Gubernur BOJ Ryozi Himino menyatakan bahwa kenaikan suku bunga secara tepat waktu dapat membantu mencegah lonjakan inflasi yang berpotensi memaksa bank sentral melakukan pengetatan kebijakan secara mendadak di kemudian hari.

Namun, Himino tidak menggunakan bahasa yang sama seperti menjelang rapat BOJ pada Januari 2025 yang ketika itu memberikan sinyal kuat mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga melalui pidato dan konferensi pers.

Pelaku pasar sebelumnya mencari petunjuk mengenai peluang kenaikan suku bunga BOJ pada September, termasuk skala dan kecepatan pengetatan kebijakan moneter selanjutnya. Broker pasar uang Totan Tanshi memperkirakan peluang kenaikan suku bunga BOJ bulan depan mencapai 86%.

Analisis pasar Matsui Securities Sho Suzuki mengatakan pernyataan Himino menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap risiko kenaikan harga.

"Dia memang menyampaikan kekhawatiran mengenai risiko kenaikan harga ... hal itu kemungkinan membuat pasar menyimpulkan bahwa pernyataannya tidak terlalu dovish," kata Suzuki.

Namun, menurut dia, tidak adanya sinyal yang jelas membuat yen masih berpotensi kembali mengalami tekanan.

"Namun, tidak adanya sinyal yang jelas berarti ada kemungkinan yen kembali berada di bawah tekanan," ujarnya.

Suzuki menambahkan, absennya sinyal tegas tersebut tidak serta-merta berarti ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ pada September akan menurun. Pasar masih akan mencermati pernyataan anggota dewan BOJ menjelang pertemuan yang dijadwalkan pada 17-18 September mendatang.

### **Indeks dolar stabil**

Indeks dolar AS, yang mengukur kinerja greenback terhadap sejumlah mata uang utama termasuk yen dan euro, berada di level 99,13. Posisi tersebut stabil setelah indeks memangkas penguatan dari level tertinggi dalam delapan hari.

Perhatian pasar juga tertuju pada data inflasi AS. Data Departemen Perdagangan AS menunjukkan indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) meningkat 3,7% dalam 12 bulan hingga Juli 2026.

Angka tersebut tidak berubah dibandingkan Juni dan sedikit lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang disurvei Reuters sebesar 3,6%.

Secara bulanan, indeks PCE naik 0,2%. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari perkiraan 0,1%, setelah pada Juni indeks PCE justru turun 0,1%.

Data inflasi tersebut membuat ekspektasi pasar terhadap kemungkinan penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada akhir tahun masih tetap terbuka.

Ekonom Westpac Ryan Wells menilai pidato Ketua The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole akan menjadi perhatian utama pasar.

"Pidato Kevin Warsh di Jackson Hole akan menjadi ujian utama," kata Wells dalam catatannya.

Simposium Jackson Hole dijadwalkan dimulai pada Kamis waktu setempat dan menjadi salah satu agenda penting yang dinantikan investor untuk memperoleh petunjuk mengenai arah kebijakan moneter AS.

### **Won Korea Selatan menguat**

Sementara itu, won Korea Selatan menguat 0,39% terhadap dolar AS menjadi 1.379,9 won per dolar setelah Bank of Korea menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,00%.

Kenaikan tersebut merupakan peningkatan suku bunga untuk dua kali berturut-turut.

Dolar Kanada relatif stabil di level 1,388 dolar Kanada per dolar AS. Pergerakan mata uang tersebut turut menjadi perhatian setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu mengatakan bahwa sudah waktunya memberikan pelajaran kepada Kanada terkait kebijakan negara tersebut.

Trump mengatakan, "Sudah waktunya mengajarkan kepada Kanada bahwa Anda tidak bisa terus melakukan ini lagi," hanya beberapa hari setelah perundingan perdagangan antara AS dan Kanada terhenti.

### **Bitcoin dan Ether menguat**

Di pasar aset kripto, bitcoin tercatat naik 0,26% menjadi US\$ 78.640,95. Sementara itu, ether menguat 0,46% menjadi US\$ 2.483,27, meski memangkas sebagian penguatan yang sempat dicapai sebelumnya.

Pergerakan mata uang dan aset kripto global pada Kamis masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan bank sentral utama, khususnya arah suku bunga The Fed dan BOJ.

Bagi pasar, sinyal dari pejabat bank sentral menjadi semakin penting karena investor berupaya memperkirakan arah suku bunga global di tengah perkembangan inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

## **Ekspor Thailand Melonjak 21,6% pada Juli 2026, Didorong Permintaan Teknologi & AI**

Kamis, 27 Agustus 2026 11:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-thailand-melonjak-216-pada-juli-2026-didorong-permintaan-teknologi-ai>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Ekspor Thailand kembali mencatat pertumbuhan kuat pada Juli 2026. Data Kementerian Perdagangan Thailand yang dirilis Kamis (27/8/2026) menunjukkan ekspor yang telah melalui proses kepabeanan meningkat 21,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memproyeksikan kenaikan 17,75%. Angka Juli juga melanjutkan pertumbuhan 20,8% yang tercatat pada Juni.

Di sisi lain, impor Thailand pada Juli melonjak 36,7% secara tahunan. Kondisi tersebut membuat Thailand mencatat defisit perdagangan sebesar US\$ 3,61 miliar pada Juli, meski masih lebih kecil dibandingkan perkiraan defisit US\$ 5,38 miliar.

Kementerian Perdagangan Thailand memperkirakan kinerja ekspor akan terus tumbuh pada 2026. Meningkatnya permintaan terhadap produk yang berkaitan dengan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) diperkirakan menjadi salah satu pendorong utama.

Pemerintah Thailand kini memperkirakan ekspor sepanjang tahun ini tumbuh lebih dari 11%. Proyeksi tersebut naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 8%.

Sepanjang Januari-Juli 2026, ekspor Thailand telah meningkat 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, ekspor Thailand tumbuh 12,9% sepanjang 2025.

Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor terbesar Thailand. Pada Juli, pengiriman barang ke AS meningkat 45,3% dibandingkan setahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor ke China, salah satu pasar utama Thailand lainnya, tumbuh 15,2%.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa permintaan dari pasar utama dan sektor yang berkaitan dengan teknologi masih menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekspor Thailand pada tahun ini.

## **Mata Uang Asia Beragam, Dolar Taiwan dan Won Korea Selatan Menguat**

Kamis, 27 Agustus 2026 09:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-beragam-dolar-taiwan-dan-won-korea-selatan-menguat>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang Asia beragam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (27/8/2026).

Dolar Taiwan dan won Korea Selatan menjadi dua mata uang yang mencatat penguatan terbesar di kawasan.

Mengutip Reuters, hingga pukul 02.24 GMT, dolar Taiwan menguat 0,25% menjadi 31,738 per dolar AS, sedangkan won Korea Selatan menguat 0,54% menjadi 1.378,80 per dolar AS.

Penguatan won terjadi di tengah keputusan Bank of Korea (BOK) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3%.

BOK juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini menjadi 3,3% dari sebelumnya 2,6%.

Sementara itu, dolar Singapura melemah 0,07% menjadi 1,271 dolar Singapura per dolar AS. Yen Jepang turun 0,03% menjadi 159,340 yen per dolar AS.

Baht Thailand juga melemah tipis 0,01% menjadi 32,805 per dolar AS. Peso Filipina turun 0,07% menjadi 61,679 per dolar AS.

### **Rupiah Tertekan**

Di kawasan Asia Tenggara, rupiah menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terbesar. Rupiah tercatat melemah 0,39% menjadi Rp17.765 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.695 per dolar AS.

Ringgit Malaysia juga melemah 0,07% menjadi 4,025 per dolar AS. Sementara itu, rupee India relatif stabil di 95,413 per dolar AS.

Yuan China menguat tipis 0,03% menjadi 6,721 per dolar AS.

Jika dihitung sejak akhir 2025, kinerja mata uang Asia masih beragam. Won Korea Selatan menjadi salah satu yang berkinerja terbaik dengan penguatan 4,40%, disusul yuan China yang menguat 3,97% dan dolar Singapura yang naik 1,16%.

Sebaliknya, rupiah telah melemah 6,16% sepanjang 2026 hingga perdagangan Kamis tersebut.

Pelemahan lebih dalam terjadi pada peso Filipina sebesar 4,67%, rupee India 5,81%, baht Thailand 4,13%, dan yen Jepang 1,69%.

Di sisi lain, ringgit Malaysia menguat 0,77%, sedangkan dolar Taiwan melemah 0,95% sejak akhir 2025.

## **Investasi Bisnis Australia Turun 3,6% pada Kuartal II 2026**

Kamis, 27 Agustus 2026 09:09 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/investasi-bisnis-australia-turun-36-pada-kuartal-ii-2026>

KONTAN.CO.ID – SYDNEY. Investasi bisnis Australia mengalami kontraksi pada kuartal II 2026, seiring melambatnya lonjakan investasi pembangunan pusat data (data centre) yang sebelumnya mendorong belanja modal perusahaan.

Mengutip Reuters, Kamis (27/8/2026), Biro Statistik Australia (ABS) mencatat belanja modal swasta turun 3,6% secara kuartalan menjadi A\$50,95 miliar atau sekitar US\$36,58 miliar setelah disesuaikan dengan inflasi.

Realisasi tersebut jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan belanja modal swasta justru meningkat 0,5% pada kuartal II 2026.

Penurunan terutama disebabkan oleh anjloknya belanja pada peralatan informasi, media dan telekomunikasi sebesar 53%.

ABS menyebut penurunan tersebut terjadi setelah perusahaan mencatat investasi besar-besaran pada rak server dan peralatan pemrosesan untuk pusat data pada kuartal sebelumnya.

Sementara itu, belanja untuk pabrik dan mesin turun 8,9%. Sebaliknya, belanja untuk bangunan dan struktur meningkat 2,1%.

Meski investasi aktual melemah pada kuartal II, prospek belanja perusahaan untuk periode mendatang justru meningkat.

Survei ABS menunjukkan, perusahaan berencana mengalokasikan belanja sekitar A\$200,7 miliar untuk tahun hingga Juni 2027. Angka tersebut 15,5% lebih tinggi dibandingkan estimasi sebelumnya.

Sebagai informasi, dalam laporan tersebut nilai tukar yang digunakan adalah US\$1 setara A\$1,3928.

## **Bank Sentral China Kembali Suntik Likuiditas Rp1.105 Triliun Jelang Akhir Bulan**

Kamis, 27 Agustus 2026 08:47 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-china-kembali-suntik-likuiditas-rp1105-triliun-jelang-akhir-bulan>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), kembali menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan melalui operasi reverse repo bertenor semalam pada Kamis (27/8/2026).

Langkah tersebut dilakukan ketika permintaan dana tunai meningkat menjelang akhir bulan.

Mengutip Reuters, PBOC menyalurkan 503,5 miliar yuan atau sekitar US\$ 74,90 miliar melalui overnight reverse repo. Bank sentral China tidak mengungkapkan tingkat suku bunga untuk fasilitas tersebut.

Selain itu, PBOC juga menyuntikkan 103 miliar yuan melalui reverse repo bertenor tujuh hari dengan suku bunga 1,40%.

PBOC menyatakan, operasi likuiditas pada Kamis tersebut telah sepenuhnya memenuhi kebutuhan para primary dealers.

Sebelumnya, PBOC menyatakan akan menjalankan operasi overnight reverse repo mulai 27 Agustus hingga 1 September 2026.

Melalui fasilitas tersebut, bank sentral China dapat menyuntikkan dana hingga 600 miliar yuan per hari ke sistem perbankan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PBOC menjaga likuiditas sistem keuangan tetap memadai, terutama menjelang periode akhir bulan ketika kebutuhan dana perbankan biasanya meningkat.

Sebagai informasi, berdasarkan kurs yang digunakan dalam laporan Reuters, US\$ 1 setara dengan 6,7225 yuan.

# **Bank Sentral Korea (BOK) Kerek Suku Bunga Jadi 3%, Tertinggi Sejak Januari 2025**

Kamis, 27 Agustus 2026 08:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-korea-bok-kerek-suku-bunga-jadi-3-tertinggi-sejak-januari-2025>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Bank of Korea (BOK) atau bank sentral Korea Selatan menaikkan suku bunga acuan sebesar seperempat poin persentase menjadi 3,00% pada hari Kamis (27/8/2026).

Keputusan BOK menaikkan suku bunga 25 basis points (bps), sesuai perkiraan para analis. Hal tersebut juga memberikan kenaikan suku bunga untuk kedua kali secara berturut-turut.

Kenaikan suku bunga acuan menjadi 3% ini dilakukan BOK karena inflasi Korea Selatan tetap di atas target, sementara risiko stabilitas keuangan tetap ada.

Dewan kebijakan moneter beranggotakan tujuh orang di BOK memilih untuk menaikkan suku bunga repo tujuh hari sebesar 25 bps, sebuah keputusan yang diprediksi oleh 18 dari 35 ekonom yang disurvei dalam jajak pendapat Reuters.

Dengan kebijakan ini, maka suku bunga acuan mencapai posisi tertinggi sejak Januari 2025.

Inflasi Korea Selatan terus naik dan mencapai 2,6% di Juli 2026. Padahal, BOK menargetkan inflasi berada di level 2% untuk tahun ini.

Gubernur Shin Hyun Song akan mengadakan konferensi pers pada pukul 0210 GMT

## **Deputi Gubernur BOJ Dorong Kenaikan Suku Bunga Secara Tepat Waktu**

Kamis, 27 Agustus 2026 09:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/deputi-gubernur-boj-dorong-kenaikan-suku-bunga-secara-tepat-waktu>

KONTAN.CO.ID – TOKYO. Deputi Gubernur Bank of Japan (BOJ) Ryoze Himino mendorong kenaikan suku bunga dilakukan secara tepat waktu untuk mencegah lonjakan inflasi yang dapat memaksa bank sentral melakukan kenaikan suku bunga secara drastis di masa mendatang.

Dalam pidatonya kepada para pemimpin bisnis pada Kamis (27/8/2026), Himino mengatakan BOJ perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap risiko kenaikan harga dibandingkan sebelumnya.

"Jika inflasi yang mendasari menyimpang di atas target 2%, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian. Kita harus memberikan perhatian lebih besar terhadap risiko kenaikan harga dibandingkan sebelumnya," ujar Himino.

Menurut dia, kenaikan suku bunga secara tepat waktu dapat membantu mencegah tekanan inflasi yang terlalu tinggi sehingga BOJ tidak perlu mengambil langkah pengetatan moneter secara tiba-tiba di kemudian hari.

Himino juga menekankan pentingnya pembahasan mendalam dalam setiap pertemuan kebijakan moneter BOJ dengan mempertimbangkan risiko terhadap inflasi.

"Pembahasan mendalam harus dilakukan pada setiap pertemuan kebijakan moneter dengan mempertimbangkan perspektif tersebut," katanya. Baca Juga: Investasi Bisnis Australia Turun 3,6% pada Kuartal II 2026

Pernyataan Himino memperkuat perhatian pasar terhadap arah kebijakan moneter BOJ, terutama terkait risiko inflasi yang berkelanjutan dan kemungkinan penyesuaian suku bunga lebih lanjut.

## **Utang Investasi 2027 Naik 5% Jadi Rp203 T, Ini Detailnya**

Kamis, 27 Agustus 2026 20:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119728/utang-investasi-2027-naik-5-jadi-rp203-t-ini-detailnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan utang atau pembiayaan investasi pada 2027 mencapai Rp203,9 triliun, atau meningkat 5% dibanding proyeksi pembiayaan investasi pada 2026 yang sebesar Rp194,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan angka ini terdiri dari: Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp38,3 triliun. Kemudian, investasi kepada organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI) sebesar Rp2,1 triliun.

"Investasi pemerintah non-permanen Rp34,7 triliun, dan investasi lainnya Rp132,8 triliun. Di sisi lain, terdapat penerimaan kembali investasi Rp3,8 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan investasi tercatat Rp203,9 triliun," sebut Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Secara detail dipaparkan, pembiayaan BUMN dan BLU digunakan untuk pembiayaan pendidikan melalui dana abadi, penanggulangan bencana, pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pendanaan kerja sama pembangunan internasional.

Sementara itu, pembiayaan organisasi/LKI/BUI digunakan untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota.

Kemudian, pembiayaan non-permanen digunakan untuk penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta program pembangunan infrastruktur daerah.

Terakhir, pembiayaan investasi lain ialah pembiayaan pendidikan antara lain untuk penambahan dana di bidang pendidikan, serta pembiayaan infrastruktur. Kemudian, Cadangan pembiayaan investasi untuk investasi pemerintah non-permanen, investasi kepada BLU serta PMN kepada BUMN. Cadangan pembiayaan lain untuk mendukung program prioritas pemerintah.

# Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097 T, Purbaya Ungkap Prioritas

Kamis, 27 Agustus 2026 20:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119726/belanja-negara-2027-tembus-rp4-097-t-purbaya-ungkap-prioritas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan anggaran belanja negara mencapai Rp4.097 triliun pada 2027, meningkat 6,6% dibanding proyeksi belanja negara pada 2026 yang sebesar Rp3.842 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan pemerintah akan menjalankan belanja berkualitas, yang efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Dengan cara pro-growth dan pro-welfare mendukung PKPN (Program Kerja Prioritas Nasional), dan refocusing (fokus kembali) belanja," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi, dan perlindungan sosial, serta efektivitas sinergi serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait belanja pemerintah pusat, Purbaya memaparkan anggaran belanja pemerintah pusat pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.362 triliun atau tumbuh 3,6% dibanding proyeksi belanja pada 2026 yang sebesar Rp3.245 triliun. Angka ini terdiri dari belanja K/L Rp1.504,7 triliun dan belanja non-K/L Rp1.857 triliun.

Berdasarkan tema, anggaran pendidikan dipatok mencapai Rp820,9 triliun atau melonjak dibanding proyeksi belanja pada 2026 yang hanya Rp720,8 triliun. Kemudian, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun, dari semula Rp500 triliun.

Selanjutnya, anggaran kesehatan ditargetkan sebesar Rp244,9 triliun dari Rp240,8 triliun. Terakhir, anggaran ketahanan pangan dialokasikan Rp195,3 triliun dari semula Rp190,9 triliun.

Purbaya menyebutkan kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan mendukung pencapaian target PKPN 2027, optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, kualitas sumber daya manusia, serta menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, anggaran pemerintah pusat juga akan digunakan untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional, serta mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penguatan program graduasi kemiskinan.

Kemudian, manajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Terakhir, memperkuat kapabilitas riset nasional untuk mendukung pencapaian hilirisasi dan industrialisasi.

## Capai 19% Penerimaan, DPR Soroti Beban Bunga Utang di RAPBN 2027

Kamis, 27 Agustus 2026 16:40 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119704/capai-19-penerimaan-dpr-soroti-beban-bunga-utang-di-rapbn-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti mengenai beban bunga utang yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Untuk tahun 2027, beban bunga kita begitu besar yang harus ditanggung oleh pemerintah APBN sudah 19% dari penerimaan negara,” kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Pjs Gubernur Bank Indonesia, Kamis (27/8/2026).

Terlebih lagi, Said memaparkan bahwa saat ini rasio bunga yang harus dibayar plus jatuh tempo pokok utang sudah mencapai 47%.

Sehingga menurut Said, pembahasan RUU APBN harus dapat mempertanggungjawabkan peta jalan mitigasi terhadap utang pemerintah ke depan.

Said juga menyebut besarnya beban bunga juga dipengaruhi oleh kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Dia menyebut yield yang sebelumnya berada di sekitar 6,2% kini telah mencapai sekitar 7,1%-7,2%.

Di sisi lain, Said menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah. Dalam asumsi RAPBN 2026, rupiah dipatok sebesar Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini telah berada di sekitar Rp17.751 per dolar AS.

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menganggarkan pembayaran bunga utang (PBU) yang mencapai Rp650 triliun. Angka tersebut naik 11,7% apabila dibandingkan dengan outlook PBU tahun 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas PBU dalam negeri sebesar Rp589,68 triliun dan PBU luar negeri yang sebesar Rp60,63 triliun.

Namun, Pemerintah berkilah bahwa pertumbuhan PBU tahun 2027 tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2026 yang sebesar 13,2% (terhadap realisasi PBU tahun 2025).

Menurut Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, kewajiban PBU tersebut mencakup pembayaran kupon atas SBN (Surat Berharga Negara), bunga atas pinjaman, dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang.

Sementara, posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun sampai 30 Juni 2026. Angka ini naik 3,76% dari level utang pada Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal II-2026 itu setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

## **Pelemahan Rupiah Terpangkas, Ditutup di Rp17.726/US\$**

Kamis, 27 Agustus 2026 16:05 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/119712/pelemahan-rupiah-terpangkas-ditutup-di-rp17-726-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Kamis (27/8/2026) dengan pelemahan lebih terbatas 0,08% ke level Rp17.726/US\$, kala harga minyak mentah kembali terpangkas 0,81% ke US\$87,13/barel.

Dari dalam negeri, sentimen terkait kekhawatiran adanya eskalasi gejolak sosial akibat demonstrasi yang sempat menekan rupiah agaknya mulai mereda. Rupiah berhasil memangkas pelemahannya, seiring aksi demonstrasi yang relatif terkendali.

Dari sisi eksternal, tekanan harga minyak kembali jinak, meski indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama tetap tinggi di 99,17. Hal ini tetap menyisakan ruang penguatan bagi sebagian mata uang Asia.

Won Korea Selatan memimpin penguatan bersama dolar Taiwan dengan penguatan masing-masing 0,4%, diikuti dolar Singapura menguat terbatas 0,08% dan yuan offshore 0,05%, yuan China 0,03%, dan dolar Hong Kong 0,01%.

Sebaliknya, peso Filipina melemah paling tajam 0,37% disusul baht Thailand, rupee India, dan rupiah juga yen Jepang.

Terpangkasnya pelemahan rupiah mendapat dukungan dari pasar surat utang. Sebagian tenor kembali mencatat aksi beli, terutama dari tenor pendek dna menengah. Tenor 1 tahun mencatat penurunan yield 3,5 bps 6,73%, begitu juga tenor 2 tahun turun 1,5 bps ke 6,64% dan tenor 4 tahun 1,4 bps ke 6,84%.

Sementara, tenor 5 tahun turun lebih tipis 0,5% ke 6,89%, dan tenor 7 tahun turun 0,1 bps ke 7%, dan tenor 8 tahun turun 1,1 bps ke 7%. Namun pada tenor acuan, yield masih tercatat naik 3,1 bps ke 7,08%, diikuti kenaikan yield di tenor 11 tahun 4,4 bps ke 7,1%, begitu juga tenor 20 tahun naik 1,8 bps ke 7,14%.

Hari ini, meredanya demonstrasi sedikit memberi ruang bagi rupiah untuk bernapas. Risiko gejolak sosial yang sempat dikhawatirkan setidaknya tak berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas, dan menurunkan premi risiko yang sebelumnya melekat pada aset-aset rupiah.

Melansir Bloomberg, Credit Default Swap (CDS) 5 tahun hari ini berada di 84,66 turun dari 85,33 pada 19 Agustus lalu. Selain itu, pasar surat utang juga mendapat dukungan dari peralihan likuiditas dari berkurangnya frekuensi lelang instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

# Kian Menggerus Fiskal, Banggar Desak Pemerintah Siapkan Peta Jalan Mitigasi Utang

Kamis, 27 Agustus 2026 19:32 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/kian-menggerus-fiskal-banggar-desak-pemerintah-siapkan-peta-jalan-mitigasi-utang>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyiapkan peta jalan mitigasi utang pemerintah.

Langkah ini dinilai penting karena meningkatnya beban utang mulai mempersempit ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desakan tersebut disampaikan di tengah proyeksi beban bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 650,3 triliun pada 2027. Angka ini naik 11,7% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 582,2 triliun dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Said menilai pengelolaan utang tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal tahunan. Pemerintah membutuhkan strategi jangka menengah yang jelas untuk mengendalikan beban utang sekaligus menjaga kesehatan APBN.

"Kita kembali pada diskusi kita dua tahun lalu tentang peta jalan menuju APBN berimbang," ujar Said dalam rapat kerja dengan pemerintah membahas RAPBN 2027 di DPR, Kamis (27/8/2026).

Menurut Said, beban utang kini semakin berat jika dibandingkan dengan kapasitas penerimaan negara.

Pembayaran bunga utang telah mencapai sekitar 19% dari penerimaan negara. Jika ditambah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, rasio beban tersebut mencapai sekitar 47%.

Kondisi itu perlu segera diantisipasi agar peningkatan kewajiban utang tidak terus menggerus kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan.

Tekanan terhadap biaya utang juga berasal dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Said menyebut yield yang sebelumnya berada di sekitar 6,2% kini meningkat menjadi sekitar 7,1%-7,21%.

Di sisi lain, pelemahan rupiah turut meningkatkan risiko pengelolaan utang. Said mencatat asumsi nilai tukar dalam APBN berada di Rp 16.500 per dolar AS, sedangkan rupiah saat ini disebut telah berada di sekitar Rp 17.751 per dolar AS.

Kombinasi kenaikan yield SBN dan pelemahan rupiah tersebut berpotensi meningkatkan biaya utang sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Karena itu, Said meminta Menteri Keuangan memaparkan strategi konkret untuk mengendalikan risiko utang dalam beberapa tahun ke depan. "Marilah kita bersama-sama menyiapkan peta jalan mitigasi terhadap utang kita di masa depan," tegasnya.

# **Ekonom CORE: Pertumbuhan Ekonomi Belum Banyak Dirasakan Kelas Menengah**

Kamis, 27 Agustus 2026 18:44 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-core-pertumbuhan-ekonomi-belum-banyak-dirasakan-kelas-menengah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keresahan ekonomi kelas menengah masih terlihat di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan ekonomi belum banyak dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Faisal, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45%, indikator makro tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pendapatan dan biaya hidup masyarakat. Baca Juga: Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Rampung Desember 2026

“Walaupun pertumbuhan ekonomi itu sampai di atas 5%, kalau melihat kondisi sehari-hari masyarakat, kaitannya dengan biaya hidup dan penghasilan pekerjaan, belum banyak bisa menggambarkan dampaknya,” ujar Faisal kepada KONTAN, Kamis (27/8).

Ia mengatakan tekanan kelas menengah telah berlangsung sejak pandemi. Salah satu persoalan utama berasal dari sisi pendapatan akibat terbatasnya pekerjaan dan rendahnya pertumbuhan upah.

Menurut Faisal, sebagian pekerja yang terkena PHK saat pandemi beralih dari sektor formal ke informal. Namun, baru sebagian yang kembali masuk ke sektor formal.

Selain itu, pekerja yang masih berada di sektor formal maupun informal juga menghadapi tekanan upah. Sebagian masyarakat bahkan bekerja dengan jam kerja terbatas atau pendapatan yang rendah.

Kondisi tersebut membuat kualitas pekerjaan menjadi persoalan. Faisal menilai masyarakat yang secara statistik tidak tercatat sebagai pengangguran belum tentu memiliki pekerjaan dengan pendapatan memadai.

Di sisi lain, biaya hidup juga memberikan tekanan tambahan. Faisal mengatakan inflasi umum memang masih relatif terkendali, tetapi kenaikan harga pangan dirasakan lebih langsung oleh masyarakat.

“Yang kedua adalah dari biaya hidupnya. Kalau inflasi umum memang tidak tinggi, tetapi inflasi bahan pangan cukup tinggi. Dalam kondisi pertumbuhan upah rendah, kenaikan biaya tersebut tetap berdampak terhadap daya beli,” katanya.

Menurut Faisal, pemerintah perlu menggeser perhatian dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut tersebar ke daerah dan menciptakan lebih banyak pekerjaan formal.

Strategi tersebut, lanjutnya, perlu terintegrasi dalam berbagai program prioritas pemerintah. Mulai dari hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat pada angka makro, tetapi juga tercermin dari peningkatan pendapatan, kualitas pekerjaan, dan daya beli masyarakat.

# **Dekatkan Peluang, CJIBF 2026 Berpotensi Alirkan Investasi Rp19,07 Triliun ke Jateng**

Kamis, 27 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/dekatkan-peluang-cjibf-2026-berpotensi-alirkan-investasi-rp1907-triliun-ke-jateng/>

JAKARTA – Gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta, mencatatkan potensi investasi senilai Rp19,07 triliun.

Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah, seiring adanya sesi one-on-one meeting antara pelaku usaha dan calon investor, pada kegiatan yang dihelat di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menyampaikan, CJIBF di Jakarta dilakukan untuk mendekatkan berbagai peluang investasi Jawa Tengah, kepada calon investor yang banyak beraktivitas di ibu kota.

“Kegiatan CJIBF diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, asosiasi, BUMD, BUMN, perbankan, serta calon investor dari dalam dan luar negeri,” ujar sakina.

Ditambahkan, CJIBF ini merupakan gelaran yang ke dua, sebelumnya sudah dilaksanakan di Semarang pada Mei 2026.

Kegiatan kali ini diawali dengan one-on-one meeting antara pelaku usaha dan calon investor. Dari pertemuan tersebut tercatat 74 pertemuan dari 36 pelaku usaha. Setelah pertemuan, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan investasi.

Selain itu juga menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama investasi. Di antaranya penandatanganan Letter of Intent (LoI) penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Komitmen tersebut antara lain PT Hyrecomas Garam Nusantara dengan rencana investasi Rp681,84 miliar, PT Hailex Technology Indonesia Rp175 miliar, PT Cipta Kreasi Wisata sebesar Rp200 miliar, serta PT Fayyad Industri Pangan Halal Terhubung Rp8,75 triliun.

Selain itu, terdapat kerja sama pengembangan waste to energy melalui PT Energy International bersama tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta komitmen investasi PT Yosun Tire and Rubber Indonesia asal China senilai Rp4 triliun, di KEK Industropolis Batang.

Perwakilan British Chamber, Danish Chamber of Commerce, dan Consul Asia, Ian Betts menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar terutama pada sektor investasi hijau, ekowisata, serta kawasan industri.

Menurut Ian, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu daya tarik bagi investor global, karena sejalan dengan kebutuhan industri masa depan.

“Saya melihat ada ketertarikan besar terhadap sektor hijau dan berkelanjutan, serta ekowisata. Ini merupakan hal baru dan sangat menarik, sehingga investor asing mungkin akan tertarik dengan peluang tersebut,” kata Ian.

Dia juga menilai keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus memberikan keuntungan bagi investor, karena menghadirkan ekosistem usaha yang lebih siap, mulai dari fasilitas, insentif, hingga kepastian dalam menjalankan bisnis.

“Saya tertarik dengan Batang dan Kendal karena keduanya terhubung dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Bagi saya, kawasan seperti itu lebih mudah dipromosikan kepada investor asing,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, CJIBF menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

“Tugas kami adalah mempermudah izin, menyiapkan lahan, menjaga keamanan, serta menjamin kepastian agar pertumbuhan ekonomi dan bisnis berkembang di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Dia mengatakan, setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki potensi yang berbeda, sehingga strategi investasi perlu disesuaikan dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan investasi tidak hanya berkembang di pusat ekonomi tertentu, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah.

Selain menarik investasi besar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.

Luthfi menyebut, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta UMKM skala mikro yang perlu didorong, agar mampu berkembang dan masuk dalam rantai pasok industri.

“Yang dibutuhkan bukan hanya permodalan dan pemasaran, tetapi bagaimana usaha mikro bisa naik kelas menjadi kecil atau menengah,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen mengatakan, arah investasi Indonesia ke depan akan semakin diarahkan pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

Dia menilai, Jawa Tengah memiliki daya tarik investasi yang kuat, karena didukung kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta ekosistem pendukung yang terus berkembang.

“Jawa Tengah menjadi salah satu pendorong investasi, karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus dan tujuh kawasan industri, yang beberapa di antaranya sudah memiliki fasilitas KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),” kata Ichsan. (Humas Jateng)\*ul

## **Gubernur Jateng sebut investasi padat karya jadi prioritas investasi wilayah**

Kamis, 27 Agustus 2026 20:59 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/643235/gubernur-jateng-sebut-investasi-padat-karya-jadi-prioritas-investasi-wilayah>

Semarang, Jateng (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa sektor padat karya saat ini masih menjadi prioritas investasi yang terus didorong di wilayahnya.

"Prioritas Jawa Tengah adalah padat karya yang didukung oleh (keberadaan) sekolah vokasi," katanya di Jakarta, Kamis.

Saat membuka Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026 bertema "Accelerating Investment Growth in Central Java Through Sustainable Development and Regional Competitiveness",

Gubernur menyebutkan jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai basis pendidikan vokasi di Jateng mencapai sekitar 1.500 sekolah yang menghasilkan lulusan siap kerja.

"Kemudian, BLK-BLK (balai latihan kerja), termasuk politeknik, sehingga BLK dan sekolah vokasi framing untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan seluruh potensi yang ada. Padat karya menjadi prioritas utama tetapi tidak menutupkan padat modal," katanya.

Luthfi melanjutkan prioritas investasi yang kedua adalah ekonomi terbarukan atau green economy yang terus digenjut investasinya di wilayah Jateng.

"Kemarin, telah diresmikan di Waduk Gajah Mungkur (dengan investasi) Rp1,6 triliun terkait solar panel yang 37 persen bisa meningkatkan listrik di wilayah Wonogiri," katanya.

Ada pula, kata dia, setidaknya 2.500 desa mandiri energi yang tersebar di Jateng, didukung dengan berbagai potensi energi terbarukan, seperti panas bumi.

"Ketiga, (usaha) mikro di wilayah kita banyak. Ini yang kita harus didukung. Tidak hanya permodalannya, tidak hanya terkait dengan permasalahannya," katanya.

Namun, kata dia, mendorong sektor mikro tersebut bisa naik kelas menjadi sektor kecil atau menengah, sehingga mereka sudah bisa mengeksplor produknya.

"Perlu adanya kerja-kerja kolaboratif antara provinsi, kabupaten, kota, dan lintas kementerian, sehingga UMKM bisa berdaya saing di luar negeri maupun di negeri sendiri," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng M Noor Nugroho menambahkan bahwa Jateng memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor investasi.

"Karena dari sisi kinerja ekonominya cukup baik, sehingga prospeknya relatif membaik, terutama di 2026-2027. Jadi, ini merupakan potensi karena kita tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi," katanya.

Nunu, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa sektor pariwisata juga memiliki potensi besar, sehingga tahun depan akan difokuskan untuk pariwisata ramah Muslim.

## **Pekab Pekalongan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui PRK 2026**

Kamis, 27 Agustus 2026 07:35 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/643151/pekab-pekalongan-memperkuat-ekonomi-kerakyatan-melalui-prk-2026>

Pekalongan, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas peluang investasi melalui kegiatan Pekan Raya Kajian (PRK) 2026, yang digelar 25-30 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh di Pekalongan, Rabu, mengatakan untuk mendukung tujuan tersebut, PRK 2026 menghadirkan berbagai zona pameran yang terstruktur dan terintegrasi.

"Dalam PRK ini ada zona pelayanan publik yang menampilkan inovasi layanan pemerintah daerah, zona UMKM dan produk unggulan, zona bisnis, investasi dan perbankan, ekonomi kreatif, hingga zona produk unggulan dari masing-masing kecamatan," katanya.

Selain pameran, berbagai kegiatan pendukung juga digelar guna meningkatkan partisipasi masyarakat seperti Festival Kuliner Legendaris, bazar produk unggulan UMKM, pertunjukan seni budaya Hari Jadi Kabupaten Pekalongan, lomba Fun Battle Manual Brewing Coffee, lomba video reels Instagram, dan tari kreasi anak.

Menurut dia, Pekan Raya Kajen 2026 diselenggarakan sebagai agenda tahunan utama dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan ini, kata dia, menjadi ajang integrasi pameran pelayanan publik, promosi produk unggulan UMKM, seni budaya, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian finansial.

Ia mengatakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia menyediakan 85 tenda sarnafil berukuran 3x3 meter yang digunakan untuk area kuliner nusantara, multiproduk, fesyen, dan kerajinan, serta 19 tenda sarnafil ukuran 5x5 meter untuk kegiatan pameran dan bazar.

"Kami berharap pelaksanaan PRK 2026 mampu melampaui capaian kunjungan maupun perputaran ekonomi tahun sebelumnya. Pekan Raya Kajen 2025 berhasil menarik sekitar 125 ribu pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp10 miliar," katanya.

## **Penyerapan APBD Kudus capai Rp1,17 triliun**

Minggu, 23 Agustus 2026 16:39 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642819/penyerapan-apbd-kudus-capai-rp117-triliun>

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penyerapan APBD tahun 2026 selama periode Januari-Juli 2026 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp1,17 triliun atau 51,15 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun.

"Realisasi penyerapan tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Minggu.

Ia mengungkapkan meskipun realisasi penyerapan anggaran belum maksimal, indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus.

Mengingat ada kegiatan fisik yang pengerjaannya dibiayai secara total hingga jadi oleh pihak pemenang lelang, baru mengajukan tagihan ke Pemkab setelah pekerjaan selesai seluruhnya.

Ada pula pekerjaan fisik yang pencairan anggarannya berdasarkan termin, sesuai realisasi pekerjaan fisiknya. Sehingga, dari sisi penyerapan APBD belum terlihat maksimal karena masih menunggu pihak ketiga.

Berdasarkan data realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) per 31 Juli 2026, belanja operasi menjadi komponen dengan nilai realisasi terbesar, yakni Rp962,72 miliar atau 55,49 persen dari anggaran Rp1,73 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp46,69 miliar atau 15,60 persen dari anggaran sebesar Rp299,27 miliar.

Untuk belanja tidak terduga, realisasinya tercatat Rp1,39 miliar atau 20,69 persen dari anggaran Rp6,73 miliar. Sedangkan belanja transfer terealisasi Rp155,56 miliar atau 64,94 persen dari anggaran Rp239,55 miliar.

Dari sejumlah OPD yang mendapatkan anggaran besar, mencatatkan penyerapan anggaran yang bervariasi. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan persentase tertinggi mencapai 78,74 persen atau Rp38,91 miliar dari total anggaran sebesar Rp49,42 miliar.

Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus dari anggaran sebesar Rp673,25 miliar, terserap sebesar Rp375,57 miliar atau 55,78 persen. Sedangkan Dinas Kesehatan Kudus dari anggaran Rp229 miliar terserap Rp128,88 miliar atau 56,28 persen. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran di OPD lainnya bervariasi antara ratusan juta hingga puluhan miliar.

Djati menjelaskan capaian tersebut masih akan terus bergerak seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Kudus, juga terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Untuk percepatan, Pemkab Kudus juga membentuk desk percepatan penyerapan anggaran dengan melibatkan Asisten II Setda Kudus untuk memonitor ke masing-masing OPD.

## **Bukan Sekadar Etalase Digital, Pemkab Batang Sulap Batang Investa Jadi Marketplace Investasi**

Kamis, 27 Agustus 2026

Jumadi

<https://berita.batangkab.go.id/detail/15899/bukan-sekadar-etalase-digital-pemkab-batang-sulap-batang-investa-jadi-marketplace-investasi?utm>

Batang - Langkah Pemerintah Kabupaten Batang menyulap platform digitalnya dari sekadar kanal informasi menjadi pusat transaksi investasi yang dinamis patut diacungi jempol. Usai diresmikan oleh Bupati M Faiz Kurniawan, platform Batang Investa kini mulai bersolek demi mempermudah daya tarik modal masuk ke daerah.

Pemerintah Kabupaten Batang tampaknya enggan membiarkan platform ini mangkrak sebagai etalase pasif. Batang Investa dirancang menjelma jadi marketplace interaktif tempat bertemunya calon investor, pemilik lahan, pemerintah desa, hingga para pelaku UMKM.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang Margo Santosa mengungkapkan, bahwa meski beberapa fitur inti sudah berjalan, penyempurnaan terus dilakukan agar manfaatnya terasa lebih optimal.

“Harapannya, realisasi investasi yang ada di Batang tidak hanya di sektor industri. Sektor lain, terutama pariwisata, hotel, jasa, dan mal, juga bisa terealisasi dengan baik,” katanya saat ditemui di Kantornya, Kamis (27/8/2026).

Saat ini, portal tersebut ditopang lima dasbor utama—mulai dari ketersediaan tenaga kerja hingga profil wilayah. Guna memperkuat analisis pasar, fitur pelacak trafik pengunjung juga tengah digodok bersama tim pengembang.

“Memang itu masih dalam pembahasan. Nanti mungkin dalam dua minggu fitur ini sudah bisa masuk di situ,” jelasnya.

## **Menghidupkan Potensi Desa hingga Ruang Gerak UMKM**

Keunggulan platform ini terletak pada skema komunikasi dua arah. Tak hanya investor yang aktif mencari data, warga lokal hingga pemdes kini punya panggung untuk menjajakan aset dan potensi desanya yang belum terjamah.

“Di salah satu fitur atau dasbor di Batang Investa ini, kita memberikan ruang kepada masyarakat dan pemilik lahan untuk menawarkan investasinya,” terangnya.

Pintu kemitraan ini terbuka lebar untuk semua skala usaha, bukan hanya untuk deretan korporasi raksasa. Pelaku kerajinan lokal maupun produk kuliner mikro punya kesempatan serupa untuk memikat calon pemodal demi mengerek kapasitas produksi dan jangkauan pasar.

“Batang Investa sifatnya umum dan makro. Siapa pun yang akan berinvestasi di Kabupaten Batang bisa memanfaatkan ini,” tegasnya.

## **Kepastian Tata Ruang dalam Satu Klik**

Bagi pemodal yang hendak merambah bisnis properti, perhotelan, hingga pusat perbelanjaan, Batang Investa juga memangkas kerumitan birokrasi lokasi lewat fitur tata ruang terpadu. Investor dapat memverifikasi kesesuaian peruntukan lahan secara presisi tanpa berspekulasi.

“Kalau ada investor yang berminat mendirikan hotel atau mal, tinggal melihat peruntukan tata ruang di situ,” pungkasnya.

Transisi Batang Investa menuju ruang temu investasi interaktif ini menegaskan satu hal: komitmen Batang untuk merangkul arus modal dari skala mikro hingga makro, dari pusat kota hingga ke pelosok desa. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)

## **DPRD Dorong Pemkot Semarang Terapkan Optimisme Belanja untuk Dongkrak PAD**

Kamis, 27 Agustus 2026 21:34 WIB

<https://kontensemarang.com/berita/dprd-dorong-pemkot-semarang-terapkan-optimisme-belanja-untuk-dongkrak-pad?all=1>

KONTENSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang mendorong perubahan strategi dalam pengelolaan anggaran daerah agar belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono menyampaikan hal tersebut se usai mengikuti Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang yang berlangsung di Perpustakaan FISIP Undip, Rabu (26/8/2026).

Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas arah pembangunan Kota Semarang dengan melibatkan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat.

Menurut Suharsono, sinergi berbagai pihak diperlukan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah memiliki dasar yang objektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia pun mengapresiasi FISIP Undip yang telah membuka ruang diskusi antara DPRD, Pemkot Semarang, dan kalangan akademisi.

“Kami berterima kasih kepada FISIP Undip yang memfasilitasi kita bersama. Ini wujud kebersamaan dan kolaborasi DPRD, Pemkot, serta akademisi. Peran akademisi sangat penting secara objektif dan konstruktif memberikan masukan untuk arah pembangunan Kota Semarang ke depan,” kata Suharsono.

Dalam diskusi tersebut, Suharsono secara khusus menyoroti pola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mendorong Pemkot Semarang mulai menggunakan pendekatan “optimisme belanja”, dengan menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya hanya menggunakan pendekatan konservatif dengan menentukan besaran belanja berdasarkan kemampuan pendapatan yang tersedia.

Menurutnya, belanja yang diarahkan pada program produktif dan memberikan manfaat langsung kepada warga justru dapat menjadi salah satu penggerak peningkatan PAD.

“Ini penting secara mendasar. Pola pikirnya adalah optimisme belanja bisa dicapai ketika pendapatan juga baik, bukan sebaliknya. Kalau mindset-nya ‘punya uang berapa lalu belanja mengikuti itu’, kinerja antar-OPD cenderung biasa dan standar saja. Kita ingin mendorong kinerja Pemkot agar signifikan,” tegasnya.

Suharsono menjelaskan, peningkatan kualitas belanja daerah akan lebih mudah dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

Ketika manfaat tersebut benar-benar diterima warga, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dinilai ikut meningkat.

Kepercayaan publik tersebut, lanjut dia, dapat mendorong masyarakat lebih aktif memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah, termasuk membayar pajak dan retribusi serta menjaga ketertiban lingkungan.

“Kalau harapan masyarakat sudah terpenuhi dan mereka merasa mendapatkan manfaatnya, melaksanakan kewajiban seperti pajak dan retribusi akan terasa lebih ringan. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pencapaian target pendapatan daerah di tahun 2026 maupun 2027 mendatang,” jelasnya.

Ia menegaskan pembangunan Kota Semarang tidak bisa hanya mengandalkan kinerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen lainnya diperlukan agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

“Harapan kami, ayo kita ajak masyarakat membangun bersama-sama agar Kota Semarang semakin baik, maju, dan hebat. Pemkot tidak akan bisa mencapai itu tanpa peran serta dan partisipasi tinggi dari masyarakat,” pungkasnya. (\*)